Australian Government

MAMPU
Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan

BaKTI
BURSA PENGETAHUAN KAWASAN TIMUR INDONESIA

Mengubah & Menginspirasi

CERITA TENTANG PERUBAHAN

YAYASAN BaKTI 2017

cover
dalam

Mengubah & Menginspirasi

CERITA TENTANG PERUBAHAN

Editor :
Lusia Palulungan
M. Ghufran H. Kordi K.
M. Taufan Hidayat
Puspita Ratna Yanti

BaKTI

Mengubah dan Menginspirasi
"Cerita Tentang Perubahan"

Editor :
M. Ghufran H. Kordi K.
Lusia Palulungan
M. Taufan Hidayat
Puspita Ratna Yanti

ISBN: 978-602-508961-9

Desain sampul dan tata letak :
Frans Gosali

Dokumentasi foto :
Yayasan BaKTI (Program MAMPU)

Penerbit:
Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI)

Alamat:
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32
Makassar 90125
Telp: 62 411 832228; 62 411 833383
Fax : 62 411 852146
Email : info@bakti.or.id
Web: www.bakti.or.id dan www.batukarinfo.com

Cetakan Pertama : November 2017

• Hak Cipta dilindungi undang-undang
• Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Publication Disclaimer

Publikasi ini telah disusun dan dicetak oleh Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dengan dukungan dari Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU). Program MAMPU merupakan inisiatif bersama antara Pemerintah Indonesia dan Australia bertujuan untuk meningkatkan akses perempuan miskin di Indonesia untuk layanan penting dan program pemerintah lainnya dalam rangka mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Informasi yang disajikan dalam publikasi ini adalah tanggung jawab dari tim produksi dan tidak mewakili pandangan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia.

SAMBUTAN

M. YUSRAN LAITUPA

DIREKTUR EKSEKUTIF
YAYASAN BaKTI

Yayasan BaKTI adalah salah satu mitra nasional pada Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Pada fase pertama (2013-2016) Program MAMPU BaKTI fokus pada perubahan kebijakan yang berpihak pada perempuan miskin, melalui penguatan parlemen (DPRD), kelompok perempuan, dan masyarakat sipil.

Selama kurang lebih empat tahun Yayasan BaKTI dan mitra-mitra di daerah berhasil mendorong beberapa perubahan kebijakan yang cukup signifikan, yang berpihak pada perempuan dan masyarakat miskin. Perubahan kebijakan tersebut melalui proses secara bertahap dan cukup panjang, serta mengikuti tata aturan yang berlaku.

Beberapa usulan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) berasal kertas posisi yang disusun oleh mitra BaKTI dan Kelompok Konstituen (KK), kemudian diusulkan kepada anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Dengan demikian, Perda yang dibuat benar-benar merupakan kebijakan untuk mengatasi suatu masalah di masyarakat.

Kertas Posisi yang dibuat oleh mitra BaKTI dan KK merupakan penilaian *(assessment)* terhadap kondisi sosial dan data pengaduan dari KK. Artinya, kertas posisi dibuat berdasarkan penilaian kondisi sosial dan data yang valid.

Dengan cara tersebut, Yayasan BaKTI hendak memperkuat proses-proses dalam perubahan kebijakan, di mana semua pihak dapat berkontribusi dan mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Anggota parlemen diperkuat untuk menginisiasi dan membuat kebijakan, sedangkan masyarakat –terutama perempuan dan perempuan miskin—diperkuat untuk mengusulkan dan menyampaikan data yang dibutuhkan dalam perubahan kebijakan.

Masyarakat yang berdaya tidak hanya dapat mengakses layanan publik yang disediakan negara, tetapi dapat berkontribusi pada perubahan kebijakan. Tulisan-tulisan di dalam buku ini, sebagian besar adalah cerita tentang perempuan yang berkontribusi dan memengaruhi perubahan kebijakan.

Tulisan-tulisan ini dibuat berdasarkan pendekatan MSC *(Most Significant Change)* untuk melihat perubahan yang signifikan pada individu maupun kelompok. Teknik MSC adalah salah satu pendekatan dalam monitoring dan evaluasi secara kualitatif. Tulisan-tulisan di dalam buku ini memberi gambaran perubahan, dari perubahan individu, yang kemudian individu-individu yang ada dapat berpengaruh terhadap perubahan kelompok.

Cerita-cerita di dalam buku ini memberi informasi yang beragam dan sangat kaya, yang

sulit dipotret secara kuantitatif di dalam laporan program. Juga sangat sulit mendiskripsikan beragam cerita di dalam buku ini ke dalam satu laporan. Karena itu, kompilasi cerita ke dalam sebuah buku, seperti ini sangat diperlukan. Banyak sekali pengetahuan dan pelajaran yang dapat diperoleh dengan membaca tulisan-tulisan di dalam buku. Semoga buku ini bermafaat bagi pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Makassar, November 2017

LUSIA PALULUNGAN

MANAJER PROGRAM
MAMPU BaKTI

Sinergi dan optimalisasi peran *multistakehoders* (pemerintah, DPRD, CSO/NGO, media dan kelompok masyarakat) telah terbangun melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yang dilaksanakan Yayasan BaKTI di kawasan timur Indonesia. Program ini telah berlangsung sejak tahun 2013 – 2016 (Fase 1) dan dilanjutkan sampai periode 2017 – 2019 (Fase2).

Optimalisasi peran anggota DPRD kabupaten/kota melalui penguatan kapasitas dan perspektif telah melahirkan kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender, dengan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan optimalisasi pemerintah juga telah menghasilkan kebijakan dan anggaran untuk mendukung keadilan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kebijakan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup)/Peraturan Walikota (Perwalkot) adalah capaian maksimal pada Program MAMPU BaKTI. Capaian tersebut juga sangat inovatif karena, khususnya pembuatan Perda melalui prosedur yang sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Anggota DPRD terlibat penuh proses pembuatan Perda sejak awal, sehingga selain mengikuti prosedur sesuai aturan, juga memahami substansi secara baik.

Perda-perda yang dibuat juga berasal dari berbagai masukan masyarakat, termasuk konstituen, yang didapatkan pada saat reses, maupun usulan langsung Kelompok Konstituen melalui Kertas Posisi yang disusun dan disampaikan kepada DPRD setempat maupun pihak eksekutif.

Sedangkan optimalisasi kelompok masyarakat yang diberi nama Kelompok Konstituen (KK) adalah salah satu pendekatan di tingkat akar rumput, yang juga dihubungkan dengan pemerintah dan DPRD melalui mekanisme formal seperti audiensi, *hearing* (dengar pendapat) dan reses. Pendekatan ini dilakukan berdasarkan temuan riset bahwa masyarakat sebagai konstituen tidak/kurang mempunyai hubungan dengan wakilnya di DPRD, bahkan sebagian besar tidak mengetahui

siapa yang mewakilnya di DPRD. Juga tidak mengetahui mekanisme formal untuk menyampaikan aspirasi atau permasalahan yang dihadapinya. Kelompok Konstituen merupakan organisasi masyarakat yang dalam pembentukan dan penguatannya, diharapkan mampu: (1) membangun komunikasi dengan Anggota DPRD sebagai wakilnya; (2) mengakses layanan publik pemerintah; dan (3) mengadvokasi kebutuhan dan kepentingannya.

Di sisi lain, NGO mengoptimalkan perannya untuk memperkuat komunitas untuk mengadvokasi hak-haknya, terutama mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara/pemerintah, serta membangun dan memperkuat jaringan dengan masyarakat sipil untuk advokasi. Termasuk didalamnya sebagai media fasilitasi antar pihak.

Demikian pula dengan optimalisasi peran media dalam mengangkat masalah sosial, mengadvokasi pihak terkait dan mengawal kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dan mempublikasikan capaian baik atasnya.

Perubahan, capaian dan kemajuan tersebut direkam dalam buku ini. Buku ini merupakan kumpulan tulisan untuk mendokumentasikan perubahan-perubahan yang terjadi, namun tidak selalu dicatat atau terpantau, apalagi dikalkulasikan secara kuantitatif. Dengan begitu, tulisan-tulisan di dalam buku ini memberitahukan secara kualitatif bahwa, Program MAMPU BaKTI berkontribusi pada perubahan-perubahan penting, yang dirasakan dan sangat berguna. Tulisan ini ditulis berdasarkan pendekatan MSC *(most significant change)* untuk melihat perubahan yang signifikan pada individu maupun kelompok.

Tulisan-tulisan ini sangat bermanfaat dan berguna bagi siapa pun yang mengembangkan program, baik pemberdayaan maupun advokasi. Membaca tulisan-tulisan di dalam buku ini, membuat siapa pun tersadar bahwa, kesadaran, kekuatan, dan kebersamaan masyarakat, tidak hanya mampu mengatasi permasalahan-permasalahan di masyarakat, tetapi juga memengaruhi kebijakan di tingkat pemerintah.

Akhirnya, sebagai Manajer Program MAMPU BaKTI, saya mengucapkan terima kasih kepada semua mitra Yayasan BaKTI pada Program MAMPU, yang telah bekerja keras untuk keberhasilan program ini. Salah satu keberhasilan yang sangat membanggakan, selain capaian-capaian sesuai target adalah, adanya dokumentasi dalam bentuk tulisan di dalam buku ini, sehingga dapat menjadi pengetahuan dan pembelajaran bagi pihak lain.

Makassar, November 2017

PRAKATA EDITOR

LUSIA PALULUNGAN
M. GHUFRAN H. KORDI K.
M. TAUFAN HIDAYAT
PUSPITA RATNA YANTI

Tulisan-tulisan di dalam buku ini sebagian besar berasal mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Sisanya ditulis oleh staf Program MAMPU Yayasan BaKTI. Sebagian besar tulisan di dalam buku ini telah diupload pada MANIS MAMPU dan dimuat pada BaKTINews. MANIS (Mampu *National Information System*) adalah sebuah sistem informasi berbasis daring (dalam jaringan) yang dikelola Program MAMPU. Sedangkan BaKTINews adalah sebuah majalah yang diterbitkan secara berkala oleh Yayasan BaKTI.

Program MAMPU adalah sebuah program kerjasama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Australia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan. Program MAMPU fokus pada lima tema, yaitu: (1) membuka akses perempuan miskin kepada program perlindungan sosial pemerintah; (2) membuka akses perempuan kepada pekerjaan dan menghapuskan diskriminasi di tempat kerja; (3) meningkatkan kondisi tenaga kerja perempuan ke luar negeri; (4) meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk kesehatan reproduksi yang lebih baik; dan (5) meningkatkan kepemimpinan perempuan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

Pada fase pertama (2013-2016), Program MAMPU Yayasan BaKTI fokus pada memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada perempuan miskin melalui penguatan parlemen, kelompok konstituen, dan masyarakat sipil *(civil society)*. Untuk mencapainya, maka dilakukan penguatan anggota parlemen, dalam hal ini Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) kabupaten/kota di wilayah program, sehingga menjalankan fungsi-fungsinya untuk melahirkan kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender. Pada tingkat kelompok konstituen, dilakukan pengorganisasian dan pemberdayaan agar kelompok konstituen dan perempuan miskin dapat mengakses layanan publik yang berkualitas secara aktif.

Sementara sebagai aktor perubahan, program ini memperkuat jaringan masyarakat sipil untuk menggerakkan advokasi kebijakan untuk mendorong DPRD dan eksekutif membuat kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender.

Program MAMPU Yayasan BaKTI juga memperkuat media massa di daerah mengenai hak asasi manusia (HAM), hak asasi perempuan (HAP), dan perspektif gender. Harapannya media massa membuat pemberitaan yang berperspektif gender dan menjadi bagian dari advokasi kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender.

Yayasan BaKTI bekerja di sembilan kabupaten kota pada lima provinsi, yaitu Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kota Parepare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Ambon (Maluku), Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur), Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat).

Untuk melaksanakan program tersebut, Yayasan BaKTI bermitra dengan tujuh mitra di daerah dan satu Kantor Sub office MAMPU BaKTI di Kota Mataram yang menangani program di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Timur. Lembaga mitra Yayasan BaKTI adalah YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) Parepare, LPP (Lembaga Pemberdayaan Perempuan) Bone, MAUPE (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan) Maros, YKS (Yayasan Kombongan Situru), RPS (Rumpun Perempuan Sulawesi Tenggara) Kendari, YAM (Yayasan Arika Mahina) Ambon, dan PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua) Atambua, Belu.

Sepanjang 2013-2016 Yayasan BaKTI dan mitra di daerah telah melakukan sejumlah kegiatan dengan anggota DPRD, eksekutif, kelompok konstituen, dan media, serta melibatkan berbagai komponen masyarakat. Beberapa capaian dan perubahan terekam di dalam buku ini. Tulisan-tulisan ini ditulis dengan menggunakan pendekatan MSC *(most significant change)* untuk melihat perubahan yang signifikan. Teknik MSC adalah salah satu teknik monitoring dan evaluasi secara kualitatif.

Sebagian besar tulisan ini ditulis oleh CO *(community organizer)* yang langsung berinteraksi dengan kelompok konstiten. Karena itu, sebagian besar tulisan juga memotret perubahan pada individu atau kelompok yang bergabung pada kelompok konstituen.

Perubahan individu dan perubahan kelompok penting dipotret dalam bentuk tulisan, selain karena perubahan individu sulit diukur secara kuantitatif dengan angka-angka. Sementara di tingkat masyarakat, apalagi perempuan dan perempuan miskin sulit sekali diakomodasi dalam laporan resmi atau pemberitaan media. Namun, buku ini juga memuat tulisan perubahan pada level kebijakan, yang menampung aspirasi dari masyarakat.

Buku ini dibagi ke dalam sembilan bagian, di mana-mana bagian-bagian tersebut menujuk pada wilayah program. Masing-masing bagian berisikan lima tulisan, yang telah diseleksi dan dilakukan penyuntingan untuk kepentingan penerbitan buku ini. Pada bagian akhir memuat tulisan mengenai media massa di bawah sub judul Media Massa.

Sampai diterbitkannya buku ini, editor mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersusah payah untuk menuliskan perkembangan dan pencapaian Program MAMPU, baik yang diupload di dalam MANIS MAMPU maupun yang dikirimkan kepada Redaksi BaKTINews. Semoga buku ini dapat menjadi pembelajaran dan bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat dan advokasi kebijakan.

Makassar, November 2017

DAFTAR ISI

SAMBUTAN/**PRAKATA**

[i] Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI
[ii] Program Manager Program MAMPU BaKTI
[iv] Editor

KABUPATEN **BONE**

1 Murni, Aktivis Perempuan dari Desa Wollangi
4 Desa Sadar Musrenbang
8 Membuat Ibu-ibu Percaya Diri
11 Usaha Kelompok untuk Kemandirian Perempuan
15 Ibu Ina, Mengajak Perempuan untuk Maju

KOTA **AMBON**

18 Aryanti, Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi
22 Ika, Menginginkan Perempuan Bersuara
25 Nini, Perempuan Pelopor
28 Membuka Peluang Bagi Masyarakat Kritis
32 Sandra, Menyelamatkan Persalinan

KOTA **MATARAM** & KABUPATEN **LOMBOK TIMUR**

35 Tidak Selalu Menunggu Uluran Tangan Negara
39 Ruang Partisipasi Perempuan Miskin
42 Sry, Kader Pos Yandu Pejuang Anggaran Desa
45 Masiah, Penyintas yang Menebar Semangat Hidup
48 Kolaborasi dalam Advokasi dan Pemberdayaan perempuan

KABUPATEN **TANA TORAJA**

52 Perlindungan Sosial Bagi Warga Miskin
56 Membagi Keterampilan untuk Maju Bersama
59 Masyarakat Miskin Mengakses Dana Desa
62 Dana Desa untuk Pertanian Berkelanjutan
65 Oche, Aktivis Perempuan Tiromanda

KABUPATEN **MAROS**

69 Muli, Gurunya Para Ibu
72 Asa Bunga
75 Bukan Sekadar Omong Doang
78 Rasma, Mengabdi Tanpa Batas
81 Patimang, Menang di Pengadilan

KABUPATEN **BELU**

84 Mama Walde, Berkarya untuk Orang Banyak
86 UU Desa dan Aspirasi Perempuan Desa
89 Perempuan Hebat dari Desa Naekasa
92 Bertani Selaras Alam
96 Maria, Belajar untuk Maju dan Bisa Berbuat

KOTA **PAREPARE**

99 Integrasi Jamkesda-BPJS untuk Warga Miskin
104 Advokasi Beras Sejahtera di Parepare
108 Reses Partisipatif di Parepare
111 Meningkatkan Kelembagaan Urusan Perempuan dan Anak
114 Dari Korban Menjadi Pendamping

KOTA **KENDARI**

118 Reses Kesehatan Reproduksi
121 Srikandi Tingkat RT
124 Kemitraan Berbuah Manis
127 Masyarakat Sadar Kesehatan Reproduksi
130 Peduli Kekerasan terhadap Anak

MEDIA **MASSA**

133 Media, Jurnalis, dan Perempuan
137 Media dan Kebijakan Publik
140 Anggota Parlemen Perempuan dan Media

143 MITRA **PROGRAM MAMPU BaKTI**

Buku ini juga tersedia dalam bentuk e-Book

untuk membaca & men-downloadnya silahkan kunjungi :

www.pintarmampu.bakti.or.id

KABUPATEN

BONE

Mitra :

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone

Murni

Aktivis Perempuan dari Desa Wollangi

Jika pun Murni tidak senang dan tidak nyaman dengan kondisi di desanya, Murni bersama dengan perempuan-perempuan lainnya hanya mengeluh dan membicarakan di antara mereka. Sebagai perempuan yang cukup berpendidikan, Murni tentu bisa melihat hal-hal yang kurang, atau hal-hal tidak adil yang terjadi, namun itu hanya menjadi sesuatu yang tersimpan di kepala sendiri.

Murni baru mengalami perubahan penting dalam kehidupannya sejak bergabung dengan LPP (Lembaga Pemberdayaan Perempuan) Bone, terlebih mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan

Murni adalah perempuan biasa sebagaimana perempuan di desa pada umumnya. Sebagai perempuan desa, aktivitas yang dilakukannya pun tidak jauh dari upaya untuk memenuhi kebutuhan sehar-hari. Murni tidak pernah memikirkan apa-apa yang menjadi masalah perempuan dan masalah-masalah lain di desanya.

Pemberdayaan Perempuan) yang masuk di desanya. LPP Bone dan Program MAMPU memberi Murni banyak pengetahuan dan keterampilan, yang mengubahnya menjadi perempuan yang mampu menggerakkan perempuan dan warga desa.

Murni mampu mengorganisir teman-temannya untuk mengikuti pertemuan-pertemuan kelompok di desanya dan berbicara di berbagai forum untuk menyuarakan isu-isu ketidakadilan yang dialami masyarakat desanya, khususnya perempuan. Dia meyakinkan perempuan-perempuan lain di desanya bahwa, perempuan harus berani berbicara menyampaikan kepada pihak-pihak terkait mengenai persoalan-persoalan perempuan.

Perubahan yang paling dirasakan Murni adalah, mampu mengorganisir teman-teman di dalam Kelompok Konstituen (KK) Marennu dan juga masyarakat di desanya *hearing* ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bone yang membicarakan permasalahan air, karena masyarakat di desanya, yaitu Desa Wollagi Kecamatan Barebbo kekurangan air, terutama pada musim gadu atau musim kemarau.

Murni tinggal di Desa Wollangi, Kecamatan Berebbo, Kabupaten Bone. Dalam keseharian, Murni membuat anyaman bodo-bodo dari daun lontar dengan berbagai macam bentuk, di antaranya tempat tissu, bosara (tempat kue), tempat pensil, dan lain-lain, untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Murni belum berkeluarga, sedangkan kedua orang tuanya sudah meninggal. Murni hanya tamatan SMA (Sekolah Menengah Atas), kini Murni sudah berumur 50 tahun. Sejak bulan Maret 2014 Murni menjadi salah satu warga Desa Wollangi yang mengikuti aktif kegiatan-kegiatan Program MAMPU.

Yayasan BaKTI merupakan mitra LPP Bone untuk pelaksanaan program yang didukung oleh Pemerintah Australia ini. Sebagai program fokus pada pemberdayaan perempuan dan perempuan miskin, program ini diharapkan meningkatkan kemampuan perempuan di desa untuk mengakses layanan publik. Namun, untuk mengakses layanan publik yang ada atau yang disediakan oleh negara, maka perempuan dan perempuan miskin harus mengetahui dan paham mengenai hak-haknya.

Perempuan seperti Murni yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, seharusnya mendapat perhatian dari negara. Murni dan perempuan lainnya tidak meminta untuk dikasihani, tetapi mereka harus mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Karena itu, ketika Murni dan perempuan-perempuan lainnya sadar mengenai hak-hak, maka seharus patut diapresiasi.

Sebelum adanya Program MAMPU di desa Wollangi, Murni sudah biasa ikut kegiatan LPP

Bone, tetapi kalau diminta untuk berbicara, Murni belum berani dan Murni langsung pegang kepalanya, alasanya selalu sakit. Murni selalu bilang *"mapeddi ulukkundi"* (sakit kepalaku). Namun, setelah berproses di kegiatan-kegiatan Program MAMPU, lama-kelamaan Murni memberanikan dirinya untuk berbicara dan akhirnya dia terpilih menjadi ketua KK Marennu yang dibentuk di desanya.

Setelah masyarakat tahu kalau Murni adalah ketua KK Marennu, masyarakat mulai berdatangan untuk mengadu bahwa masyarakat Desa Wollangi kekurangan air, padahal sumber air PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Bone yang dipakai masyarakat Kabupaten Bone berada di desa Wollangi.

Setelah menerima laporan dan masukan masyarakat, Murni serta teman-teman KK Marennu melakukan rapat dengan masyarakat Wollangi untuk mengagendakan *hearing* ke kantor DPRD Kabupaten Bone untuk menyampaikan aspirasi mereka, bahwa petani di Desa Wollangi dan beberapa desa tetangga kekurangan air.

Di DPRD Kabupaten Bone, kelompok konstituen serta masyarakat Desa Wolangi diterima oleh anggota DPRD yaitu A. Sulam Mangampang dan A. Syamsidar selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone dari Partai Gerindra. Adapun tuntutan masyarakat adalah meminta PDAM Bone memberikan aliran air bersih setiap rumah di Desa Wollangi. Adapun janji DPRD Kabupaten Bone kepada KK Marennu dan masyarakat Desa Wollangi yang melakukan *hearing* adalah pihak DPRD Kabupaten Bone akan memanggil pihak PDAM untuk rapat kerja untuk membahas yang menjadi tuntutan KK Marennu dan masyarakat Wollangi.

Karena belum membuahkan hasil maka setelah satu minggu setelah *hearing* di kantor DPRD Kabupaten Bone, Murni serta warga Desa Wollangi melakukan Tudang-sipulung (pertemuan) di mesjid desa bersama Pemerintah Desa, Kecamatan, Polres Bone, DPRD Kabupaten Bone, khususnya Komisi II yaitu A. Idris Alang, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, A. Syamsidar Ishak, anggota DPRD Propinsi Sulawesi Selatan, Syahrir, pada Jumat 27 Februari 2015 untuk membahas sejauh mana persoalan petani, terkait dengan air.

Saat itu KK Marennu dan warga yang hadir mengemukakan kepada berbagai pihak yang hadir dalam tudang-sipulung adalah, permasalahan air minum dan air irigasi yang tidak merata dan tidak mencukupi. Padahal air baku dari PDAM Bone berasal dari Desa Wollangi, namun karena PDAM menutup sumber air tersebut sehingga warga Desa Wollangi kesulitan air pada musim kemarau.

Dalam pertemuan tersebut diusulkan agar Dinas Pertanian menyediakan mesin air, sedangkan PDAM Bone menyediakan solar untuk operasional, namun belum dicapai titik temu. Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bone, A. Idris Alang dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone A. Syamsidar Ishak berjanji untuk selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk agar permasalahan ini dapat diselesaikan.

Bagi Murni dan KK Marennu, mereka akan terus berjuang hingga usaha mereka untuk mendapatkan air mencapai titik terang. Menurut Murni, warga harus melakukan usaha sendiri untuk memperoleh hak-haknya, tidak selalu mengharapkan dari pihak luar. Sebagai seorang perempuan yang tinggal di desa, upaya Murni patut diapresiasi. Dia tidak hanya mampu meyakinkan perempuan, tetapi juga pengambil kebijakan bahwa, perempuan pun dapat berbuat dan berkontribusi jika diberi kesempatan dan ruang. Dengan pendidikan yang relatif lebih baik, Murni mampu menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai potensi untuk melakukan hal-hal yang baik bagi masyarakat. **(A. AGUSWATI)**

Desa Sadar Musrenbang

Masuknya Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Desa Watu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone adalah sebagai langkah awal menuju perubahan yang akan di harapkan mampu membawa angin segar dalam perubahan di masa mendatang.

Salah satu gambaran yang mendasar yang fenomena sebelum Program MAMPU bergulir di Desa ini adalah peran perempuan dalam perencanaan desa masih sangat kecil. Singkat cerita bila dicermati secara seksama, pelaksanaan hak politik masyarakat masih jauh dari harapan. Jika ditelusuri secara mendalam lagi ada kelompok masyarakat yang keterlibatan atau partisipasinya sangat minim, yaitu kelompok miskin dan kelompok rentan (anak-anak, orang yang berkebutuhan khusus, lanjut usia), baik laki-laki maupun perempuan.

Jika dikaji lebih jauh lagi jenis kelamin dari kelompok rentan, maka akan terlihat bahwa partisipasi/keterlibatan perempuan sangat sedikit dibanding dengan laki-laki. Perempuan memiliki peran ganda karena selain bekerja di ranah domestik, perempuan juga berperan di ranah publik, tak terkecuali perempuan memiliki hambatan ganda dalam proses partisipasi karena adanya budaya, kebiasaan dan mekanisme, tata nilai sosial, nilai-nilai dan adat istiadat yang kurang mendukung perempuan.

Fakta membuktikan bahwa yang banyak merasakan dampak kemiskinan adalah perempuan dibanding laki-laki. Kondisi kemiskinan perempuan lebih parah dibanding laki-laki dan kecenderungan kemiskinan lebih parah pada perempuan ketika perempuan menjadi kepala keluarga /rumah tangga (janda). Dengan adanya beban kerja dan stereotif terhadap perempuan, maka cenderung lebih banyak melakukan kerja domestik (reproduktif) yang tidak dibayar *(unpaid work)*, sedangkan laki-laki lebih banyak melakukan kerja-kerja yang menghasilkan uang (produktif).

Dampak lebih jauh adalah kurangnya penghargaan pemerintah pada kerja-kerja reproduktif yang terefleksikan dalam program-program pembangunan. Dari fakta tersebut menunjukkan bahwa memang telah terjadi

ketimpangan gender, yang salah satunya disebabkan oleh kemiskinan struktural. Satu titik krusial dalam konsep ini adalah bahwa kelompok rentan termasuk perempuan dan orang yang berkebutuhan khusus *(difable)* banyak mengalami hambatan.

Kendala mendasar partisipasi masyarakat, khususnya perempuan terutama dalam hal mengajukan aspirasi perempuan tahap perencanaan dan tahap penjaringan aspirasi masyarakat. Proses tersebut tidak dirancang untuk mendengarkan suara perempuan miskin. Bagi perempuan yang notabene tidak berorganisasi dan tidak terbiasa menyuarakan kepentingannya, maka proses ini sulit untuk dimanfaatkan. Langkah strategi untuk keluar dari problem ini adalah salah satunya kerja

jejaring yang harus dikuatkan. Berbagai permasalahan perempuan tidak terangkat, karena hal ini berhubungan dengan luputnya memasukkan analisis persoalan perempuan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan atau RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).

Untuk memastikan agar kebutuhan dan kepentingan perempuan benar-benar masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa maupun daerah maka perlu diadakan program-program peningkatan kapasitas bagi perempuan dan organisasi perempuan beserta adanya regulasi/kebijakan yang jelas yang mengatur keterwakilan perempuan yang ada di dalamnya, agar agenda kebutuhan perempuan dapat terakomodir.

Kendala mendasar partisipasi masyarakat, khususnya perempuan terutama dalam hal mengajukan aspirasi perempuan tahap perencanaan dan tahap penjaringan aspirasi masyarakat.

Dan yang lebih penting lagi agar kelompok perempuan dan perempuan miskin mampu memasukkan kepentingan gender dalam agenda proses perencanaan desa maupun daerah. Namun terdapat kendala partisipasi khususnya perempuan di Kabupaten Bone, yang sering dimaknai oleh berbagai pihak bahwa "adanya ketidakpuasan masyarakat khususnya perempuan terhadap proses partisipasi itu sendiri, semisal Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) mulai dari Musrenbang desa/kelurahan sampai Musrenbang kabupaten, dianggap hanya sekadar formalitas saja dan menjadi partisipasi semu (manipulasi). Alasanya masyarakat khususnya perempuan dimintai mengajukan usulan namun tidak berakhir dengan disetujuinya usulan mereka. Usulan yang sama dilakukan selama bertahun-tahun, namun tetap saja tidak diakomodir oleh pemerintah.

Kehadiran Program MAMPU dengan berbagai kegiatan yang dikemas sedemikian rupa menjadikan baik masyarakat miskin khususnya perempuan, disabilitas, anak yang rentan maupun kelompok rentan yang lain serta tokoh kunci yang dinilai bisa menjadi agen perubahan mulai menjadi perhatian tersendiri yang diprioritaskan menjadi sasaran penerima manfaat dari program ini, sehingga melalui pembentukan Kelompok Konstituen (KK) pada

30 Maret 2014, dengan nama yang di sepakati adalah KK Sipammase-Mase, dimana kelompok ini dijadikan sebagai wadah untuk membicarakan atau membahas permasalahan yang ada baik permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok maupun permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggal antar kelompok yang ada.

Hal yang berbeda di lakukan oleh Kelompok Konstituen Sipammase-mase Desa Watu, adalah para penggerak atau pionir yang ada dalam kelompok sangat membuka diri dalam merespon permasalahan yang ada di desa. Berbekal dari pengalaman yang di dapatkan dari berbagai pelatihan ataupun diskusi-diskusi yang dilakukan bersama dengan tim LPP Bone diaplikasikan di dalam kelompoknya maupun di desanya termasuk hasil yang di dapat langsung di *sharing* ke kepala desa.

Dengan melihat hasil kerja kerja positif yang dilakukan kelompok ini menjadikan Kepala Desa Watu (A Nurhidayah) banyak *sharing* dengan anggota kelompok, diskusi-diskusi lepas yang dilakukan di berbagai titik pertemuan dengan KK secara non formal menjadikan kelompok ini mendapatkan posisi tawar yang luar bisa dalam proses-proses pengambilan kebijakan yang di lakukan di desa, semisal ketika ada permasalahan seperti Rastra (Beras sejahtera)—dulu Raskin (Beras miskin)—dan permasalahan lain di isu perlindungan sosial lain di nilai bermasalah maka untuk merumuskan itu dipercayakan kepada anggota kelompok konstituen ini (Rosdiana, Akbar Tanjung, Ahmad Tawakkal, Sulaeman) dan yang lainnya.

Berbekal dari kepercayaan inilah sehingga saat pelaksanaan "*updating* data SDD di Desa Watu" anggota KK ini yang dipercayakan untuk melakukannya. Kesempatan ini hal yang menarik yang dilakukan oleh Kelompok bahwa hasil dari pendataan yang dilakukan bukan hanya sekedar data mentah saja atau hanya sekedar memenuhi kebutuhan program dari *updating* data tetapi hasilnya ini diolah bersama menjadi data bagi kelompok untuk melakukan advokasi selanjutnya baik di level desa maupun di level kabupaten.

Dari data yang di hasilkan oleh KK ini sejumlah data yang terus dikuatkan khusus terkait 5 tema MAMPU dalam isu Perlindungan Sosial, Kesehatan Reproduksi, dan Kekerasan terhadap perempuan dan isu lain yang terkait dengan isu-isu kemiskinan. Dengan kerja-kerja KK yang dilakukan selama ini satu kepercayaan lagi yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan kepercayaan kepada KK ini untuk menjadi bagian dari penyelenggara Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) Desa pada tahun 2015.

Artinya, pengurus KK adalah merupakan orang pilihan yang dipercaya untuk mengemas kegiatan Musrenbang Desa ini mulai dari Musrenbang Dusun sampai Musrenbang Desa, menjadi fasilitator desa, menjadi tim penyusun RKP Desa, dan delegasi desa. Seiring dengan itu karena dengan melihat partisipasi perempuan khususnya perempuan miskin dan kelompok rentan yang cukup baik dalam setiap pertemuan desa, sehingga desa ini menjadi Piloting Desa Sadar Musrenbang tahun 2016 untuk tahun anggaran 2017. Hal yang mendasar dari perubahan yang terjadi di Desa Watu "Kelompok Konstituen Sipammase-Mase" ini adalah sebelum Program MAMPU masuk, sangat minim kehadiran perempuan khususnya perempuan miskin di forum pertemuan, partisipasi perempuan di organisasi desa juga sangat minim. Namun setelah Program MAMPU masuk perubahannya sangat signifikan sekali, kehadiran perempuan di musrenbang desa melebihi 30%, adanya perempuan di tim penyusun RKPDesa, delegasi desa, dan kelembagaan desa dan organisasi desa. **(A. FATMAWATI SULOLIPU)**

Membuat Ibu-ibu **Percaya Diri**

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone adalah sebuah organisasi yang mengupayakan perempuan berdaya, sehingga mampu berkontribusi pada kemajuan perempuan, maupun dapat memengaruhi kebijakan. LPP meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai kegiatan, baik secara formal maupun non formal.

Untuk itu, LPP didukung oleh berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Salah satu program yang dapat disebut sebagai program untuk penguatan perempuan adalah Program MAMPU (Kesetaraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). LPP Bone bekerjasama dengan Yayasan BaKTI dan didukung oleh Pemerintah Australia, dalam pelaksanaan program ini.

Salah satu yang terlihat dalam program ini adalah "membuat ibu-ibu percaya diri". Terlihat sepele, namun sangat penting. Seorang ibu, sebutlah ibu Yaya yang berani berbicara di depan orang banyak, menyampaikan usulan, maupun permasalahan di desanya adalah hal yang luar biasa. Pasalnya, bebricara di depan banyak orang yang disebut sebagai "rapat" adalah forum atau kegiatan yang elitis bagi masyarakat desa, apalagi perempuan.

Ibu Yaya adalah seorang ibu rumah tangga muda yang tinggal di Desa Parippung Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Di umurnya yang baru 31 tahun, relatif masih muda, tapi sudah mempunyai dua anak perempuan. Sejak bulan Maret tahun 2014, ibu Yaya adalah satu dari sejumlah perempuan yang mau bergabung untuk Program MAMPU.

Program yang fokus pada lima isu atau lima tema, yaitu: (1) kekerasan terhadap perempuan; (2) buruh migran; (3) perlindungan sosial; (4) akses perempuan terhadap lapangan kerja; dan (5) kesehatan Reproduksi. Lima tema ini diperkenalkan kepada perempuan-perempuan, sehingga mereka dapat memahami isu-isu terkait perempuan dan anak.

Program ini juga terfokus pada bagaimana perempuan bisa terlibat dalam proses perencanaan di desa, paling tidak bisa menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan perempuan, karena selama ini yang terlibat dalam musyawarah di desa ataupun dusun hanya laki-laki. Sedangkan perempuan hanya di belakang, hanya dijadikan seksi komsumsi yang menyediakan konsumsi untuk peserta musyawarah desa.

Program ini memfasilitasi pembentukan organisasi komunitas yang disebut sebagai kelompok konstituen (KK). Nama KK digunakan untuk mempertegas bahwa kelompok ini mempunyai wakil rakyat yang berada di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Namun, sebagai organisasi komunitas, KK dipersiapkan tidak hanya untuk berhubungan dengan wakil rakyat. KK dipersiapkan untuk memperkuat perempuan di komunitas untuk mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara. KK harus mampu mendorong perempuan miskin untuk menjadi bagian dalam perjuangan bersama, sehingga organisasi tersebut tidak menjadi organisasi elit.

Pada awal-awal pembentukan KK, banyak sekali terlihat perempuan gugup untuk menyampaikan pendapatnya. Ibu Yaya termasuk salah satu yang tidak berani berbicara di depan umum itu. Pada saat pertama kali mengikuti pertemuan jangankan dia berani berbicara, perkenalan pun dia tidak berani karena dia merasa urusan untuk berbicara didepan itu bukan tugas kaum perempuan melainkan itu tugas kaum laki-laki dan yang harus berpendapat hanyalah laki-laki, perempuan hanya mengikut apa yang menjadi keputusan kaum laki-laki.

Menurut ibu Yaya, tugas perempuan hanya didapur dan mengurusi anak anak mereka. "Jadi waktu pertama saya disuruh berdiri dan memperkenalkan diri saya merasa berdebar-debar, apa yang harus saya ucapkan rasanya berat sekali. Tetapi setelah saya berkali-kali mengikuti pertemuan, mulai dari pertemuan di desa, pertemuan tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten alhamdulillah saya sudah bisa berani berbicara di depan umum."

Keberanian ibu Yaya bukanlah mudah, namun harus didukung dan dilatih. Tenaga pendamping dari LPP selalu memberi masukan, melatih, sekaligus menyampaikan trik-trik agar ibu-ibu mau berbicara di depan umum.

Ibu Yaya adalah contoh seorang perempuan berpendidikan rendah yang berani tampil di depan umum. Namun, itu harus didukung, didorong, dan diberi kesempatan untuk itu. Tentu pelatihan untuk peningkatan kapasitasnnya harus dilakukan dan membutuhkan waktu.

Selain ibu Yaya, nama lain yang bisa disebut adalah ibu Eda, nama panggilan untuk Nurhaedah. Ibu Eda tinggal di Kelurahan Cellu, Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone. Perempuan yang telah mendapat gelar S.Pd (Sarjana Pendidikan) dan telah berusia 44 tahun ini adalah, seorang ibu rumah tangga, namun juga bekerja di kantor kelurahan tempat tinggalnya sebagai tenaga honorer.

Ibu Eda adalah contoh perempuan yang telah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi (PT), namun dirinya tidak yakin untuk menjadi seorang wakil rakyat. Ibu Eda merasa dirinya tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang cukup bila menjadi seorang wakil rakyat.

Namun, Program MAMPU memberi keyakinan kepada Ibu Eda bahwa, perempuan mempunyai kemampuan dan kekuatan, tentu itu harus ditingkatkan. Ibu Eda bergabung di KK untuk mengorganisir perempuan-perempuan yang ada di sekitarnya. Dengan pendidikan yang tinggi, dan merupakan seorang pegawai honorer di kantor kelurahan, Ibu Eda dapat menggerakkan perempuan di keluruhan setempat.

Ibu Eda juga mulai mengikuti kegiatan-

kegiatan terkait peningkatan kapasitas untuk dapat mencalonkan diri menjadi seorang wakil rakyat. Tentu Ibu Eda membutuhkan waktu untuk memahami dan mengenal medan politik yang dikuasai oleh laki-laki. Namun, setidaknya Ibu Eda sudah yakin bahwa perempuan harus berani mengambil peran dalam politik untuk dapat memengaruhi kebijakan.

Berikut penuturan Ibu Eda, "sejak saya mulai mengikuti program (kegiatan) di LPP Bone di kelurahan, saya mengalami banyak perubahan yang positif dalam kehidupan saya, dan di antara banyak perubahan ini, perubahan yang paling berkesan adalah saya akhirnya dapat memimpin rapat pertemuan-pertemuan pada kelompok yang telah kami bentuk bersama, yang kami beri dengan nama KK Kelurahan Bajoe."

Ibu Eda hendak menularkan apa yang diperolehnya kepada ibu-ibu yang lain. Menurutnya, diperlukan penguatan agar dapat membuat ibu-ibu percaya diri. Jika ibu-ibu mulai percaya diri, maka mereka akan menyampaikan berbagai permasalahan yang dialaminya pada rapat-rapat atau pertemuan dengan pengambil kebijakan. Bagi ibu Eda, selama ini perempuan tidak mempunyai peran, karena selain tidak diberi ruang, kapasitas perempuan juga belum terlihat. Namun, untuk terlihat dan berperan, perempuan juga harus berani. **(A. AGUSWATI & MART INDAH)**

Usaha Kelompok untuk **Kemandirian Perempuan**

Perempuan yang mandiri dengan mengembangkan usaha secara kecil-kecilan jumlahnya cukup banyak. Mereka berada di berbagai tempat, di rumah, pasar-pasar tradisional, di pinggir jalan hingga super market modern. Namun perempuan pengusaha ini sering tidak dihitung dan tidak dianggap.

Selain karena dianggap sebagai bukan pencari nafkah utama, hanya sebagai pencari nafkah tambahan, perempuan juga kadang dianggap tidak mampu bersaing dengan laki-laki. Karenanya, jika pemerintah atau lembaga tertentu menyediakan dana untuk mendorong usaha kecil, maka hampir tidak ada peruntukannya untuk usaha-usaha yang dilakoni oleh perempuan.

Kabupaten Bone

Pada awal perjalanan sebuah usaha untuk perbaikan ekonomi masyarakat, banyak kendala sehingga butuh perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah.

Padahal tidak sedikit perempuan yang merintis usaha dari nol, merangkak dari bawah, dan terus bertahan. Perempuan juga melibatkan perempuan yang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh ibu Nurfaidah.

Berjalan ke arah timur kota Watampone tepatnya di kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, tepatnya Lingkungan Benteng, di situlah kita akan menemukan kelompok usaha perempuan Mandiri yang dirintis oleh Ibu Idah, nama panggilan ibu Nurfaidah. Kelompok yang diberi nama "Cantika" yang anggotanya perempuan, dengan rencana kegiatannya pengolahan ikan PEDA (dempo), yang sangat terkenal di Kota Watampone. Anggota kelompok ini, sebagian adalah Kelompok Konstituen (KK) Biru Laut, yaitu ibu Nurfaidah dengan sembilan anggotanya yang lain.

Menengok ke belakang sebelum diintervensi oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), ibu Nurfaidah adalah seorang pekerja honorer pada Dinas Perikanan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2010. Setelah restrukturisasi Dinas Perikanan, ibu Nurfaidah diminta masuk di BPK (Badan Penyuluh Kecamatan) di Tanete Riattang Timur pada tahun 2011.

Pada saat program MAMPU mengintervensi kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur pada Maret 2014, ibu Nurfaidah pun mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh LPP Bone, dan mulai saat itu Ibu Idah menjadi anggota kelompok konstituen yang aktif mengikuti setiap kegiatan Program MAMPU, baik yang dilaksanakan di kelurahan Lonrae maupun di kota Watampone.

Sebelumnya hanya menjadi penyuluh lapangan, namun setelah beberapa kali mengikuti Program MAMPU, ibu Idah berkeinginan untuk memajukan kaumnya dengan usaha kelompok sesuai dengan potensi daerahnya sekaligus menciptakan lapangan kerja.

Sebelum terbentuk kelompok usaha ikan PEDA ini, ibu Idah sudah mempunyai usaha kelompok yang jumlah anggotanya juga sepuluh orang termasuk ibu Nurfaidah yang diberi nama Ayu Karya dengan kegiatan usahanya adalah membuat Ikan ASAP yang dipasarkan di wilayah Watampone, khususnya pasar Taccipi. Adapun kelompok usaha Ayu Karya ini sudah mendapat bantuan dari Dinas Perikanan yang berbentuk barang yaitu sebuah *cool box* atau boks pendingin yang mempunyai kapasitas penampungan ikan mentah sebanyak 100 kg untuk mengawetkan ikan, agar tetap segar dan menunjang mutu produksi ikan ASAP yang akan dipasarkan. Usaha ikan asap ini juga melibatkan anggota laki-laki sebagai pekerjaan tambahan.

Saat ini ibu Idah sangat aktif melakukan kegiatan pendampingan bantuan dari Dinas Koperasi dan Dinas Perikanan, teruatama untuk usaha kelompok yang baru saja dibentuknya pada tanggal 10 Februari 2015, yang didaftar di kantor kelurahan, kemudian didaftar di BP4K (Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan ,dan Kehutanan) sebagai data base guna mengakses bantuan usaha mikro atau industri rumah tangga, seperti halnya kelompok Lonrae Plus yang usahanya membuat

ikan abon dan sudah menerima bantuan pada tahun ini dari Dinas Koperasi berupa dana tunai dan Dinas Perikanan berupa bantuan peralatan untuk membuat abon ikan.

Kelompok usaha ini juga diketuai oleh Kelompok Konstituen Biru laut. Adapun tujuan dari usaha kelompok perempuan yang dibentuknya adalah untuk membantu perekenomian keluarga dengan prinsip bagi hasil. Ibu Idah juga merupakan tulang punggung keluarga karena ayah atau orang tuanya sudah tidak bisa bekerja lagi. Walau hanya seorang diri di usianya yang ke-35 tahun, ibu Idah sangat bersemangat mencari nafkah untuk keluarga.

Adapun harapannya adalah, dari kelompok usaha kaumnya, agar pemerintah terkait lebih memperhatikan kelompok yang baru dibentuknya, sehingga bisa melahirkan kelompok-kelompok kerja yang produktif dan bisa membantu perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Dusun Benteng, Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riattang Timur, tempat tinggal ibu Idah.

Semangat pantang menyerah ibu Idah dan kelompoknya merupakan sesuatu yang membanggakan. Sebagai motor penggerak, ibu Idah diakui sebagai perempuan yang kuat dan menjadi panutan bagi ibu-ibu. Harapannya segala daya usahanya menjadi motor penggerak bagi ibu-ibu yang lainnya untuk melakukan hal yang serupa, sehingga dapat berkontribusi pada

Semangat pantang menyerah ibu Idah dan kelompoknya merupakan sesuatu yang membanggakan. Sebagai motor penggerak, ibu Idah diakui sebagai perempuan yang kuat dan menjadi panutan bagi ibu-ibu.

ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pada awal perjalanan sebuah usaha untuk perbaikan ekonomi masyarakat, banyak kendala sehingga butuh perjuangan dan pengorbanan yang tidak mudah. Namun, ibu Idah dan kelompoknya telah mempunyai tekad untuk kemajuan bersama. Bagi ibu Idah, perempuan pun dapat membangun usaha untuk memperkuat ekonomi keluarga, asalkan dengan kerja keras dan yakin.

Apalagi saat ini, dukungan untuk penguatan ekonomi keluarga dengan mendukung perempuan sudah semakin kuat. Program MAMPU adalah salah satu yang mengupayakan pemberdayaan perempuan, termasuk perempuan-perempuan yang ingin fokus pada usaha kecil. KK yang telah dibentuk menjadi salah satu organisasi yang dapat mengorganisasi perempuan dan masyarakat untuk memperoleh layanan publik, di antaranya bantuan modal untuk usaha-usaha perempuan.

Menurut ibu Idah, perempuan sering tidak dihitung dalam setiap pemberian bantuan modal untuk usaha kecil, karena perempuan tidak mempunyai posisi. Di samping itu, tidak ada organisasi perempuan yang dapat menyampaikan kepada pengambil kebijakan. Sementara pengambil kebijakan biasanya tidak turun ke bawah atau tidak melihat langsung usaha-usaha yang dibangun oleh perempuan.

Dengan demikian, maka hanya usaha-usaha laki-laki yang mendapatkan bantuan modal. Padahal ada juga perempuan, termasuk ibu Idah, yang menjadi tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah utama. Karena itu, menurut ibu Idah, perempuan-perempuan harus terlibat dalam organisasi dan mengikuti kegiatan-kegiatan, sehingga dapat menyampaikan kepada pemerintah tentang masalah dan kebutuhan perempuan. Perempuan juga harus mencari tahu program atau layanan yang disediakan pemerintah dan mengetahui syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan atau layanan itu. Jadi perempuan harus aktif, tidak hanya menunggu. **(ABDUL RASYID)**.

Ibu Ina

Mengajak Perempuan untuk Maju

Siang itu matahari tengah bertahta di singgasananya, tapi beruntung saat ini di Kecamatan Awangpone sudah memasuki musin hujan, jadi perjalanan kami rada diguyur gerimis. Kami ke bagian utara Kota Watampone tepatnya di Dusun Cempalagi, Desa Mallari, Kecamatan Awangpone. Di sanalah tempat tinggal Ibu Sabe'ina atau akrab dipanggil dengan ibu Ina.

Ibu Ina adalah sosok perempuan yang gigih, tangguh dan ulet sebagai ibu rumah tangga dengan 2 orang putranya, yang sulung baru tamat SD (Sekolah Dasar) dan tidak sempat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan yang bungsu masih duduk di bangku SD. Suaminya ibu Ina yang bekerja sebagai nelayan pencari ikan dengan bagan di negeri jiran, tepatnya di sabah Malaysia. Suami ibu Ina pulangnya kadang enam bulan sampai satu tahun, atau dua tahun sekali dan penghasilannya hanya selalu pas-pasan untuk kebutuhan keluarga saat ini.

Dengan kondisi seperti itulah, dan kebutuhan tuntutan hidup itulah, akhirnya ibu Ina meluangkan waktunya untuk membantu suaminya dalam menafkahi keluarganya, dengan bekerja mengikat rumput laut. Pekerjaan ini adalah merupakan pekerjaan yang mayoritas di lakukan oleh para ibu-ibu atau perempuan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap seperti ibu Ina, yakni menjadi buruh tani pengikat rumput laut membantu para petani rumput laut yang ada di lingkungan tempat tinggalnya, pada saat petani rumput laut akan menurunkan bibit atau menanam bibit ke laut, dengan bayaran upah yang hanya kisaran Rp 2.500 per dua belas meter tali pengikat. Para ibu melakoni rutinitas ini termasuk ibu Ina, dengan senang dan selalu semangat.

Sebelum adanya Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Desa Mallari, iu Ina sudah pernah mengikuti kegiatan LPP (Lembaga Permberdayaan Perempuan) Bone di desanya yang merupakan peserta dalam kegiatan, diskusi dan pelatihan.

Berangkat dari sinilah sehingga pada saat program MAMPU bergulir di Desa Mallari tepatnya sekitar bulan Maret 2014, kami melaksanakan kegiatan Pembentukan Kelompok Konstituen (KK) di desa Mallari. Ibu Ina pun kami libatkan sebagai peserta dan memasukkannya sebagai pengurus di bagian humas di kelompok konstituennya yaitu kelompok "Attuddukengnge", dengan harapan ibu Ina mampu membangun spirit bagi teman-teman atau tetangganya untuk menjadikan program MAMPU betul-betul memberikan dampak perubahan yang signifikan kepada masyarakat desa Mallari, minimal dusun ibu Ina yaitu dusun cempalagi.

Dengan bergabung ke dalam kelompok konstituen pada Program MAMPU, ibu Ina semakin aktif mengikuti setiap kegiatan yang dilakukan oleh LPP Bone baik di desa Mallari maupun yang dilaksanakan di kantor LPP seperti kegiatan tanggal 30 November 2014 yaitu Baseline Data oleh tim Peneliti dari BaKTI ataupun seperti aksi kolektif. Dengan adanya kegiatan yang sering diikuti, maka ibu Ina menjadi lebih terbuka wawasannya dan lebih mengetahui program-program pemerintah yang harus dikawal dan perlu diketahui oleh masyarakat sekitarnya.

Pada saat ini ibu Ina sangat gencar mengajak para perempuan dekat rumahnya untuk melakukan sesuatu perubahan dalam memperbaiki ekonomi keluarga mereka seperti usaha simpan pinjam di CU *(Credit Union)* Pammase Bone yang memberikan bunga ringan, proses mudah dan cepat, bagi yang membutuhkan modal usaha kecil seperti kios-kios jualan campuran, kerajinan tangan (membuat kasur), pembeli bibit rumput laut, pupuk, dan sebagainya.

Credit Union ini awalnya merupakan koperasi simpan pinjam yang dikelola oleh LPP Bone yang dikhususkan untuk buruh migran, namun belakangan dikembangkan ke nelayan dan petani serta usaha-usaha mikro yang ada dimasyarakat pedesaan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Walaupun kehadiran CU Pammase Bone di desa Mallari masih dalam skala kecil, tapi mampu memberikan solusi bagi sebahagian keperluan masyarakat di Dusun Cempalagi tempat tinggal ibu Ina. Kepedulian ibu Ina dengan lingkungan tempat tinggalnya sangat mendorong ibu-ibu yang lain untuk melakukan hal yang sama dengan semboyan maju perempuan.

Menurut ibu Ina, jika masyarakat perlu dana untuk usaha kecil sangat sulit. Kalau ingin memperoleh dana di bank prosedurnya rumit, apalagi masyarakat biasanya butuh dana dalam jumlah kecil untuk usaha-usaha yang sangat

kecil. Karena itu, ketika ada CU Pammase Bone, ibu Ina ikut mengajak warga untuk pinjam. Ibu Ina tidak mau tetangganya meminjam uang yang bunganya sangat tinggi sehingga memberatkan warga.

Melalui intervensi Program MAMPU, maka masyarakat Desa Mallari terutama Kelompok Konstituen sudah mengalami perubahan signifikan teruatama yang terjadi pada ibu Ina, yakni pada masa-masa sebelum ada Program MAMPU masuk di Desa Mallari, ibu Ina tidak pernah dilibatkan dalam pertemuan desa apalagi di kecamatan.

Namun tahun ini tepatnya pada tanggal 27 November 2014 ibu Ina dan kelompoknya sudah ikut terlibat dan mengikuti Musrenbang di desa, dan kemudian mengikuti pertemuan di kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2014 di kecamatan Awangpone. Dalam pertemuan tingkat kecamatan tersebut yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan mengenai program Bone Sehat yakni SPMDS (Sosialisasi Penyuluhan Menuju Desa Sehat), kelompok ibu Ina mengusulkan adanya jamban di setiap rumah warga baik itu berupa bantuan dari pemerintah, swadaya, maupun mandiri.

Adapun tujuan usulan tersebut adalah untuk mencegah timbulnya berbagai macam penyakit yang tidak diinginkan akibat dari lingkungan yang kurang sehat. Usulan tersebut dikawal oleh ibu Ina bersama 9 orang rekannya mewakili Desa Mallari untuk pertama kalinya terlibat dalam pertemuan di kecamatan. Ibu Ina hanya memegang prinsip, katanya "kalau lingkungan/desa kita maju, insya Allah kita juga ikut maju", karena kita juga sudah ada di dalannya.

Penulis bangga pada prinsipnya ibu Ina bukan kerja kerasnya, karena banyak orang yang bisa melakukannya, sementara prinsipnya tidak semua orang bisa berpikir demikian, hanya orang-orang bijak dan berjiwa bersih saja yang dapat mengatakannya. Kita hanya berharap semoga lebih banyak lagi yang muncul orang-orang seperti ibu Ina, sehingga perubahan-perubahan signifikan di masyarakat lebih banyak lagi yang terjadi. Simpul cerita bahwa Ibu Ina sudah melakukan hal-hal baik untuk perbaikan ekonomi dan kesehatan dalam kehidupan masyarakat ke depan, bisa menjadi perwakilan bagi desanya dalam pertemuan dan dipercaya oleh kepala desanya.

Apa yang dilakukan oleh ibu Ina adalah hal yang tidak mudah bagi seorang perempuan. Bagaimana pun, ibu Ina juga mempunyai suami yang mencari nafkah. Namun, kegigihan ibu Ina dan mengajak perempuan yang lain untuk maju, maka ibu Ina menjadi contoh dan teladan bagi perempuan-perempuan yang lain.

Ibu Ina adalah contoh perempuan desa yang mau berubah dan tidak merenungi nasibnya. Ia mau maju dan mengajak tetangganya untuk maju bersama. Sebagai perempuan desa dan pekerja keras, ibu Ina tidak muluk-muluk, dia hanya ingin dia dan masyarakat desa maju dan sehat. **(ABDUL RASYID)**

KOTA

AMBON

Mitra :

Yayasan Arika Mahina

Aryanti

Perempuan Peduli Kesehatan Reproduksi

Memperkuat perempuan diperlukan, karena dengan pengetahuan dan kesadaran, mereka akan berupaya untuk mencari tahu untuk mengakses layanan-layanan pemerintah.

Kota Ambon

Sejak kehadiran Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Kota Ambon pada tahun 2013, dan mulai intens pertemuan dan penguatan bagi masyarakat pada negeri/desa dan kelurahan, maka hal-hal positif berupa inisiatif individu dan kelompok terlihat cukup menonjol.

Program MAMPU mengusung lima tema atau lima isu besar yakni: perlindungan sosial, kesehatan reproduksi, kekerasan terhadap perempuan, buruh migran, dan akses terhadap pekerjaan. Namun untuk Kota Ambon sendiri, Yayasan Arika Mahina sebagai Yayasan BaKTI pada Program MAMPU lebih fokus pada tiga isu besar yakni: kekerasan terhadap perempuan dan anak, kesehatan reproduksi, dan perlindungan sosial.

Terkait tema kesehatan reproduksi, ibu Aryanti adalah salah satu sosok perempuan yang berperan penting dalam kegiatan dan advokasi untuk pemenuhan layanan dalam kesehatan reproduksi.

Aryanti adalah seorang ibu rumah tangga yang berdomisili pada RT/RW 011/03 Desa Nania Kampung Baru. Aryanti juga dikenal pada lingkungannya sebagai seorang kader posyandu, anggota Divisi Humas dari KK (Kelompok Konstituen) Waipipit, Pengurus PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), dan juga terlibat terlibat dalam organisasi majelis taklim pada lingkungan tempat tinggalnya.

Keikutsertaan Aryanti dalam KK yang terkait dengan Program MAMPU telah banyak dirasakan manfaatnya, baik bagi dirinya sendiri maupun pada lingkungan tempat di mana ia berdomisi. Salah satu bukti nyata dari keberhasilan KK yang ada pada Desa Nania adalah terkait dengan advokasi untuk meningkatkan pelayanan pada Puskesmas Desa Nania yang sebelumnya tidak terlalu memuaskan bagi masyarakat. Kini telah semakin baik dari sisi pelayanan bagi masyarakat pada Desa Nania, Waiheru, dan Hunuth.

Termotivasi dengan hal ini maka dalam sebuah kunjungan pada tanggal 8 maret 2016 untuk pemeriksaan kesehatan yang beliau lakukan, pada Puskesmas Nania, ibu Aryanti mendapatkan informasi bahwa ada pemeriksaan IVA (inspeksi visual dengan asam asetat) gratis bagi perempuan usia subur.

Dengan pengetahuan dan penguatan yang selama ini didapatkan dari Progaram MAMPU, apalagi ia melihat dan mengetahui perempuan miskin pada lingkungan tempat tinggalnya, Aryanti meminta bertemu dengan kepala Puskesmas Desa Nania. Hasil pembicaraan mereka ternyata program ini telah ada sejak tahun lalu, namun belum ada ibu-ibu yang melakukan pemeriksaan. Dengan berbekal infomasi ini maka belaiu menyanggupi untuk mendatangkan ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA.

Upaya beliau untuk menyakinkan ibu-ibu datang melakukan pemeriksaan IVA pada puskesmas Desa Nania tidak semudah yang dibayangkan, karena terbentur dengan keyakainan agama dan budaya pada lingkungan tempat tinggalnya, yang kebanyakan masih menaggap hal ini sebagai sesuatu yang dianggap tabu, dan hanya merupakan urusan suami istri, dan tidak boleh orang lain melihat itu.

Sempat dalam sebuah perjumpaan dengan keluarga untuk meminta istri dari salah satu kebarabatnya untuk melakukan pemeriksaan IVA, terjadi perdebatan yang cukup sengit antara pemahaman agama yang diyakini dengan kesehatan reproduksi perempuan yang juga penting bagi seorang perempuan. Suami sang istri mengatakan bahwa ini merupakan surga saya dan tidak boleh ada orang lain yang

boleh melihat, dan bahkan menyentuhnya, selain saya suaminya. Apalagi pemeriksaan pada puskesmas yang banyak orang juga hadir di sana.

Namun ibu Aryanti tidak lekas putus asa karena ada penolakan ini, dengan berbagai upaya dan pendekatan akhirnya beliau berhasil meyakinkan 12 orang ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA pada puskesmas di Desa Nania.

Tepatnya, Rabu 16 Maret 2016, sebuah tindakan nyata telah dilakukan oleh Ibu Aryati dengan mendampingi sebanyak 12 ibu-ibu untuk melakukan pemeriksaan IVA di Puskesmas Nania. Menurut petugas kesehatan pada Desa Nania, ini merupakan pemeriksaan IVA terbanyak dan membuat mereka sampai kewalahan.

Setelah ibu-ibu melakukan pemeriksaan, ternyata 12 orang ini kembali dan menceritakan bagi ibu ibu yang lain, yang tadinya ada keraguan untuk melakukan pemeriksaan dan hasilnya ada 7 orang tambahan ibu–ibu yang telah melakukan pemeriksaan IVA pada tanggal 18 maret 2016.

Upaya ibu Aryanti untuk terus melihat kepentingan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya melalui pemeriksaan IVA terus dilakukan, salah satunya melalui kegiatan mentoring dan TA pada tanggal

Upaya ibu Aryanti untuk terus melihat kepentingan perempuan terkait dengan kesehatan reproduksinya melalui pemeriksaan IVA terus dilakukan, salah satunya melalui kegiatan mentoring dan TA.

20 April 2016 yang berlangsung pada salah satu rumah warga, di mana pada saat kegiatan tersebuat beliau berperan sebagai fasiliator untuk tematik HAM (Hak Asasi Manusia) dan HAP (Hak Asasi Perempuan) dan menyampaikan informasi ini juga bagi ibu-ibu pengurus KK Waipipit dan juga perempuan miskin yang hadir sebanyak 13 orang hasilnya ada komitmen bersama untuk menyapaikan informasi ini bagi lingkungan tempat tinggal mereka melalui pertemuan – pertemuan ibadah.

Terlihat dari cerita ini bahwa perempuan harus dibekali dengan berbagai pengetahuan dan informasi terkait dengan layanan kesehatan, layanan publik dan perlindungan sosial agar mereka bisa mengakses hal ini. Program MAMPU sendiri melalui berbagai penguatan dan peningkatan kapasitas tentang berbagai tematik telah memberikan pengetahuan sebagai modal untuk melakukan advoksi dan upaya penyadaran perempuan miskin dan masyarakat umun untuk bisa mengaskes hal ini baik yang dilakukan secara langsung maupun melalui pendampingan oleh KK yang ada pada 15 negeri/desa dan kelurahan pada lima kecamatan di Kota Ambon.

Memperkuat perempuan diperlukan, karena dengan pengetahuan dan kesadaran, mereka akan berupaya untuk mencari tahu untuk mengakses layanan-layanan pemerintah. Selama ini banyak hal yang tidak diketahui oleh perempuan, apalagi perempuan miskin, sehingga mereka tidak berupaya untuk memperoleh hak-haknya.

Apa yang dilakukan oleh Aryanti, bagi sebagian orang, mungkin kecil dan sangat sederhana. Namun, kita tidak sadar bahwa, kesadaran Aryanti dan upaya yang dilakukannya telah mengubah cara pandang ibu-ibu mengenai kesehatan reproduksi, yang selama ini dianggap tabu. Apa yang dilakukan Aryanti akan terus menyebar kepada perempuan-perempuan yang lain, sehingga makin banyak perempuan terselamatkan oleh kesadaran dan keikhlasannya. **(YAN WEMAY)**

Ika

Menginginkan Perempuan **Bersuara**

> Pola pikir Perempuan harus diubah. Perempuan juga harus didukung supaya bisa mengubah dirinya, supaya tidak selalu Menjadi korban kekerasan.

Penulis terkejut mendengar penjelasan dari perempuan ini, mengenai permasalahan sosial, terutama kekerasan terhadap perempuan. Dengan bahasa Indonesia khas Ambon, Ika—nama panggilan perempuan tersebut—menguraikan panjang lebar mengenai kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat Kota Ambon dan kawasan timur Indonesia umumnya. Menurutnya, perempuan yang dicaci maki dan dipukul oleh suaminya dianggap biasa di kawasan timur Indonesia.

Ika bisa menyebut kawasan timur Indonesia, selain karena lahir dan dibesarkan di Kota Jayapura dan Manokwari, sehingga tentu tahu dan paham perilaku masyarakat selain masyarakat Ambon, Ika juga rajin membaca, suatu aktivitas yang belum tentu dilakukan secara rajin oleh pelajar/mahasiswa, guru, dan dosen.

Perempuan bernama lengkap Ika Parera, kelahiran Jayapura 13 Mei 1984 dan ibu empat anak perempuan ini, adalah tipe perempuan mandiri dan kritis. Pernah bekerja sebagai kasir di sebuah hotel di Kota Ambon, tapi kemudian memutuskan berhenti, karena merasa diperlakukan tidak adil. Dia mengerjakan beberapa pekerjaan di luar tugas utamanya sebagai kasir, namun tidak dihitung sebagai lembur atau diberi kompensasi dari tambahan pekerjaan tersebut.

Mengadvokasi Dana BOS

Setelah berhenti sebagai kasir, Ika kemudian merintis usaha sendiri dengan membuka kios yang menyediakan berbagai

kebutuhan pokok. Dia juga menerima pesanan makanan dan kebutuhan konsumsi untuk acara-acara kantor, pernikahan, dan keagamaan. Dengan berusaha sendiri, Ika dapat mengatur sendiri aktivitas dan waktunya.

Sebagai Ketua Kelompok Konstituen (KK) Marawai, Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, Ambon, Ika mengharapkan agar masyarakat dapat tahu dan sadar mengenai hak-haknya. Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat diam dan tidak berbuat apa-apa, padahal mereka diperlakukan tidak adil. Misalnya, ada warga yang tidak mendapat raskin (beras miskin), padahal pantas mendapatkan. Ada juga warga yang mendapat raskin, padahal secara ekonomi lebih baik. Bagi Ika, ini sangat tidak adil karena memperlakukan orang-orang kecil semakin tersisih.

Menurut Ika, masyarakat tidak tahu, atau kalau tahu pun tidak berani menyampaikan. Akhirnya, masalah-masalah tersebut tidak pernah diselesaikan, atau mungkin juga sengaja dibiarkan terus-menerus, karena juga ada orang-orang yang memperoleh keuntungan dari masalah-masalah itu. Karena itu, harus ada yang menyampaikan masalah-masalah tersebut kepada pemerintah.

Itulah yang mendorong KK Marawai menerima pengaduan, mendata, dan mengadvokasi masalah-masalah yang riil di masyarakat. Salah satu masalah yang diadvokasi KK Marawai adalah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) di Sekolah Dasar setempat. Menurut Ika, penduduk Negeri Hatalai mengeluhkan pengelolaan dana BOS. Masyarakat mengusulkan kepada KK Marawai untuk mencari tahu pengelolaan Dana BOS tersebut.

KK Marawai memulai dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai Dana BOS di PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Data) Kota Ambon dan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Untuk mendapatkan data, KK Marawai harus menyurat secara resmi dan ditanggapi dengan cepat. Data yang diperoleh selanjutnya dipelajari dan dirapatkan.

Secara bersamaan Dinas Pendidikan Kota Ambon juga mengundang KK Marawai untuk berdialog. Staf Dinas Pendidikan Kota Ambon pun bergerak cepat turun ke sekolah bersangkutan. Akhirnya kepala SD mengundang Ketua Komite Sekolah untuk membicarakan keluhan warga selama ini. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Komite Sekolah dan Dewan Guru, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu : (1) transparansi pengelolaan dana BOS; (2) pengelolaan dana BOS melibatkan Komite Sekolah; dan (3) monitoring dan pengawasan dana BOS dari KK Marawai.

Perempuan Harus Bersuara

Pengalaman mengadvokasi Dana BOS tersebut, bagi Ika adalah sesuatu penting. Bukan hanya karena Ika adalah Ketua KK Marawai, tetapi dia adalah perempuan yang

memimpin perempuan—mayoritas anggota KK adalah perempuan—untuk mengadvokasi seorang perempuan. Kepala SD setempat yang diadvokasi adalah seorang perempuan.

Namun, apa yang dilakukan oleh KK Marawai sesuai dengan prosedur dan etika, walaupun mungkin ada orang yang tidak senang. Perempuan yang telah melahirkan empat anak perempuan—El Gracia Salamena, Christa Tresya Salamena, Grizelda Aurelia Salamena, dan Gilda Alicia Salamena—ini menuturkan, kegiatan yang dilakukan oleh KK Marawai menggunakan surat resmi dan melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut kepada ibu Raja—setara Kepala Desa. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan mereka diketahui oleh pemerintah.

Perempuan yang juga aktif dalam Pelayanan Perempuan di Gereja ini, menurutukan bahwa, perempuan perlu bersuara, menyampaikan apa-apa yang merugikan perempuan dan masyarakat. Laki-laki biasanya diam, karena mereka tidak merasakan langsung permasalahan-permasalahan dalam keluarga. Kalau laki-laki diam dan perempuan juga diam, berarti tidak ada perbaikan dan tidak ada kemajuan masyarakat.

Mengubah Pola Pikir Perempuan

Bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Ambon ini, perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki. Hanya kesempatan perempuan lebih sedikit, di samping masyarakat masih menganggap perempuan hanya cocok dan pantas bekerja di rumah. Masyarakat masih melihat perempuan secara negatif bila bekerja di luar rumah, padahal kenyataannya ibu-ibu yang berdagang di pasar, penjual ikan, penjual jamu dan lainnya, itu umumnya perempuan, dan pekerjaan tersebut berlangsung di luar rumah.

Demikian juga kalau terjadi kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), baik korbannya perempuan maupun anak, tetangga dan masyarakat diam. Yang lebih salah lagi, kalau ada KDRT, maka yang salah juga perempuan. Jadi perempuan itu selalu salah, walaupun dia menjadi korban kekerasan, keluh alumni SD Negeri 10 Ambon dan SMP Negeri 4 Ambon ini.

Sejak dipercaya menjadi Ketua KK Marawai, Ika ingin menjembatani keluhan warga terkait dengan pelayanan sosial, di antaranya, selain dana BOS yang telah diadvokasi, masalah lain yang selalu dikeluhkan warga adalah raskin yang tidak tepat sasaran, kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan pendidikan.

Saat ini KK Marawai mencari data kemiskinan dan meminta data penerima raskin di desa Hatalai untuk mendiskusikan dan mencocokkan, siapa yang pantas menerima raskin dan tidak pantas menerima!

KK di Negeri Hatalai dinamakan "Marawai". Marawai adalah nama tempat di Negeri Hatalai yang digunakan sebagai tempat memulai berbagai kegiatan adat. Dengan memberi nama sesuai dengan nama yang dihormati oleh warga Hatalai, diharapkan KK Marawai bisa berbuat lebih baik bagi perempuan dan masyarakat.

Negeri Hatalai (negeri = desa adat, yang dipimpin oleh Raja) berpenduduk 226 kepala keluarga dan 1.034 jiwa, yang terdiri dari 497 laki-laki dan 537 perempuan. Itu berarti, jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki, namun potensi perempuan sedikit sekali yang berguna, karena perempuan lebih banyak diam, apalagi sering dilihat negatif. Karena itu, yang diperlukan adalah mengubah pola pikir perempuan. Perempuan harus tahu dan sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Ika menjelaskan, Yayasan Arika Mahina bekerjasama dengan Yayasan BaKTI—melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)—telah memfasilitasi pembentukan dan penguatan KK sejak awal 2014. Dengan adanya KK, warga lebih mudah berhubungan dengan wakil mereka di parlemen maupun membangun hubungan dengan pemerintah. Bagi Ika, kekuatan KK terletak pada keanggotaannya yang sebagian besar perempuan. Sementara pembentukan kelompok-kelompok sebelumnya sebagian besar beranggotakan laki-laki. Dengan begitu, perempuan diberi ruang yang lebih baik untuk mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.

(M. GHUFRAN H. KORDI K.)

Perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, hanya kesempatan perempuan lebih sedikit, di samping masyarakat masih menganggap perempuan hanya cocok dan pantas bekerja di rumah.

Nini
Perempuan Pelopor

Kota Ambon

Bagi Ibu Nini, kekuatan KK (Kelompok Konstituen) terletak pada keanggotaannya yang sebagian besar perempuan. Sementara pembentukan kelompok-kelompok sebelumnya sebagian besar beranggotakan laki-laki. Dengan begitu, perempuan diberi ruang yang lebih baik untuk mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.

Ibu Nini adalah Ketua Seksi Data dan Informasi pada KK Walang Hatukau Negeri Batu Merah. Ibu Nini selain sebagai Ketua Seksi Data dan Informasi, beliau juga adalah Ketua RT.004/RW 01 Negeri Batu Merah. Ia berjuang membantu masyarakat dalam pengurusan BPJS dan Akta Kelahiran anak bagi keluarga miskin.

Ibu Nini, lahir dan dibesarkan di Buton, Sulawesi Selatan, sehingga tentu tahu dan paham perilaku masyarakat selain masyarakat Ambon. Ibu Nini juga rajin membaca, suatu aktivitas yang belum tentu dilakukan secara rajin oleh setiap orang yang bersekolah tinggi.
Perempuan bernama lengkap Nini Kusniaty, dilahirkan di Palopo 11 Pebruari 1962 dan ibu 5 anak perempuan 3 dan laki-laki 2 ini, adalah tipe perempuan mandiri dan kritis. PNS pada

Kanwil Bea Cukai di Ambon. Ia juga mengerjakan beberapa pekerjaan di luar tugasnya sebagai ibu rumah, ibu Nini juga membuka warung di wilayah RT nya di kawasan Pasar Mardika.

Aktif Membantu Warga

Setelah mengikuti banyak kegiatan yang telah dilakukan oleh Yayasan Arika Mahina dengan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), dengan 5 isu di antaranya masalah kekerasan terhadap perempuan, masalah-masalah jaminan sosial dan kesehatan seperti BPJS, Raskin, dan juga kesehatan reproduksi.

Sebagai Seksi Data dan Informasi KK Walang Hatukau, Negeri (Desa) Batu Merah, Kecamatan Sirimau, Ambon, ibu Nini mengharapkan agar masyarakat dapat tahu dan sadar mengenai hak-haknya. Menurutnya, selama ini sebagian masyarakat diam dan tidak berbuat apa-apa, padahal mereka diperlakukan tidak adil. Misalnya, ada warga yang tidak mendapat rastra (besar sejahtera)—dulu raskin (beras miskin), padahal pantas mendapatkan. Ada juga warga yang mendapat rastra, padahal secara ekonomi lebih baik. Bagi ibu Nini, ini sangat tidak adil karena memperlakukan orang-orang kecil semakin tersisih.

Menurut Ibu Nini, masyarakat tidak tahu, atau kalau tahu pun tidak berani menyampaikan. Akhirnya, masalah-masalah tersebut tidak pernah diselesaikan, atau mungkin juga sengaja dibiarkan terus-menerus, karena juga ada orang-orang yang memperoleh keuntungan dari masalah-masalah itu. Karena itu, harus ada yang menyampaikan masalah-masalah tersebut kepada pemerintah.

Setelah mengikuti kegiatan yang di lakukan Yayasan Arika Mahina pada saat itu mendatangkan petugas BPJS Kesehatan untuk melakukan sosialisai kepada KK Walang Hatukau di Negeri Batu Merah banyak sekali pola pikirnya dibukakan tentang pentingnya BPJS Kesehatan, sehinga timbul niat untuk memberitahukan untuk warganya tentang pentingnya BPJS Kesehatan.

Itulah yang mendorong ibu Nini untuk melakukan sosialisai BPJS Kesehatan kepada masyarakat dan juga membantu masyarakat yang mau mengurus BPJS Kesehatan. Setelah menjelaskan pentingnya BPJS Kesehatan kepada masyarakat pada bulan Juli s.d.Agustus 2015. Sebagai Ketua RT ibu Nini merasa senang dapat membantu program pemerintah dan yang telebih penting dapat membantu masyarakat di lingkungan RT-nya dalam pengurusan BPJS Kesehatan. Sampai sekarang ibu Nini masih memberikan pengertian kepada masyarakatnya tentang BPJS Kesehatan.

Selain masalah BPJS ibu Nini juga membantu ibu-ibu melahirkan yang ditangani oleh "mama biang" (dukun beranak). Biasanya saat ibu-ibu yang melahirkan di tangani oleh mama biang mengalami kesulitan untuk mengurus Akte Kelahiran. Melihat masalah yang terjadi, maka saat terjadi kelahiran yang ditanggani oleh mama biang, maka Ibu Nini dan teman temannya menemui pihak Puskesmas sehingga Puskesmas memberikan rekomendasinya bahwa mama biang adalah orang yang telah dilatih oleh Petugas Puskesmas, sebab jika tidak ada rekomendasi dari Puskesmas, maka anak tersebut sangat sulit untuk mendapatkan akte kelahiran. Apa yang dilakukan ibu Nini sangat membantu masyarakat di lingkungaannya. Sampai saat ini ibu Nini telah mengurus 30 akte kelahiran buat anak-anak yang ada di lingkungannya.

Perempuan Harus Jadi Pelopor

Ibu Nini berpendapat bahwa perempuan mempunyai kemampuan yang sama dengan laki-laki, hanya kesempatan perempuan lebih sedikit, di samping masyarakat masih menganggap perempuan hanya cocok dan pantas bekerja di rumah. Masyarakat masih melihat perempuan secara negatif bila bekerja di luar rumah, padahal kenyataannya ibu-ibu yang berdagang di pasar, penjual ikan, penjual jamu dan lainnya, itu umumnya perempuan, dan pekerjaan tersebut berlangsung di luar rumah.

Demikian juga kalau terjadi kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT), baik korbannya perempuan maupun anak, tetangga dan

masyarakat diam. Yang lebih salah lagi, kalau ada KDRT, maka yang salah juga perempuan. Jadi perempuan itu selalu salah.

Sejak dipercaya menjadi Ketua Seksi Data dan Informasi, Ibu Nini ingin menjembatani keluhan warga terkait dengan pelayanan sosial dan juga, masalah lain yang selalu dikeluhkan warga di lingkunganya, yang begitu rumit karena RT-nya di kawasan Pasar Mardika.

KK di Negeri Batu Merah dinamakan "Walang Hatukau". Walang Hatukau adalah nama tempat di Negeri Batu Merah yang digunakan sebagai tempat untuk berkumpul. Dengan memberi nama sesuai dengan nama yang dihormati oleh warga Batu Merah, diharapkan KK Walang Hatukau bisa berbuat lebih baik bagi perempuan dan masyarakat.Karena itu, yang diperlukan adalah mengubah pola pikir perempuan. Perempuan harus tahu dan sadar bahwa mereka mempunyai hak-hak dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang.

Ibu Nini menjelaskan, Yayasan Arika Mahina bekerjasama dengan Yayasan BaKTI melalui Program MAMPU telah memfasilitasi pembentukan dan penguatan KK sejak awal 2014. Dengan adanya KK, warga lebih mudah berhubungan dengan wakil mereka di parlemen maupun membangun hubungan dengan pemerintah. Bagi Ibu Nini, kekuatan KK terletak pada keanggotaannya yang sebagian besar perempuan. Sementara pembentukan kelompok-kelompok sebelumnya sebagian besar beranggotakan laki-laki. Dengan begitu, perempuan diberi ruang yang lebih baik untuk mengembangkan diri dan mengubah pola pikir.

Sebelum tergabung dengan program MAMPU ibu Nini memang adalah seorang RT dan mengetahui banyak masalah, tetapi setelah tergabung dengan KK telah mendorongnya melalui peningkatan kapasitas dan wawasan yang diberikan oleh program MAMPU ibu Nini dapat melakukan advokasi dengan didukung oleh keluarga dan teman-teman kelompok.

(SOFIA SIAHAYA)

Membuka Ruang bagi Masyarakat Kritis

Catatan tentang Kelompok Konstituen di Ambon

> Jika data tidak segera diperbaiki, maka tiga kartu pemerintah pusat, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, hanya akan menimbulkan masalah baru di masyarakat.
> **(Dominggus Rodja)**

Workshop Penguatan Pengurus Kelompok Konstituen (KK) yang berlangsung di Hotel Amaris Ambon, 31 Maret 2015 menjadi dua ajang sekaligus. Pertama, lomba yel-yel KK yang kreatif dengan suara merdu ala Ambon, dan Kedua identifikasi permasalahan-permasalahan masyarakat yang didiskusikan secara kritis dengan solusi-solusi cerdas, perlu pelembagaan, dan harus beretika.

Aktivis LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) senior dari Sulawesi Selatan, May Januar, yang memfasilitasi workshop tersebut

dibuat terheran-heran dengan argumen-argumen peserta. Tentu sangat beralasan jika pengurus KK Kota Ambon terdiri dari orang-orang kritis, karena latar belakang pendidikan yang relatif tinggi, umumnya lulusan SMA dengan berbagai latar belakang aktivitas, seperti guru, mantan raja (setara kepala desa), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh perempuan.

Masyarakat kritis hanyalah satu syarat dari kriteria dari keberdayaan. Syarat lainnya adalah mampu mengorganisasikan diri untuk berhadapan dengan kekuasaan, baik politik (pemerintah/negara) maupun kekuasaan pemodal. Para teoritisi sosial percaya bahwa hanya masyarakat sipil atau masyarakat madani yang kuatlah yang dapat mengimbangi negara dan pemodal yang kuat dalam membangun demokrasi.

Konstituen, Bukan Sekadar Pemilih

Konstituen adalah seluruh warga yang ada di daerah pemilihan tempat seorang Anggota Dewan dipilih saat pemilihan umum (Soetjipto et al., 2014). Dengan memilih anggota dewan/anggota parlemen, rakyat telah menyerahkan otoritas mereka kepada wakilnya di parlemen (DPR/DPD/DPRD).

Sebagai rakyat yang memunyai wakil di parlemen, konstituen telah mewakilkan kepentingan-kepentingannya kepada anggota parlemen dalam penyusunan kebijakan publik. Namun, konstituen juga tidak hanya berharap kepentingannya telah terwakili setelah selesai memilih. Konstituen tidak sekadar pemilih yang melakukan rutinitas lima tahunan. Konstituen menduduki posisi penting dalam pelaksanaan fungsi anggota parlemen : legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Karena itu, sistem demokrasi juga menuntut konstituen atau rakyat yang kuat. Penguatan parlemen harus beriringan dengan penguatan konstituen. Logika ini dipakai Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan-BaKTI. Setelah setahun berjalan, penguatan konstituen menunjukkan kemajuan. Beberapa yang dapat dicatat dari Kelompok Konstituen (KK) di Kota Ambon, Maluku adalah, selain mengorganisasi dan mengadvokasikan kepentingan, KK juga telah mengenal wakil mereka di parlemen dan mulai membangun hubungan.

KK di Kota Ambon terdiri dari 25 kelompok yang berada di 25 desa/kelurahan di lima kecamatan. Masing-masing kecamatan mempunyai lima kelompok konstituen. Pengurus dan anggota KK mayoritas adalah perempuan, karena program ini adalah memperkuat dan memajukan perempuan. Dengan jumlah desa/kelurahan di Kota Ambon sebanyak 50 desa/kelurahan, maka KK berada di 50 % desa/kelurahan.

Dengan jumlah penduduk 379.615 jiwa, yang terdiri dari 189.728 laki-laki dan 189.887 perempuan (Ambon Dalam Angka 2014), KK diharapkan mampu mengorganisasi dan mengadvokasikan kebutuhan dan kepentingan setengah penduduk Kota Ambon.

Dalam waktu setahun setelah pembentukan dan penguatan KK di Ambon, beberapa kemajuan perlu dicatat untuk pembelajaran. Sebagian kecil dari kemajuan tersebut disajikan berikut.

Penanganan KDRT

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah sosial yang umum di negeri ini. Korban terbesar KDRT adalah perempuan dan anak, terutama kekerasan fisik dan psikis. Walaupun KDRT adalah tindak pidana, namun memproses pelaku KDRT yang umumnya adalah suami atau ayah korban, tidak selalu menyelesaikan masalah.

Menurut Mama Nona (Enggelina), Ketua KK Tihulessy, Negeri Hukurila, Kecamatan Leitimur Selatan, kekerasan terhadap perempuan itu masih banyak, cuma orang tidak berani melaporkan. Apalagi masyarakat menganggap KDRT adalah masalah rumah tangga sehingga tidak boleh ada campur tangan dari pihak luar. Baru sebagian kecil perempuan yang berani melaporkan kasusnya ke polisi.

Namun melaporkan kasus ke polisi juga tidak selalu menyelesaikan masalah. Proses hukum terhadap pelaku, selain menguras energi para pihak, juga membuat masalah

semakin rumit. Belajar dari pengalaman tersebut, beberapa KK di Kota Ambon berinisiatif menyelesaikan KDRT secara kekeluargaan, ini merupakan praktek *restorative justice*.

KK Tihulessy menyelesaikan kasus KDRT—kekerasan perempuan yang dilakukan oleh suami—dengan mendatangi korban terlebih dahulu untuk mendapatkan informasi, kemudian pelaku. Setelah itu, pelaku dan korban dipertemukan untuk mencari jalan keluar. Kasus ini berhasil diselesaikan, padahal sebelumnya korban telah melaporkan kasusnya ke polisi.

Jika kasus diproses secara hukum, maka KK mendampingi korban dalam proses tersebut. Ini menjadi pembelajaran yang baik bagi masyarakat, karena perhatian terhadap korban yang dilakukan oleh KK menjadi peringatan bagi pelaku dan calon pelaku KDRT. Bahwa korban KDRT tidak akan diam karena mempunyai tempat untuk mengadu dan dibantu. Sebelumnya banyak kasus KDRT tidak terungkap, karena korban tidak mempunyai tempat untuk mengadu, dan tidak mempunyai pendamping jika harus berurusan dengan aparat hukum.

Advokasi Dana BOS

KK Marawai, Negeri Hatalai, Kecamatan Leitimur Selatan, yang dipimpin oleh Ika Parera mengadvokasi Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Masyarakat di Negeri (setara Desa) Hatalai mengeluhkan pengelolaan dana BOS di Sekolah Dasar (SD) setempat. Masyarakat mengusulkan kepada KK Marawai untuk mencari tahu pengelolaan Dana BOS tersebut.

KK Marawai memulai dengan mengumpulkan data dan informasi mengenai Dana BOS di PPID (Pusat Pelayanan Informasi dan Data) Kota Ambon dan Dinas Pendidikan Kota Ambon. Untuk mendapatkan data, KK Marawai harus menyurat secara resmi dan ditanggapi dengan cepat. Data yang diperoleh selanjutnya dipelajari dan dirapatkan.

Secara bersamaan Dinas Pendidikan Kota Ambon juga mengundang KK Marawai untuk berdialog. Staf Dinas Pendidikan Kota Ambon pun bergerak cepat turun ke sekolah bersangkutan. Akhirnya kepala SD

mengundang Ketua Komite Sekolah untuk membicarakan keluhan warga selama ini. Kemudian ditindaklanjuti dengan pertemuan Komite Sekolah dan Dewan Guru, yang menghasilkan beberapa kesepakatan, yaitu : (1) transparansi pengelolaan dana BOS; (2) pengelolaan dana BOS melibatkan Komite Sekolah; dan (3) monitoring dan pengawasan dana BOS dari KK Marawai.

Membuka Lapangan Kerja Pemuda

Sementara KK Masola, Negeri Masola, Kecamatan Leitimur Selatan, yang dipimpin Bapak Roja (Dominggus Rodja) melangkah lebih jauh dengan membuka lapangan kerja untuk pemuda di Negeri Masola. KK Masola membuat bangunan untuk bengkel motor, kemudian mengajukan proposal kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Ambon untuk pengadaan peralatan perbengkelan. Dana dari Dinsos Kota Ambon sebesar Rp. 15 juta digunakan untuk pembelian peralatan. Saat ini bengkel tersebut telah beroperasi yang dikelola oleh pemuda-pemuda negeri yang sebelumnya tidak mempunyai pekerjaan.

Ide membuat bengkel untuk mempekerjakan pemuda negeri muncul saat pertemuan KK. Menurut Bapak Roja, banyak orang memikirkan pemuda-pemuda yang tidak bekerja, namun sulit mendapatkan jalan keluar. Dengan bergabung dalam organisasi atau kelompok, seperti KK, maka banyak pikiran dan pendapat sehingga mudah mendapatkan jalan keluar. Di samping itu, posisi kelompok lebih kuat dan lebih dipercaya, termasuk mudah mendapat dukungan dan bantuan.

Membuat Data Kemiskinan

Selain membuat bengkel, sejak bulan Maret 2015, KK Masola membuat data kemiskinan desa, dengan mendata semua warga Negeri Masola yang termasuk kategori miskin. Data tersebut kemudian didiskusikan dalam KK untuk menentukan siapa yang layak disebut miskin dan layak mendapat bantuan dari pemerintah, seperti beras miskin (raskin), dan lain-lain.

Selama ini, data pemerintah yang digunakan untuk raskin dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) ternyata menimbulkan masalah, karena sebagian salah sasaran. Jika data tidak segera diperbaiki, maka tiga kartu pemerintah pusat (Program Presiden Joko Widodo), yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) hanya akan menimbulkan masalah baru di masyarakat. Demikian argumen Bapak Roja.

Inisiatif KK Masola membuat data kemiskinan versi masyarakat patut diapresiasi. Bagaimanapun, seperti dituturkan oleh Bapak Roja, masyarakat tahu, siapa yang miskin dan harus mendapat bantuan dan siapa yang tidak miskin sehingga tidak perlu bantuan. Data kemiskinan yang dibuat selanjutnya akan diserahkan kepada Raja Negeri Masola untuk menyampaikan kepada pemerintah yang lebih tinggi.

Penutup

Catatan di atas adalah contoh sebagian kecil dari kemajuan yang dicapai oleh KK selama satu tahun ini di Ambon. Yang perlu digarisbawahi adalah, masyarakat mempunyai inisiatif dan selalu ingin berbuat untuk kebutuhan dan kepentingan bersama. Modal atau kapital sosial di masyarakat dapat berguna dan mempunyai kekuatan, jika masyarakat mempunyai akses, dapat berpartisipasi, memperoleh manfaat, dan dapat mengontrol sumber daya untuk kebutuhan dan kepentingan bersama.

Jangan lupa, sebagian besar pengurus dan anggota KK adalah perempuan. Dengan melibatkan perempuan dalam pembangunan dan aktivitas sosial, banyak sekali permasalahan yang tidak terpikirkan, kini terbuka dan didiskusikan. Banyak juga masalah yang tidak tertangani, kini ditangani. *Laki-laki hanya memikirkan hal-hal besar, sedangkan perempuan bisa memikirkan semua hal, kecil sampai yang besar.* **(M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Sandra Soekardi, umur 44 tahun, lahir 30 September 1972. Sehari-hari Sandra, sapaan akrab ibu rumah tangga yang memiliki 3 anak, juga sebagai Kaur (kepala urusan) Pemerintahan pada Kantor Desa Nania, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, serta di Kelompok Konstituen (KK) Waipipit sebagai anggota pada Divisi Data dan Informasi. Sejak ada Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), menurut ibu Sandra, banyak sekali kegiatan yang selalu ia ikuti, bahkan ada pelatihan–pelatihan juga yang diikuti oleh ibu Sandra dan teman-teman KK Waipipit. Pelatihan yang pernah diikuti oleh ibu Sandra dan teman-teman KK Waipipit di antaranya: Pelatihan Advokasi, Pelatihan HAM (Hak Asasi MAnusia) dan HAP (Hak Asasi Perempuan), dan Pelatihan Penggorganisasian Masyarakat, serta berbagai pertemuan yang menambah pengetahuan dan keterampilan.

Bertolak dari pemahaman yang diperoleh melalui Program MAMPU dan berbagai pelatihan yang telah diikuti menginspirasi ibu Sandra dan teman-teman kelompok, kemudian mereka memiliki sensifitas dan kepekaan terhadap berbagai persoalan dan rasa percaya diri untuk melakukan advokasi maupun melakukan pertolongan bagi orang-orang/masayarakat yang membutuhkan di Desa Nania.

Pada tanggal 22 April 2015, Ibu Sandra dan Ketua KK Waipipit Desa Nania, Ibu Renny Sahetapy mengadvokasi kasus ibu melahirkan yang tidak bisa ditangani oleh Rumah Sakit Tulehu, karena si ibu dan keluarganya tidak memiliki biaya. Pada saat ditolak oleh RSU Tulehu, ibu yang mau melahirkan ini telah mengalami pembukaan, namun karena tidak punya biaya akhirnya ditolak oleh pihak RSU Tulehu.

Sandra

Menyelamatkan Persalinan

Ibu Sandra dan KK berinisitif mengambil alih masalah ini, karena dua tahun yang lalu ibu yang sama juga melahirkan, namun karena tidak ada biaya, dia melahirkan di rumah, dan karena tidak ditangani, bayinya meninggal dunia. Berdasarkan pengalaman ini, maka ibu Sandra bersama dengan teman-teman KK bergerak cepat mengadvokasi kasus ini.

Pengurusan dilakukan KK dengan meminta arahan dari PA (Program Asisten) dan Admin Officer Yayasan Arika Mahina mengenai prosedur pengurusan pengobatan dengan mengunakan surat keterangan miskin. Dengan petunjuk ini, kemudian KK mengurus surat keterangan tidak mampu dari pihak RT dengan diketahui oleh Kepala Desa dan disahkan oleh Camat Baguala. Surat-surat tersebut diantarkan ke Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk disahkan.

Dengan membawa keterangan ini, maka KK dan bersama ibu yang mau melahirkan ini dibawa ke RSUD Dr. M. Haulusy Ambon untuk dilayani, pertolongan pun dilakukan oleh pihak rumah sakit kepada ibu tersebut dan akhirnya ibu dari keluarga tidak mampu ini bisa melahirkan anaknya dengan selamat.

Apa yang ibu Sandra dan KK Waipitit lakukan terlihat sederhana, namun kenyataanya permasalahan seperti ini sangat banyak dan umum terjadi di sekitar kita. Banyak perempuan melahirkan tidak tertolong dan meninggal, ataupun anaknya yang meninggal. Hal itu selalu terjadi, terus berulang dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa.

Ibu Sandra mengakui dengan adanya program MAMPU dan peningkatan kapaistas terkait dengan advokasi, maka ibu Sandra dan teman-teman kelompok memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi, padahal sebelum tergabung di dalam KK, menurut ibu Sandra banyak sekali persoalan yang terjadi di masyarakat tetapi Ibu Sandra hanya membantu dengan memberikan surat keterangan dari pihak desa saja, dalam kapasitasnya sebagai seorang Kaur Pemerintahan di Desa.

Sejak bergabung dengan KK Waipipit, ibu Sandra dan teman-teman semakin mengerti peran dan tanggungjawab mereka di desa. Ibu

Sandra juga mengakui bahwa ternyata apa yang kelompoknya lakukan sangat membantu masyarakat dan membantu orang-orang di desa untuk mendapatkan hak-hak mereka. Ini terlihat dengan ada beberapa kasus/persolaan juga yang diinisiasi oleh KK Waipipit di antaranya, pemberian bantuan untuk anak dengan kebutuhan khusus dan membantu/mengadvokasi persoalan septik tank komunal di desa.

Perubahan yang terjadi bagi pribadi ibu Sandra dan KK Waipipit juga tidak terlepas dari dukungan keluarga, teman-teman kelompok konstituen, dan juga masyarakat di Desa Nania. Ibu Sandra dan teman-temannya yang bergabung di KK mempunyai pengetahuan dan mau melakukan sesuatu untuk membantu masyarakat.

Sebagai seorang aparat pemerintah, ibu Sandra sadar bahwa selama ini hak-hak warga tidak terpenuhi, baik karena ketidaktahuan warga maupun karena ketidaktahuan aparat pemerintah. Warga tentu tidak tahu bahwa, mereka mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi oleh negara. Kalaupun tahu, warga belum tentu dapat mengakses hak-hak tersebut. Selain karena ketidakberdayaan warga, mereka juga berhadapan dengan birokrasi pemerintah yang tidak bersahabat dengan warga.

Ketika terbentur, misalnya ditolak oleh puskesmas atau rumah sakit, maka warga langsung kembali ke rumah dan berdiam diri. Tidak ada upaya lain yang dilakukan. Tidak ada juga bantuan yang datang dari pihak lain. Warga umumnya pasrah karena ketidaktahuan, sekaligus tidak ada pihak lain yang membantu.

Dari sisi pemerintah, tidak semua aparat pemerintah mempunyai pengetahuan mengenai hak-hak warga. Aparat pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan bagi warga, tidak selalu mempunyai pengetahuan mengenai hal itu. Karena itu, alih-alih menjadi pelayan, justru sebaliknya menunjukkan sikap yang tidak bersahabat terhadap warga, apalagi warga miskin dan perempuan miskin.

Sering ditemukan, warga miskin tidak berani mendatangi kantor-kantor pemerintah, karena sebagian aparat pemerintah tidak menunjukkan sikapnya sebagai pelayan. Warga berani datang ke kantor pemerintah jika di kantor tersebut ada orang yang peduli atau kenalan. Ibu Sandra adalah salah satu aparat pemerintah desa yang sering didatangi oleh warga, termasuk warga miskin dan perempuan miskin.

Karenanya, sikap dan pemihakan yang ditujukan oleh ibu Sandra, baik sebagai seorang aparat desa maupun sebagai seorang perempuan, patut diacungi jempol. Ibu Sandra tidak merasa risih melakukan hal-hal yang sebelumnya dia tidak pernah lakukan. Dia juga tidak merasa besar kepala karena sudah membantu orang-orang yang membutuhkan. Dia justru mengajak kepada warga yang lain untuk peduli terhadap sesama.

Sebagai seorang perempuan, ibu Sandra telah melihat dengan jelas bahwa, ada yang tidak adil terhadap kaumnya. Jika persoalan melahirkan hanya menjadi beban keluarga, maka banyak sekali perempuan yang menjadi korban. Bagi ibu Sandra, persoalan melahirkan harus menjadi beban seluruh warga dan negara. Warga harus aktif membantu perempuan-perempuan yang melahirkan.

Karena itu, ibu Sandra melihat bahwa KK merupakan salah satu organisasi yang diperlukan. Dengan berkelompok, masyarakat mempunyai kekuatan untuk saling membantu sesamanya. Dengan berkelompok, maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, baik secara kekeluargaan dan musyawarah, atau harus melalui proses pendampingan pada lembaga-lembaga layanan yang ada.

(SOFIA SIAHAYA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)

KOTA

MATARAM

DAN

KABUPATEN

LOMBOK TIMUR

Sub Office MAMPU-BaKTI

Tidak Selalu Menunggu Uluran Tangan Negara

Catatan tentang Kelompok Konstituen di Mataram dan Lotim

Dalam konsepsi HAM (Hak Asasi Manusia) negara adalah pihak yang berkewajiban sebagai penanggung jawab *(state obligation)* dalam memenuhi hak-hak asasi warga negara, terutama hak-hak dasar: pangan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pemukiman. Namun, negara tidak selalu mampu memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.

Di samping alasan kemampuan negara yang terbatas, yang selama ini selalu menjadi biang negara mengabaikan hak-hak warganya, aparat pemerintah sebagai representasi negara juga gagal membuat dan merencanakan program yang selalu sesuai dengan kebutuhan warga negara. Pada tingkat implementasi, banyak sekali program yang tidak tepat sasaran, atau sengaja dibelokkan oleh aparat pemerintah untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Karena itu, warga negara tidak selalu harus menunggu "uluran tangan" dan "kebaikan negara". Warna negara harus menuntut pada negara untuk agar melaksanakan tanggungjawabnya. Jika warga negara mendiamkan situasi dan nasibnya, maka negara pun semakin melupakan tanggungjawabnya. Di sisi lain, aparat pemerintah yang merupakan representasi negara dan dibayar negara untuk melayani warga negara, yang sudah terbiasa membelokkan kebijakan dan program, akan semakin menjadi aparat yang tidak bertanggungjawab, dan memanfaatkan posisinya untuk kepentingan dan keuntungan pribadi, serta merugikan negara.

Namun, tidak semua warga negara dapat menuntut hak-haknya kepada negara atau menyampaikan kebutuhan-kebutuhan mendasar mereka. Karena itu, diperlukan penyadaran kritis dan penguatan kepada rakyat agar mereka dapat membangun kekuatan dan kebersamaan.

Pengalaman pembentukan kelompok konstituen (KK) yang difasilitasi mitra Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) sebagai wadah penguatan dan pengorganisasian masyarakat agar mampu mengadvokasikan hak-hak mereka, menjadi pembelajaran yang baik, tidak hanya untuk advokasi kepada negara, tetapi juga membangun solidaritas dan kerjasama untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Membantu Sesama

Pengurus KK di Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, mendata warga miskin di kelurahan tersebut yang selama ini tidak mendapatkan bantuan sosial dari negara, seperti Raskin (beras miskin), BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat), dan PSKS (program simpanan kesejahteraan keluarga). Data-data tersebut disampaikan ke pemerintah setempat, dari tingkat Lurah, Camat, hingga Kepala Dinas Sosial.

KK juga menyampaikan keberatan kepada pemerintah, karena di antara penerima bantuan sosial dari pemerintah adalah warga yang kondisi ekonominya lebih baik, sehingga tidak pantas menerima bantuan. Pemerintah (lurah dan camat) merespon keberatan KK tersebut, dan mengubah data yang ada, namun hal ini dibicarakan secara terbuka antara KK, pemerintah kelurahan, dan masyarakat sehingga pihak-pihak yang ada dapat menerimanya.

Hal yang sama dilakukan oleh pengurus KK Lenek, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Namun, keberatan mereka adalah mengenai kualitas Raskin. Mereka mendatangi Bulog Lombok Timur dan menyampaikan tentang kualitas Raskin yang diberikan kepada warga miskin, yang kualitasnya sangat buruk.

Menurut Subhan, salah satu pengurus KK Lenek, Raskin yang dibagikan sangat buruk sehingga ayam pun tidak memakannya. Setelah dua kali mereka menyampaikan keberatan ke Bulog, Raskin yang dibagikan sudah baik. Mereka juga minta kepada masyarakat yang memperoleh Raskin yang jelek agar dapat melaporkan ke KK.

Sementara pengurus KK di Kelurahan Aikmel, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, menerima dan mendampingi kasus-kasus yang dialami warga di kelurahan tersebut. Kasus-kasus yang masuk dibicarakan dan dicari jalan keluarnya. Kasus yang banyak diterima adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta kasus penceraian di mana suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang telah diceraikan dan tidak menafkahi anak-anaknya.

Sebagian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di rumah, di mana pelaku adalah suami, dapat diselesaikan oleh KK. Begitu juga kasus kekerasan terhadap anak di sekolah yang bisa difasilitasi oleh KK. Sementara beberapa kasus lain yang berkategori berat diteruskan ke proses hukum dengan terus didampingi oleh pengurus KK.

Menurut Sumiyati, Ketua KK di Kelurahan Aikmel, pelaku-pelaku kekerasan, apakah itu suami atau guru, akan berpikir seribu kali jika hendak melakukan kekerasan, jika di dalam masyarakat ada pihak-pihak yang peduli terhadap kekerasan tersebut. Korban mempunyai tempat untuk mengadu dan didampingi, sehingga pelaku atau calon-calon

pelaku tidak semena-mena, atau bahkan ada calon pelaku yang tidak berani lagi melakukan kekerasan.

Sosialisasi BPJS secara Mandiri

Pengurus KK Dasan Agung, Kecamatan Mataram, Mataram menginisiasi sosialisasi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) secara mandiri. Inisiasi ini bermula dari meninggalnya seorang perempuan miskin yang melahirkan dan terlambat diberi pertolongan, karena terlambat di bawah ke rumah sakit. Ketika hendak dibawa ke rumah sakit, keluarga si ibu yang hendak melahirkan bertanya ke Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial Kota Mataram, apakah Kartu BPJS dapat digunakan untuk rawat inap? Jawaban yang didapatkan tidak jelas. Setelah sampai di rumah sakit, ternyata pihak rumah sakit menyatakan bisa! Namun, si ibu terlambat di bawa, sehingga meninggal.

Kasus ini menjadi pembicaraan di KK Dasan Agung, sehingga kemudian diputuskan untuk mensosialisasikan JKN-BPJS kepada KK dan warga di Dasan Agung. Pengurus KK urunan dana untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan menghadirkan narasumber dari BPJS, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kota Mataram. Menurut Hirsan Taqdir, Ketua KK Dasan Agung, warga dapat berswadaya dan bergotong-royong untuk melakukan sendiri jika terkait dengan kebutuhan dan kepentingan warga, asalkan ada yang mau menggerakkan dan mengorgansir.

Hirsan Taqdir menjelaskan bahwa, pengurus KK Dasan Agung telah bersepakat untuk mengelola KK tersebut secara mandiri dan berswadaya. Tidak selalu menunggu uluran tangan dari pihak luar, termasuk pemerintah. Karena jika hanya menunggu pihak luar, maka tidak ada kemajuan dan keswadayaan.

Membuat Blog untuk Penyadaran

Di KK Surya Bersuara, Kelurahan Suryawangi, Kecamatan Labuhan Haji, Lombok Timur, semua kegiatan diuplod ke blog sebagai media untuk pertukaran informasi. Menurut Adi, Ketua KK Surya Bersuara, ide membuat blog tersebut berasal dari pengalamannya bahwa, suara masyarakat kecil sulit sekali dijadikan berita oleh media konvensional, sekalipun berita itu penting. Dengan adanya blog yang dibuat oleh KK, diharapkan setiap anggota KK dan masyarakat dapat memasukkan setiap informasi yang merupakan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Bagi Adi yang membuat dan mengelola blog yang bisa diakses pada *http://www.kelompokkonstituen.wordpress.com* tersebut, adalah masyarakat tidak selalu mengeluruh dan kondisi yang ada, tetapi harus melakukan sesuatu sekalipun itu sangat kecil, dan jika bermanfaat maka harus dibagi kepada orang lain. Bloq ini diharapkan menjadi media untuk berbagi segala sesuatu yang bermanfaat itu.

Sekalipun isinya masih sangat sedikit, yang terpenting adalah masyarakat mempunyai kesadaran bahwa, perlu ada perubahan dan terobosan dalam memperjuangkan kebutuhan dan kepentingan bersama. Masyarakat tidak selalu menunggu apa-apa yang berasal dari pihak lain, tetapi berinisiatif untuk melakukan sesuatu yang berguna bagi dirinya maupun orang lain.

Negara harus terus diadvokasi untuk memenuhi tanggungjawabnya, namun rakyat juga diberi penguatan untuk meningkatan kemandirian dan keswadayaan. Karena rakyat yang mandiri, berswadaya, dan kuat akan menjadi kekuatan untuk mengimbangi negara, sehingga negara tidak dibajak dan dibelokkan oleh penguasa. **(M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Ruang Partisipasi **Perempuan Miskin**

Catatan Reses Partisipatif di Lombok Timur

Wakil rakyat atau anggota parlemen (DPR/DPRD) sebagai representasi rakyat dalam menjalankan fungsinya tetap mengacu pada kebutuhan dan suara konstituen. Kebutuhan itu beragam, mulai dari kebutuhan yang paling mendasar hingga aspek sosial dan budaya. Untuk mendengarkan suara konstituen, dalam setahun sebanyak tiga kali anggota DPR/DPRD mengunjunginya untuk melihat, merasakan dan mendengarkan secara langsung persoalan yang dihadapi. Serta memastikan program yang dilakukan pemerintah dirasakan dampaknya secara langsung oleh masyarakat. Kunjungan ke konstituen ini dikenal sebagai reses.

Reses Partisipatif muncul dari harapan publik agar bisa menjadi sarana yang efektif bagi anggota legislatif untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat yang diwakilinya.

Reses menjadi penting karena anggota DPR/DPRD mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk: (1) menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai anggota DPR/DPRD; (2) memantau/mengawasi realisasi pembangunan di dapil masing-masing; (3) melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapil; dan (4) menerima atau menjaring aspirasi konstituen di dapil.

Bagi kostituen, reses adalah salah satu sarana yang efektif dalam mengusulkan suatu kegiatan. Dan proses eksekusinyapun dirasakan cepat, dengan berbasis kebutuhan prioritas konstituen. Dengan besaran alokasi peserta yang cukup banyak, ruang partisiapsi perempuan miskin sangat terbuka dan menemukan tempatnya.

Partisipasi Perempuan

Namun, berkaca pada model reses yang selama ini dilakukan oleh anggota parlemen, dengan anggaran yang besar seharusnya mendapatkan usulan-usulan yang variatif dari masyarakat, tetapi yang terjadi pada setiap reses adalah, usulan yang banyak dikeluhkan atau disampaikan warga adalah melulu infrastruktur. Sehingga warga miskin dan perempuan yang harusnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan langsung atau pokok, tidak selalau masuk di dalam usulan yang di bawa oleh anggota parlemen. Itu karena peserta yang menghadiri reses didominasi oleh laki-laki, pemerintah setempat, dan elit.

Reses Partisipatif muncul dari harapan publik agar bisa menjadi sarana yang efektif bagi anggota legislatif untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat yang diwakilinya. Selama ini, sebagian besar reses hanya diwakili oleh konstituen laki-laki. Tetapi, dengan metode partisipatif dan mengedepankan keterwakilan perempuan, lebih khusus suara perempuan miskin, maka suara perempuan dapat didengar langsung oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Selain mengutamakan keterwakilan perempuan, Reses Partisipatif juga menggunakan metode yang lebih partisipatif. Usulan-usulan masyarakat dilakukan dalam diskusi kelompok dan dipresentasikan di depan anggota DPRD. Usulan-usulan tersebut menjadi dokumen bagi peserta reses dan akan dibawa oleh anggota DPRD.

Pola ini perlu dikembangkan agar aspirasi yang diperjuangkan anggota DPRD betul-betul murni, lahir dari persoalan sehari-hari masyarakat, lahir dari suara perempuan miskin dan marginal. Sehingga reses tidak hanya menyampaikan kebutuhan dan kepentingan kepada wakil rakyat, tetapi dapat dioptimalisasi sebagai sarana advokasi kepentingan konstituen dan publik yang lebih luas.

Di Kabupaten Lombok Timur, Reses Partisipatif dipraktikkan oleh pimpinan DPRD. Ketua DPRD Lombok Timur (H. Khaerul Rizal) melakukan Reses secara Partisipatif yang dipusatkan di Pondok Pesantren Syafi'iyah Darul Muhsin Nahdlatul Wathan dan di Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Wathan (MI NW) Dasan Lekong. Sedangkan untuk Wakil Ketua DPRD (Fadil Na'im) di Desa Peneda Gandor dan Desa Labuhan Haji Kecamatan Labuhan Haji. Sementara dan anggota parlemen perempuan (APP) Baiq Nurhasanah dilaksanakan di rumahnya, Desa Sukamulia, Kecamatan Suralaga.

Dengan tingkat kehadiran peserta reses mencapai 100 % dan tingat partisipasi dan keaktifan peserta mencapai 85 %. Dari proses tersebut dihasilkan dokumen aspirasi yang valid yang terbagi dalam beberapa sektor prioritas (Kesehatan, Sosial Budaya, Pendidikan, Pertanian, Infrastruktur, dan Program Perlindungan Sosial).

Reses yang dikembagkan oleh Kantor Suboffice MAMPU BaKTI NTB ini diapresiasi oleh DPRD Kabupaten Lombok Timur. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur H. Khaerul Rizal, mengatakan bahwa "Reses Partisipatif memberikan ruang seluas-luasnya bagi perempuan".

Reses Sebagai Sumber Legitimasi

Reses adalah kewajiban anggota DPRD yang diselenggarakan secara berkala dalam 3 kali masa sidang. Khusus anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur yang berjumlah 50 orang, mereka akan hadir secara langsung ke masyarakat. Dengan jumlah pertemuan yang berlangsung sebanyak 3 kali periode reses x 6 pertemuan = 18 kali pertemuan dengan

dihadiri rata-rata 90 peserta atau sekitar 1.620 orang peserta setiap tahunnya untuk setiap anggota DPRD nya, atau 81.000 peserta reses untuk 50 anggota DPRD.

Dari jumlah ini reses adalah sumber legitimasi bagi fungsi budgeting, legislasi, dan pengawasan yang dimiliki oleh anggota DPRD. Dan hal ini bisa dijadikan sebagai instrumen pembanding bagi proses perencanaan pembangunan yang dihimpun melalui musrenbang desa (kelurahan), kecamatan, kabupaten/kota, hingga perumusan KUA PPAS yang diajukan oleh eksekutif.

Jika reses dilakukan secara benar, maka usulan dalam reses dapat dipertemukan dengan usulan dalam Musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan). Usulan-usulan tersebut dipastikan akan sama karena berasal dari masyarakat, keterwakilan, dan lokasi yang sama.

Urgensi Reses Partisipatif

Dengan melihat pola pelaksanaan reses yang berlangsung selama ini, Reses Partisipatif menawarkan keuntungan tersendiri bagi anggota DPRD. Misalnya memudahkan anggota DPRD dalam mengidentifikasi persoalan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Selain itu, mampu menjalin komunikasi yang intensif dengan pola partisipatif antara pemilih dengan anggota DPRD.

Melalui Reses Partisipatif juga, diharapkan memudahkan anggota DPRD dalam merawat jaringan tim sukses dan partai yang selama ini mendukungnya. Dan yang terpenting dari semua itu, melalui anggota DPRD dimungkinkan memperbesar alokasi advokasinya, di luar besaran kesepakatan plafon aspirasi yang telah diperjuangkan sehingga advokasi kepentingan konstituen semakin optimal. Muaranya, Reses Partisipatif melahirkan dokumen aspirasi masyarakat yang faktual (data per hari ini), *legitimate* (81.000 peserta per tahun), dan terukur.

Reses Partisipatif, bukan hanya memudahkan capaian kinerja DPRD, tetapi eksekutif juga dapat mengambil manfaat dari pola ini. Pemerintah daerah bisa mendapatkan data primer langsung dari masyarakat terkait dengan aspirasi masyarakat yang telah dihimpun melalui Reses Partisipatif. Sehingga memudahkan sinkronisasi program dan kegiatan yang dihasilkan melalui pendekatan partisipatif-teknokratik dengan pendekatan politis melalui parlemen. Sehingga fungsi saling support dokumen antara keduanya melahirkan perencanaan yang lebih valid melalui partisipasi masyarakat yang lebih besar.

Sedangkan manfaat bagi masyarakat (konstituen) dapat memantau perkembangan aspirasinya melalui wakil-wakilnya. Sehingga mereka dapat mengukur secara langsung wakil masyarakat yang secara sungguh-sungguh mengadvokasi kepentingannya, bisa merasakan kebijakan pembangunan yang tumbuh dari kehendak masyarakat bersama. **(NUR JANAH & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Dana Desa harus dimaksimalkan untuk menjawab persoalan kemiskinan masyarakat, khususnya perempuan
(SRY YULIANA)

Siapakah pertama kali yang didatangi kala perempuan hamil dirundung kesakitan tiada tara? Bukan kepala desa, apalagi kepala lingkungan. Dia adalah kader posyandu (pos pelayanan terpadu). Di tengah kehidupan sosial budaya yang masih membedakan peran gender. Kader lebih banyak disandangkan pada perempuan karena peran kader dikonotasikan sama dengan peran gender perempuan, seperti kader posyandu yang mengurusi bayi, balita (bawah lima tahun), dan perempuan hamil. Data menunjukkan jumlah kader di Lombok Timur sebanyak 7.510 orang yang tersebar di 1.502 posyandu.

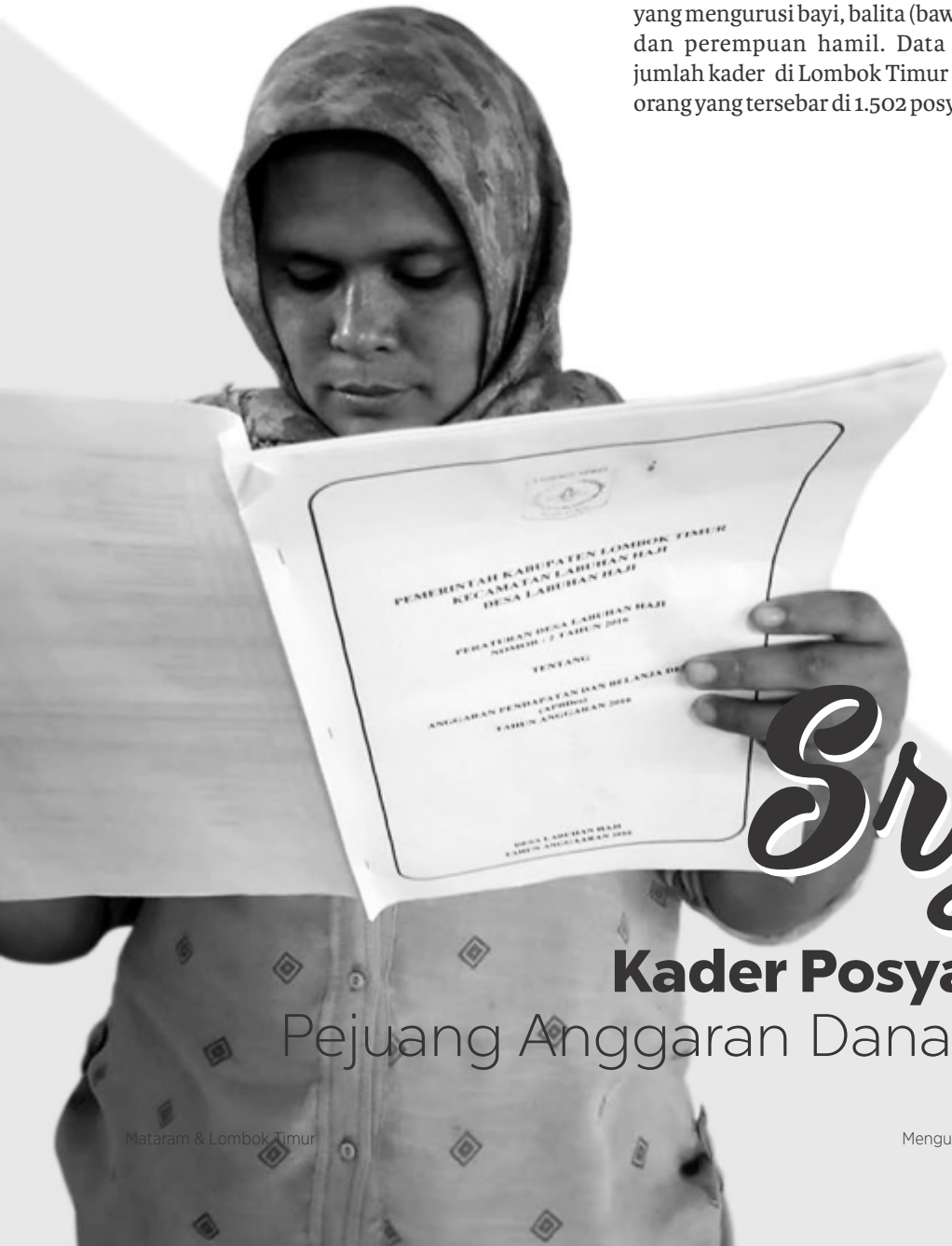

Sry
Kader Posyandu, Pejuang Anggaran Dana Desa

Sry adalah contoh perempuan yang peduli terhadap anggaran. Selama ini pembicaraan mengenai anggaran untuk perempuan dan warga miskin selalu didominasi oleh laki-laki.

Tiap posyandu dikelola lima orang kader. Mereka intens membantu warga mengatasi persoalan kesehatan masyarakat sekitar. Aktivitas mereka antara lain membantu ibu-ibu hamil memeriksakan kesehatannya, memastikan bayi ditimbang dan mendapatkan imunisasi, mendata Pasangan Usia Subur dan sasaran KB, membantu menguruskan surat keterangan miskin sebagai syarat perempuan miskin mendapatkan layanan kesehatan gratis dan lain sebagainya.

Tengah malam buta, Sry Yuliana mendengar dering telepon berkali-kali. Hal itu sering dialaminya tiap hari. Umumnya permintaan ibu melahirkan untuk mendapat pertolongan persalinan. Tapi telepon kali ini diluar dugaanya. Seorang perempuan bersuara lirih menceritakan kondisinya yang mengalami KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), namanya Marsiah (bukan nama sebenarnya). Kepalanya bocor dengan sekujur tubuh biru lebam. Dengan bertindak cepat, Sry—demikian sering dipanggil—mengajaknya ke Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat). Namun dengan berbagai alasan Marsiah menolak untuk ke Puskesmas malam itu.

Dalam keadaan panik, pukul 09.00 Sry kembali berkomunikasi dengan Marsiah untuk mengajaknya kembali ke Puskesmas. Menggunakan jasa ojek, Marsiah memberanikan diri bertemu Sry ke Puskesmas. Petugas pun segera melakukan penanganan. Dengan luka kepala yang cukup dalam, Marsiah menutupnya rapat-rapat, yang kemudian menerima 6 jahitan. Tubuhnya juga tak bisa lagi leluasa bergerak. Tidak ada keluhan sedikitpun terlontar dari mulutnya, hanya airmata isyaratkan lara dirasakannya saat itu. Kejadian serupa bukan sekali dua kali, tapi berulang kali. Sempat dicekik, bahkan dikejar menggunakan parang. Entah kekuatan apa yang membuatnya masih bertahan.

Dengah langkah gontai, Sry merangkul Marsiah menuju Unit PPA (Pelayanan

Perempuan dan Anak) Polres Lombok Timur untuk melaporkan kejadian itu. Sepanjang jalan hatinya berkecamuk, bagaimana seseorang melukai perempuan sedemikian rupa. Apalagi teman hidupnya, suami sendiri. Saban hari perempuan paruh baya itu bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan 3 orang anak dan suami yang tidak memiliki pekerjaan, Marsiah mengais rezeki dari tukang cuci keliling sampai pemecah batu.

Tak kenal waktu, Sry selalu mengunjungi Marsiah sekadar memberikan motivasi dan berbagi semangat. Suami Marsiah sebelumnya pernah mendekam di penjara karena kasus yang sama, KDRT. Tapi akhirnya bebas bersyarat. Tak berselang lama, kekerasan itu kembali terulang. Dengan trauma akibat kekerasan yang dialaminya, Sri Yuliana mendampinginya dengan intensif. Proses peradilan yang panjang mengantarkan pelaku dijerat 4 tahun penjara.

Pengaduan warga semakin banyak dan beragam tiap harinya. Dari kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempun, hingga trafiking. Pemahaman masyarakat yang minim membuatnya memikirkan cara membumikan informasi perlindungan perempuan dan anak. Dia teringat saat sosialisasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dilakukan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI. Bahwa program pemberdayaan perempuan dapat diperjuangkan melalui anggaran dana desa. Belum lagi informasi yang sering didengarnya, besaran anggaran untuk satu desa dari pemerintah pusat mencapai 700 juta rupiah.

Tak menunggu waktu lama, Sry berkoordinasi dengan aparat desa dan PKK. Bersama Kelompok Konstituen (KK) Labuhan Haji, mereka mulai mengikuti Musrenbang (Musyawarah perencanaan pembangunan) secara rutin. Usulan perlunya soliasisasi KDRT, trafiking, kekerasan terhadap anak melalui pendidikan anak dan remajapun disampaikan. Juga usulan peningkatan insentif untuk kader.

Memastikan usulan tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa, lulusan SMA (Sekolah Menengah Atas) ini kembali mendatangi aparat desa. Dia mengakses dokumen Peraturan Desa (Perdes) Labuhan Haji Nomor 2 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016. Dokumen itupun dibacanya dengan teliti. Satu persatu bidang dilihatnya. Melalui bidang pembinaan kemasyarakatan dianggarkan 30 juta rupiah dengan bagian kegiatan sosialisasi Penghapusan KDRT, Trafiking, dan PAR. Serta bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan kegiatan pelayanan kesehatan desa sebesar 37 juta rupian. Jenis belanja untuk pemberian insentif kader sebesar 27 juta rupiah.

Dokumen anggaran desa juga dia diskusikan bersama KK dan kader lainnya. Sebagai Sekretaris KK Labuhan Haji, Sry mengajak lebih banyak aktor peduli anggaran, agar memudahkan langkah advokasi untuk perempuan ke depannya. Tersirat perasaan lega dalam batinnya, walaupun alokasi anggarannya masih kecil. Pengalaman itu membuatnya percaya bahwa, peduli sesama membuat segalanya menjadi mungkin diperjuangkan!!

Sry adalah contoh perempuan yang peduli terhadap anggaran. Selama ini pembicaraan mengenai anggaran untuk perempuan dan warga miskin selalu didominasi oleh laki-laki. Padahal banyak sekali kebutuhan perempuan yang tidak dipahami dan tidak dipikirkan oleh laki-laki. Posyandu, kekerasan terhadap perempuan dan anak, angka kematian ibu, angka kematian anak, adalah beberapa hal yang tidak dipikirirkan oleh laki-laki, apalagi di desa. Sebagai Kader Posyandu dan Sekretaris KK Labuhan Haji, Sry menjadi contoh bahwa, perempuan mampu melihat berbagai hal penting dan strategis untuk direncanakan dan dibiayai. **(NUR JANAH & LUSIA PALULUNGAN)**

Masiah

Penyintas yang Menebar Semangat Hidup

Namanya Masiah, umurnya 33 tahun. Perempuan berperawakan mungil ini adalah salah satu contoh mengenai akses pendidikan yang rendah dan pernikahan di usia muda. Masiah hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan menikah di usia 18 tahun. Artinya, dua atau tiga tahun setelah tamat SMP, Masiah menikah untuk pertama kalinya. Jika Masiah duduk di bangku sekolah hingga menamatkan pendidikan SMA (Sekolah Menengah Atas), kemungkinan Masiah menikah di usia 20 atau 21 tahun. Namun, Masiah sudah menikah untuk kedua kalinya di usia 20 tahun, setelah pernikahan pertama hanya bertahan sekitar 1 bulan.

Orangnya sangat gesit dan tipe perempuan mandiri. Sekilas tidak ada yang menyangka kalau perempuan ini sudah 6 tahun mengindap kanker payudara stadium 4 great B. Kanker payudara stadium 4 merupakan fase dimana sel kanker sudah sangat parah dan ganas. Pada stadium 4 sel kanker mengalami metastasis, yaitu penyebaran sel kanker ke jaringan tubuh yang semakin luas.

Tahun 2010 Masiah merasakan ada yang aneh di sekitar payudaranya, seperti ada benjolan. Masiah penasaran untuk mengetahui keanehan di payudaranya. Dia pun memberanikan diri memeriksakan payudaranya ke Rumah Sakit (RS) Soedjono, Selong, Lombok Timur. Setelah diperiksa, dokter menyarankan agar diambil sampel untuk cek laboratorium. Hasil laboratorium diberikan seminggu lagi. Hari berganti hari, dilewatinya dengan cemas. Apalagi Masiah memiliki seorang anak perempuan yang masih berusia 4 tahun dan suami yang sedang merantau sebagai buruh migran di Malaysia.

Mataram & Lombok Timur

Hidup seorang diri dengan kecemasan. Orang tua sudah meninggal, begitu pula mertuanya. Masiah yang berasal dari Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Lombok Timur pindah ke kampung suaminya, yang asli Pancor, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Dalam kondisi seperti itu, Masiah menunggu hasil laboratorium. Dia bolak-balik rumah sakit menanyakan hasil laboratorium itu. Dengan jawaban yang sama dan terus berulang dari petugas, "hasil tes laboratoriumnya belum keluar, ibu bisa datang seminggu lagi". Hal itu cukup menguras emosinya.

Akhirnya pada Juni 2012, Masiah mendapatkan hasil tes melalui dokter yang memeriksanya. Saat dipanggil perawat, Dia sudah menyiapkan mental untuk menerima apapun hasilnya. Dan pemberitahuan dokter itu sungguh mencengangkan, "ibu terkena kanker payudara".

Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, Masiah bertekad melakukan apapun untuk sembuh. Pada malam harinya, Dia tidak tenang, tidur tidak nyeyak, menunggu pagi agar segera berangkat ke RS di provinsi untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. Pagi buta Masiah melaju tanpa ragu, naik angkot seorang diri. Sampai RSU Provinsi di Mataram masih sepi. Di emperan itu ia menunggu. Menjadi pasien pertama yang mendaftar waktu loket dibuka. Dengan bermodal Jamkesmas (Jaminan kesehatan masyarakat), ia mendapatkan pelayanan yang mengharuskan mendapatkan pengobatan lebih lanjut di RS Sanglah, Denpasar, Bali.

Sebagai perempuan yang hidup sendiri, berangkat ke Sanglah, Denpasar bukan perkara mudah. Menyampaikan ikhwal penyakit yang dideritanya kepada suami yang berada di negeri seberang pun menjadi beban tambahan yang lain. Masiah harus mengumpulkan energi sedemikian rupa untuk menceritakan penyakitnya kepada sang suami. Suaminya yang agamis menganjurkan agar melanjutkan pengobatan dengan catatan istrinya harus dirawat sesama muhrim, "perempuan dilayani/dirawat perempuan". Masiah pun mengiyakan, percuma berdebat kalau sampai menghalanginya berobat.

Menjemput pengobatan yang lebih lengkap di RS Sanglah, Denpasar tidaklah mudah. Dari rumahnya ke terminal Bertais. Dia tempuh dengan naik engkel—sebutan angkutan kota di Lombok—kemudian menuju Pelabuhan Lembar dengan ojek. Dalam perjalanan di atas kapal saat menyeberang, Masiah dihampiri seorang lelaki, supir fuso (truk besar). Terjadilah dialog berikut:

Sopir: *"mau ke mana bu, kenapa sendiri?".*
Masiah: *"ke RS Sanglah, iya saya sendiri saja"*
Sopir: *"siapa yang sakit?"*
Masiah : *"saya sendiri."*
Sopir: *"sakit apa ?"* (dengan perasaan heran, sakit tapi tidak ada yang antar).
Masiah : *"kanker payudara, suami saya sedang di Malaysia. Saya tidak punya keluarga yang mengantar. Kalaupun ada yang mau bantu, saya tidak punya cukup biaya untuk hidup kami selama saya dirawat di sana".*
Sopir: *"oh begitu ya bu, ibu naik apa ke sini?"*
Masiah: *"ngojek."*
Sopir : *"kalau ibu mau, silakan ikut sama saya pake fuso, saya antarkan ibu sampai terminal Ubung".*
Masiah: (dengan perasaan gembira, Dia pun tidak menyia-nyiakan ajakan itu, hitung-hitung ngirit biaya. Dia pun mengiyakan). *"saya mau, terimakasih banyak".*

Menyiasati biaya hidup selama berobat di Denpasar Bali, Masiah kerap menjadi relawan bagi teman-temannya yang sedang menempuh hal yang sama. Menyampaikan informasi tentang cara mengakses layanan adalah salah satu hal yang selalu dilakukannya. Nginap gratis di keluarga teman bagian dari rasa terimakasih yang diperolehnya. Dengan bermodal biaya Rp 3.500.000, uang kiriman suaminya di Malaysia, ia cukupkan untuk segalanya. Mulai dari biaya penjaga anak selama berobat, biaya transportasi, makan, tebus obat, dan lain-lain.

Pada 9 Februari 2015, Masiah merelakan kehilangan payudaranya. Proses operasi pengakatan payudara yang ia jalani seorang diri, tanpa didampingi siapapun. Suaminya kerap menelpon menanyakan keadaanya, dan dokter yang merawat (laki-laki atau perempuan?). Masiah sering tidak jujur kepada suaminya, dengan menyebutkan semua yang merawatnya perempuan. Pasca payudaranya diangkat, Dia

harus menjalani kemoterapi selama 12 kali. Sudah 8 kali Masiah jalani dengan bolak-balik Lombok Timur-Sanglah Denpasar naik omprengan, lagi-lagi seorang diri.

Pada 4 Februari 2016 suaminya kembali dari Malaysia. Masiah bersyukur karena nekad dan tekadnya menjalani pengobatan yang tidak mudah, Tuhan pun membalasnya dengan indah. Masiah diberi waktu bertemu suaminya kembali. Seperti diungkapkannya, "kalau saya tidak nekat, mungkin suami hanya menemukan kuburan, dia kehilangan saya selamanya".

Untuk menebar semangat hidup bagi perempuan penderita kanker payudara lainnya, Masiah bersama KK (Kelompok Konstituen) Pancor sering berkumpul berbagi cara, daya, dan upaya menghadapi kondisi itu. Masiah memberikan motivasi agar penderita menempuh jalur medis untuk penyembuhan. Bagi perempuan lain yang tidak terkena kanker payudara, Masiah menyarankan agar menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat, menurut Masiah adalah cara ampuh mencegah kanker payudara. Masiah selalu menyampaikan: jauhi rokok, konsumsi

Masiah adalah contoh penyintas *(survivor)* kanker payudara yang menjadi motivator. Dia tidak meratapi penderitaannya, tetapi menjadi contoh dan teladan bagi perempuan-perempuan lain untuk selalu kuat dan bangkit. Masiah selalu yakin bahwa, kehidupan, sekecil apapun kemungkinannya layak untuk diperjuangkan.

Keberadaan Masiah menjadi anggota KK Pancor menjadi berkah bagi perempuan dan KK tersebut. Sebagai kelompok yang didorong pembentukannya oleh Sub Office BaKTI NTB untuk Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), KK telah menjadi lembaga yang mengadvokasi kepentingan perempuan sekaligus menjadi tempat belajar bagi perempuan. Tekad Masiah untuk berbagi dengan perempuan yang lain mengenai Kanker Payudara patut diapresiasi. Masiah telah menjadi contoh dan mau menjadi "guru" bagi perempuan dalam menghadapi dan menyembuhkan Kanker Payudara.

(NUR JANAH & M. GHUFRAN H. KORDI K.)

Kolaborasi dalam Advokasi dan Pemberdayaan

Pihak yang mendorong Perda kadang hanya bekerja sendiri untuk mendapatkan klaim, tidak pada tujuan yang lebih visioner, untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Klaim sebagai hasil kerja individu atau lembaga, biasanya menenggelamkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU), Yayasan BaKTI fokus pada perubahan kebijakan dan akses perempuan miskin pada layanan sosial pemerintah.

Untuk mendorong kebijakan di daerah, Yayasan BaKTI dan mitra di daerah menggunakan pendekatan yang cukup rumit dan panjang, namun strategis. Pengalaman sebelumnya mengajarkan bahwa, banyak sekali kebijakan yang didorong dan melahirkan berbagai peraturan daerah (Perda) atau kebijakan lebih rendah, tidak dapat diimplementasikan. Banyak sekali Perda tidak pernah diimplementasikan, atau ada Perda yang kemudian dibatalkan oleh pemerintah pusat.

Perda-Perda tersebut, sebagian dibuat oleh konsultan, sebagian didorong oleh masyarakat sipil, termasuk dalam program-program tertentu, namun oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) tidak memahami substansi secara baik. Setelah itu, Perda pun tidak mempunyai aturan implementasi.

Pihak yang medorong Perda kadang hanya bekerja sendiri untuk mendapatkan klaim, tidak pada tujuan yang lebih visioner, untuk kepentingan masyarakat dan daerah. Klaim sebagai hasil kerja inidvidu atau lembaga, biasanya menenggelamkan kepentingan masyarakat dan daerah.

Berkolaborasi dengan Mitra Lain

Karena itu, Yayasan BaKTI dan mitra di daerah tidak melakukan advokasi sendiri, tetapi melibatkan mitra lain di daerah. Di Kabupaten Lombok Timur, Kantor *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB, bekerjasama dengan beberapa mitra dalam mendorong Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kantor *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB merupakan pendorong utama Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Untuk memperkuat dukungan, maka *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB bekerjasama dengan anggota DPRD perempuan dan anggota DPRD

laki-laki yang merupakan *"champion"*. Mitra lainnya adalah Forum Media di Kabupaten Lombok Timur, yang terus-menerus memberitakan proses pembahasan Perda tersebut.

Perda Penyelenggaraan Pendidikan sebelumnya merupakan inisiatif dari DPRD kemudian tidak pernah dibahas anggota DPRD periode sebelumnya. Selama tiga tahun Perda tersebut menjadi dokumen "mangkrak" di Kantor DPRD Lombok Timur. Macetnya Perda tersebut, selain karena kemampuan legislasi anggota DPRD yang rendah, juga terkait dengan ketiadaan mitra strategis yang mendukung DPRD untuk mengisi konten Perda.

Karena itu, *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB mendorong pembahasan Perda tersebut, tetapi dengan catatan, melihat kembali isi dari Perda agar sesuai dengan kebutuhan, dan memasukkan isu-isu Program MAMPU, yang telah mempunyai kertas posisi *(position paper)*, yang berasal dari *assessment* mendalam di masyarakat.

Selain itu, mitra Program Peduli yaitu SANTAI (Yayasan Tunas Alam Indonesia) dan SAMANTA, serta LPSDM yang merupakan mitra KAPAL Perempuan, juga terlibat penuh dalam proses bersama selama pembahasan Perda. SANTAI, SAMANTA dan LPSDM, terlibat sejak awal proses pembahasan Perda ini, hingga pengesahan Perda. SANTAI juga membuat forum dengan mengundang *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB dalam membahas isi Perda tersebut.

Sejak didorong oleh *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB yang bekerjasama dengan SANTAI, SAMANTA dan LPSDM, Perda ini mendapat perhatian yang memadai dari DPRD Lombok Timur dan SKPD terkait. Selain aksi bersama oleh dua program besar yang mendorong kebijakan ini, perhatian media massa dalam pembahasan Perda cukup tinggi. Ini dilihat dari pemberitaan media yang intensif mengenai Perda ini.

Setelah disahkan pada 2016, SANTAI, yang merupakan salah satu mitra Program peduli menggunakan kebijakan tersebut untuk advokasi anak-anak buruh migran melalui anggaran desa. Apa yang dilakukan oleh SANTAI merupakan hal yang sangat positif dalam berkolaborasi untuk aksi bersama dalam

membuat kebijakan. Sebagai mitra Program Peduli, Staf-staf SANTAI juga memberi informasi mengenai respon pihak-pihak terkait dengan Perda ini.

Sementara itu, Program KOMPAK melibatkan Kelompok Konstituen (KK) dalam assessment mengenai identitas hukum *(legal identity)*. KK yang merupakan mitra dan jaringan *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB pun mendapat kepercayaan dan membangun jaringan yang lebih luas. Pelibatan KK adalah bentuk lain dari kolaborasi yang melibatkan masyarakat. Apalagi pengurus KK adalah inividu-individu yang terlibat penanganan kasus dan advokasi untuk pelayanan publik.

Melibatkan Masyarakat

Perda Penyelenggaraan Pendidikan di Lombok Timur adalah contoh mengenai pembuatan kebijakan yang melibatkan publik yang luas. Anggota DPRD perempuan dan anggota DPRD laki-laki *"champion"*, termasuk Ketua DPRD Lombok Timur, membawa isu Perda ini ketika melakukan reses. Dengan demikian, masyarakat luas mengakses dan memberi masukan untuk Perda.

Sementara *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB, SANTAI, SAMANTA, dan LPSDM, mensosialisasikan draft Raperda kepada mitra hingga masyarakat. Kelompok Konstituen (KK) yang merupakan mitra dan jaringan *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB ikut memberi masukan pada draft Raperda. Pada konsultasi publik, mitra-mitra MAMPU BaKTI NTB, SANTAI, SAMANTA, dan LPSDM mendapat kesempatan memberi masukan sesuai dengan kebutuhan.

Pelibatan masyarakat yang luas sangat strategis, karena media massa mempunyai banyak narasumber dalam memberitakan pembahasan mengenai Perda ini. Perhatian media dengan memberitakan pembahasan Perda inilah, yang membuat pihak DPRD dan SKPD fokus dan mempercepat pembahasan sehingga tidak tertunda lagi seperti sebelumnya.

Membuat Kebijakan sesuai Kebutuhan

Perda Penyelenggaraan Pendidikan dibuat berdasarkan kebutuhan yang muncul di masyarakat. Permasalahan pendidikan di Lombok Timur harus diatasi dengan kebijakan dalam bentuk Perda untuk meningkatkan perhatian pemerintah kabupaten terhadap pendidikan, baik akses terhadap pendidikan, maupun kualitas pendidikan.

Beberapa permasalahan yang dihimpun KK dan menjadi bahan diskusi dalam pembahasan Perda antara lain, sekolah mengeluarkan siswa, khususnya perempuan jika dihadapkan persoalan moralitas, misalnya kenakalan. Sekolah juga mengeluarkan siswa perempuan yang menikah. Demikian juga masalah akses bagi wilayah-wilayah yang jauh, dan hak-hak anak-anak penyandang disabilitas.

Karena itu, Perda ini memuat hal-hal strategis, seperti akses pendidikan, pendidikan untuk anak-anak buruh migran, kesetaraan gender, kesehatan reproduksi, pendidikan non formal, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Tahun ini 2017, dimulai pada bulan Februari ini akan disusun Peraturan Bupati (Perbup) untuk implementasi Perda Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam pembahasan Perbup untuk Perda tersebut, pihak SKPD, dalam hal ini Dinas Pendidikan Lombok Timur, telah berkoordinasi dan akan melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan Perda, dalam hal ini *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB, SANTAI, SAMANTA, dan LPSDM.

Walaupun Perda tersebut belum memiliki Perbup sebagai turunan untuk implementasinya, namun Perda tersebut telah didesiminasi oleh *Suboffice* MAMPU BaKTI NTB, SANTAI, SAMNTA, dan LPSDM. KK di Lombok Timur juga aktif mensosialisasikan Perda tersebut kepada masyarakat.

Ini merupakan kemajuan dan contoh baik bagi kolaborasi untuk advokasi. Perda ini tidak dilihat lagi sebagai siapa yang menginisiasi dan mendorong, tetapi bagaimana mengimplementasikan Perda ini untuk kepentingan masyarakat Lombok Timur. **(M. GHUFRAN H. KORDI K. & NUR JANAH)**

KABUPATEN

TANA TORAJA

Mitra

Yayasan Kombongan Situru (YKS)

Perlindungan Sosial bagi **Warga Miskin**

Pada awal pemekaran, warga di Lembang Lemo tidak mendapatkan sama sekali Program Perlindungan Sosial termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Rastra (beras sejahtera).

Bagi warga miskin, perlindungan sosial dari negara adalah sesuatu yang sangat mahal dan terlampau rumit.Selain ketidakberdayaan warga miskin di tengah masyarakat dan pemerintah, warga miskin juga menghadapi situasi bernegara yang menempatkan mereka sebagai kelompok rentan yang harus mengurus dirinya sendiri. Negara sering kali tidak hadir ketika warga miskin mencari perlindungan.

Aparat birokrasi pemerintah yang merupakan representasi dari negara juga menempatkan diri bukan sebagai pelayan. Karena itu, warga miskin harus didorong untuk aktif dalam mengakses layanan yang disediakan oleh negara. Warga miskin perlu disadarkan bahwa hak-hak mereka sebagai warga negara ada pada negara/pemerintah. Namun, sebagai warga negara, mereka harus berusaha untuk memperolehnya.

Sebagai contoh kasus di Lembang (Desa) Lemo. Di Lembang ini, warga yang sadar dan mengorganisasikan diri, tidak tinggal diam ketika mereka tidak mendapat perlindungan sosial dari negara. Warga berinisiatif melakukan upaya-upaya secara terencana melalui saluran yang tersedia, sehingga dapat memperoleh layanan dari negara.

Lembang (Desa) Lemo, di Kecamatan Makale Utara, Tana Toraja termasuk salah satu desa pemekaran. Pada awalnya Lembang Lemo masuk dalam wilayah administratif Kelurahan Salira. Pada awal pemekaran, warga di Lembang Lemo tidak mendapatkan sama sekali Program Perlindungan Sosial termasuk Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Sejak tahun 2012, warga di Lembang Lemo juga tidak mendapatkan Rastra (beras sejahtera), padahal banyak warga di bawah garis kemiskinan. Dan masalah ini telah disampaikan beberapa ke pemerintah, terutama Kepala Lembang dan Camat. Namun, belum ada hasil yang menggembirakan.

Walaupun demikian, warga desa tidak pernah kecewa. Mereka tetap berusaha untuk menyampaikan dengan berbagai cara. Akhirnya, pembentukan Kelompok Konstituen (KK) di Lembang Lemo, yang diberinama KK Lemo memberikan harapan, walaupun itu harus dilalui secara berliku dan membutuhkan waktu. Namun, semangat warga patut diakui.

Pada Juli – Agustus 2015, setelah kegiatan pembentukan Kelompok Konstituen (KK), salah satu kegiatan dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) fase 1 adalah kegiatan Mentoring dan TA (Technical Assistance) ke KK yang di awali dengan pelatihan bagi staf internal Yayasan Kombongan Situru' (YKS), mitra daerah Yayasan BaKTI untuk pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Tana Toraja. Setelah pelatihan untuk staf YKS, pelatihan lanjutan untuk pengurus KK, termasuk untuk mengenalkan tema-tema MAMPU.

KK Lemo dibentuk atas dukungan Program MAMPU, namun format dan kepengurusan KK diserahkan kepada warga. Yang menjadi

prinsip adalah organisasi ini adalah untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perempuan miskin. Karena itu, kepengurusan dan keanggotaan KK harus merupakan representasi dari perempuan. Dengan kata lain, organisasi ini dibentuk oleh perempuan dan untuk perempuan. Namun, kepengurusan dan keanggotannya harus melibatkan laki-laki.

Setelah pelatihan tersebut, pada bulan Agustus - September 2015 kemudian disusunlah agenda kegiatan *Focus Group Discussion (FGD)* oleh Program Asisten (waktu itu masih menggunakan istilah PA) dan pengurus KK dengan masyarakat yang ada di Lembang Lemo. Hasil dari FGD tersebut, terpetakan persoalan bahwa, masyarakat Lembang Lemo belum tersentuh dengan program Perlindungan Sosial, karena selama ini data administrasi penduduk masih mengikut pada desa induk yang lama.

Melihat persoalan tersebut, PA dan KK menyusun agenda advokasi untuk menghubungkan warga dengan layanan perlindungan sosial. Penyusunan agenda diperlukan agar advokasi dilakukan secara terencana. Memetakan pihak-pihak yang akan mendukung advokasi juga diperlukan untuk mempercepat pencapain target.

Yang pertama dilakukan adalah, melakukan penyuratan kepada Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kesehatan (Dinkes)

Kabupaten Tana Toraja, untuk menyampaikan kondisi faktual di Lembang Lemo. Akhirnya, kedua dinas tersebut menurunkan tim untuk melakukan pendataan, dan hasil pendataan tersebut adalah 523 warga Lembang Lemo belum memiliki KIS.

Selanjutnya dilakukan penyuratan kepada kepala Lembang tentang hasil FGD termasuk persoalan Program Perlindungan Sosial dan hasil pendataan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Atas surat tersebut, kemudian disepakati bersama dengan Kepala Lembang untuk menyusun dokumen aspirasi warga.

Dokumen aspirasi warga berisikan berbagai permasalahan sosial, terutama perlindungan sosial mendesak yang harus diatasi, dan salah satunya adalah perlu percepatan pemberian KIS kepada warga miskin. Dokumen disusun dan didiskusikan oleh KK dan diasistensi oleh PA dari YKS.

Dokumen aspirasi warga kemudian dikirim ke kecamatan dengan tembusan kepada Kepala Lembang. Dokumen tersebut direspon positif oleh Camat dan Kepala Lembang, karena warga telah menyampaikan aspirasinya secara tertulis, dengan data-data lengkap sesuai dengan kondisi di lapangan.

Pada saat pertemuan semua KK (25 KK), dokumen aspirasi warga dari Lembang Lemo dijadikan dokumen aspirasi KK. Dokumen aspirasi kemudian disampaikan pada saat dengar pendapat atau hearing dengan DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Tana Toraja yang juga dihadiri oleh OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Dokumen aspirasi juga disampaikan kepada Bupati Tana Toraja.

Hasil hearing ke DPRD kemudian ditindaklanjuti oleh anggota parlemen perempuan (APP), ibu Yosepine, anggota DPRD yang daerah pemilihannya termasuk Lembang Lemo. Ibu Yosephine berjanji akan yang mengawal kegiatan proses ini, terutama yang terkait dengan validasi data pada Dinsos dan Dinkes. Dan progresnya akan disampaikan kepada KK dan YKS.

Selain itu, dukungan media dalam memberitakan persoalan ini juga memberi pengaruh yang besar, sehingga ini menjadi perhatian pemerintah Tana Toraja. Beberapa jurnalis mewawancarai warga, KK, dan YKS untuk mendapatkan informasi mengenai persoalan ini.

Dukungan media dalam pemberitaan merupakan hal positif. Narasumber berita juga terdiri dari warga dan pengurus KK. Ini menunjukkan bahwa jurnalis pun mempertimbangkan narasumber perempuan, sehingga ada suara perempuan yang tertulis di media. Pemberitaan ini selain berguna untuk warga di Lembang Lemo, juga warga lain di Tana Toraja.

Akhirnya, setelah perjuangan panjang sekitar 3-4 bulan, pada Februari 2016, masyarakat di Lembang Lemo Kecamatan Makale Utara berhasil mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Kabupaten Tana Toraja sebanyak 523 Kartu yang dapat dipergunakan untuk Perlindungan Sosial bagi warga miskin. Kartu ini diserahkan langsung oleh Pejabat Bupati Tana Toraja saat itu H.M. Jufri Rahman. **(M. TAUFAN & LENYNDA TONDOK)**

Membagi Keterampilan untuk Maju Bersama

Dorche Ramma Songga, sering dipanggil Oche, adalah Ketua Kelompok Konstituen (KK) Tiromanda. KK adalah organisasi komunitas yang dibentuk untuk menghubungkan konstituen dengan wakilnya di parlemen. Namun, KK juga diperkuat untuk menjadi organisasi yang mampu mengorganisasikan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pengurus dan anggota KK terdiri dari elemen masyarakat di desa dan kelurahan, yang mayoritas adalah perempuan.

Pembentukan KK didorong oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Yang khas dan spesifik dari KK adalah pengurus dan anggota yang sebagian besar perempuan dan perempuan miskin.

KK diharapkan mengorganisasikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, terutama perempuan dan perempuan miskin, yang selama ini terpinggirkan dalam kebijakan. Pengorganisasian kebutuhan dan kepentingan masyarakat dilakukan melalui prosedur dan tata aturan yang berlaku, baik melalui parlemen (legislatif) maupun eksekutif.

Harapan lainnya adalah, KK dapat menjadi lembaga untuk membantu warga dalam melakukan advokasi dan mendampingi dalam membela hak-haknya. Di samping itu, dapat menjadi tempat untuk berbagai pengalaman, keterampilan, belajar bersama, dan sebagainya.

Oche yang dipilih menjadi KK Tiromanda yang memiliki keterampilan menganyam manik-manik, menjadikan KK sebagai wadah untuk membagi keterampilannya tersebut kepada kelompok dan warga yang mau belajar.

Keterampilan Oche diperolehnya dari Albertin Sule sejak Agustus tahun 2009. Albertin adalah tetangga Oche yang mempunyai keterampilan menganyam. Ochelah yang mengusulkan kepada Albertin untuk melatih ibu-ibu di sekitarnya, agar keterampilan tersebut dapat disebarkan, sekaligus dapat bermanfaat ekonomi bagi ibu-ibu.

Albertin dengan senang hati menerima ajakan Oche. Menurut Oche, "saya beruntung belajar menganyam dari ibu Albertin. Saya ngobrol dengan ibu Albertin dengan ibu-ibu tetangga, kemudian kami sepakat untuk belajar menganyam dari ibu Albertin. Saat itu saya berpikir perlu ada kegiatan untuk ibu-ibu, karena waktu ibu-ibu yang banyak lowong, agar waktu itu tidak terbuang percuma. Harapan saya, kalau ibu-ibu itu punya kegiatan, siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu."

Oche kemudian membuat kesepakatan dengan Albertin untuk melatih ibu-ibu membuat manik-manik. Ibu-ibu yang ingin belajar, sepakat untuk menyiapkan alat dan bahan. Pelatihan dilakukan secara sederhana di rumah Albertin, rumah Oche, atau rumah ibu-ibu yang lain.

Setelah belajar dari Albertin, beberapa peserta belajar mulai membuat manik-manik dapat dijual. Melihat perkembangan itu, makin banyak ibu-ibu yang belajar. Albertin pun semangat untuk terus mengajarkan kepada mereka yang mau belajar. Sementara itu, Oche mengusulkan kepada ibu-ibu untuk membentuk kelompok. Harapannya, agar dapat mengorganisasikan ibu-ibu dalam memroduksi dan memasarkan manik-manik tersebut.

Ibu-ibu pun bersepakat membentuk kelompok pengrajin yang diberinama

Siangkaran Buntu Borong di Kelurahan Tiromanda. Kelompok ini berkembang tidak terlalu pesat, namun tetap bertahan. Lalu pada tahun 2014, Yayasan Kombongan Situru (YKS) melalui Program MAMPU mendukung pembentukan KK Tiromanda.

Pembentukan KK Tiromanda menjadi awal yang baik bagi ibu-ibu, tidak hanya ibu-ibu yang bertetangga dengan Albertin dan Oche, tetapi juga ibu-ibu yang bermukin di lembang (desa) atau kelurahan lainnya. keterampilan Albertin juga dapat menyebar ke ibu-ibu lain, yang sebelumnya hanya dimiliki oleh Albertin seorang diri.

Melalui KK Tiromanda, Albertin dan Oche semakin memperluas pelatihan menganyam untuk membuat manik-manik. Dua KK yang juga belajar menganyam adalah KK Buda, Lembang Buntu Datu, dan KK Santom di Kelurahan Tosapan.

Pelatihan tersebut didukung pendanaan dari Alokasi Dana Desa/Lembang (ADL) dari masing masing lembang. Awal mulanya Oche diminta untuk melatih kedua KK tersebut ketika Program MAMPU Yayasan BaKTI melaksanakan kegiatan Training of Fasilitator (ToF) Penanganan Pengaduan. Saat itu, Oche memperkenalkan kerajinan menganyam manik-manik dan bersedia melatih anggota kelompok.

Lalu KK Buntu Datu dan KK Santom mengusulkan anggaran untuk biaya pelatihan dalam Musrenbang di lembang/kelurahan masing-masing dan disetujui melalui Alokasi Dana Desa/Lembang (ADL). Ketua KK Buntu Datu dan KK Santom kemudian menghubungi Oche untuk menyiapkan pelatihan. Lalu Oche menemui Albertin untuk melatih kedua KK tersebut.

Albertin dan Oche melatih ibu-ibu dari dua KK dengan menggunakan dana dari ADL. Saat ini KK Buntu Datu dan KK Santom sudah mulai menghasilkan dan memasarkan barang kerajinan mereka.

Manik-manik merupakan bahan kerajinan berbentuk butiran bulat kecil dan berwarna–warni, memiliki lubang pada bagian tengahnya. Tidak sulit mendapat manik-manik karena beberapa toko menjual bahan ini, seperti di Makassar, Jakarta, maupun di daerah kalimatan dan di daerah lainnya. Masyarakat di daerah Kalimantan banyak juga membuat anyaman yang terbuat dari manik-manik. Anyaman Manik–manik, khususnya di Tana Toraja, dapat dibentuk menjadi "Kandaure, Sepu' (semacam tas), gelang, rantai dan berbagai jenis perhiasan perempuan" yang biasa dipakai pada acara-acara kebudayaan di Toraja.

Ketika sudah dibentuk menjadi barang jadi, harganya cukup mahal, bisa mencapai jutaan rupiah, tergantung dari kreasi barangnya dan kualitas kerjanya. Menganyam manik-manik membutuhkan ketekunan, kesabaran, ketelitian, kerapihan dan daya cipta (kreasi) yang tinggi untuk menghasilkan bentuk barang yang bernilai tinggi.

Kebutuhan anyaman manik-manik di Toraja (Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara), maupun di luar Toraja cukup tinggi sehingga tidak sulit memasarkan. Peluang usaha, khususnya bagi perempuan, melalui kerajinan manik-manik memiliki prospek cukup baik untuk mendukung peningkatan pendapatan rumah tangga.

Yang perlu diberi catatan adalah, pengetahuan dan keterampilan seseorang sebagaimana yang dimiliki oleh Albertin menjadi bermanfaat, karena ajakan orang lain untuk membaginya. Adalah Oche yang mengajak Albertin untuk mengajarkan keterampilannya pada ibu-ibu yang lain. Albertin menyambut ajakan dari Oche, tanpa mengurangi pengetahuan dan keterampilan yang dimiliknya.

Di sisi lain, diperlukan dukungan pengorganisasian, agar pengetahuan dan keterampilan seseorang dapat dibagikan, sehingga lebih bermanfaat. Pengorganisasian dalam bentuk kelompok atau organisasi juga sangat diperlukan untuk memperkuat posisi tawar bagi masyarakat, baik dalam memengaruhi kebijakan setempat maupun dalam memasarkan hasil-hasil produksi.

(MATIAS & M. GHUFAN H. KORDI K.)

Masyarakat Miskin **Mengakses Dana Desa**

Salah satu sumber dana untuk pembangunan desa setelah pengesahan Undang-Undang Desa (UU No. 6/2014) adala Dana Desa dari pemerintah pusat. Dana Desa diperuntukkan bagi pelaksanaan pembangunan di desa pada dalam semua aspek, pemberdayaan masyarakat (peningkatan sumber daya manusia, serta ekonomi) dan pembangunan insfrastruktur, dalam kerangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air sehingga pembangunan yang berkeadilan tidak menjadi slogan semata.

Dana Desa diharapkan dapat menjadi sumber ekonomi yang tidak hanya dikuasai oleh elit dan Pemerintah Desa, tetapi dapat memberdayakan masyarakat desa, termasuk masyarakat miskin dan perempuan miskin. Masyarakat miskin, terutama perempuan miskin masih diabaikan dalam setiap kebijakan pembangunan, termasuk pembangunan desa.

Lembang (nama lain dari Desa) Buntu Datu adalah salah satu dari 15 Lembang wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) di Kabupaten Tana Toraja. Mitra Yayasan BaKTI pada Program MAMPU di Kabupaten Tana Toraja adalah Yayasan Kombongan Situru (YKS).

Salah satu yang dikembangkan pada Program MAMPU adalah pengorganisasian masyarakat dalam mengadvokasikan hak-haknya. Pembentukan Kelompok Konstituen (KK) dimaksudkan untuk memperkuat

Kabupaten Tana Toraja

masyarakat dalam advokasi, baik ketika berhubungan dengan wakil mereka di parlemen, maupun dengan pihak eksekutif.

Di Lembang Buntu Datu dibentuk KK Buntu Datu yang disingkat KK Bunda. Pengurus dan keanggotaan KK Buntu Datu terdiri dari berbagai wakil masyarakat, termasuk warga misikin, perempuan, dan perempuan miskin. Karena komposisi perwakilan seperti itulah, maka KK menjadi penting bagi Pemerintah Lembang.

Keterwakilan perempuan dan perempuan miskin dalam suatu organisasi, termasuk di tingkat desa atau kelurahan diperlukan. Jika perempuan dan perempuan miskin mempunyai wakil di dalam kelompok-kelompok, maka ketika mereka dilibatkan dalam perencanaan pembangunan, mereka akan membuat usulan-usulan sesuai dengan kebutuhan perempuan dan anak, yang selama ini diabaikan oleh laki-laki.

Mengakses Dana Desa melalui Musyawarah Lembang (Desa)

Musyawarah Lembang pernah membahas agenda tentang Dana Desa. Kepala Lembang menjelaskan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Untuk optimalisasi pemanfaatan Dana Desa, khususnya untuk program pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa/Lembang bersama Badan Permusyaratan Desa (Lembang) Buntu Datu melaksanakan Musyawarah Lembang (Muslem) pada tanggal 21 November 2016, bertempat di Kantor Lembang Buntu Datu dengan mengundang para Kepala Kampung dan tokokh-tokoh masyarakat, serta kelompok – kelompok masyarakat yang ada di wilayahnya, di antaranya adalah KK Bunda.

Dalam Muslem, Kepala Lembang menyampaikan "seperti yang pernah saya jelaskan dalam Muslem yang lalu bahwa Dana Lembang atau Dana Desa, sesuai dengan aturannya, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Untuk penggunaan Dana Lembang di bidang pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kelompok, karena itu setiap masyarakat yang mau terlibat dalam program pemberdayaan harus menjadi anggota kelompok. Saya berharap semua masyarakat

menjadi anggota kelompok, lalu kita bersama-sama mengawal program pemberdayaan ini sehingga manfaatnya bisa dirasakan semua masyarakat. Untuk mendapat bantuan, kelompok wajib mengajukan usulan dan membuat proposal dan anggaran, sederhana saja tetapi harus jelas apa kegiatannya dan berapa anggarannya serta siapa saja anggotanya. Kelompok – kelompok yang terbentuk harus disahkan oleh Pemerintah Lembang karena hal ini terkait dengan penggunaan uang negara, jangan sampai bantuan–bantuan yang diberikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau ini terjadi maka kami Pemerintah Lembang akan mendapat masalah. Jadi segera bentuk kelompok dan bikin proposal, minta bantuan kepada kelompok yang sudah berpengalaman untuk membuat proposal."

KK Bunda Mengakses Dana Desa

Pembentukan KK Bunda disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Lembang Buntu Datu dengan ketuanya Venny Thomas Tatto, yang juga terpilih sebagai Ketua Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) Cabang Tana Toraja dalam pemilihan pengurus tanggal 3 Desember 2016.

Dengan terbitnya SK Kepala Lembang maka segala aktivitas dan program/kegiatan kelompok senantiasa dikoordinasikan kepada Pemerintah Lembang. Dengan tercatatnya KK Bunda sebagai organisasi resmi di Lembang Buntu Datu dan kegiatan yang dilaksanakan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat maka Pemerintah Lembang melibatkan dalam berbagai kegiatan Pemerintah Lembang, seperti kegiatan Musrembang, Musdes dan rapat-rapat lembang lainnya.

Dalam mengakses Dana Desa, KK Bunda membuat usulan melalui Proposal narasi dan Anggaran, sekalipun masih sederhana namun sudah menjelaskan mengenai rincian kegiatan yang akan dilakukan, apa tujuan dan manfaatnya, bagaimana melakukan, siapa saja yang terlibat dan berapa orang, dimana dilakukan, kapan waktunya, apa saja yang dibiayai dan berapa besar anggarannya.

Proposal diverifikasi terlebih dahulu sebelum disetujui, lalu kelompok mengawal proses dari usulan mereka dengan menanyakan apakah ada dokumen yang belum lengkap atau adakah masalah dengan proposal yang diusulkan. Memang sangat penting mengawal sesuatu yang diperjuangkan agar bisa berhasil, terutama untuk mengetahui apa kendala dan hambatannya sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Hal ini disampaikan oleh Ketua KK Bunda, Venny, yang telah berpengalaman dua kali mengawal usulan kegiatan untuk mengakses Dana Desa, yaitu Pelatihan Tata Rias dan Pelatihan Pembuatan Anyaman Manik-manik dan Pembuatan Kue Khas Toraja (kuliner).

Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi kelompok perempuan di desa, sebagaimana yang dilakukan oleh KK Bunda, sangat besar manfaatnya dalam menciptakan usaha produktif sebagai sumber pendapatan rumah tangga dan kelompok. Hal sudah dirasakan oleh masyarakat di Lembang Buntu Datu yang mengikuti pelatihan keterampilan, di mana mereka sudah memulai mengelola usaha membuat anyaman manik-manik, baik secara berkelompok maupun perorangan.

"Dana Desa memang untuk masyarakat desa dan apabila dikelola secara transparan, jujur, dan adil maka akan sangat besar manfaatnya dan terarah dengan baik terutama bagi Masyarakat Miskin". Namun untuk itu perlu mengajukan usulan dalam Musrenbang karena semua kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Desa harus masuk dalam APBDes (APB Lembang) yang melalui proses perencanaan di tingkat desa/lembang dengan membuat proposal oleh kelompok", demikian dikatakan oleh Venny Tatto.

Ketika kelompok-kelompok diberi kesempatan untuk mengakses Dana Desa, dan peruntukkan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Desa, maka akan sangat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat. Akses Dana Desa oleh KK Bunda telah memberikan dukungan dana bagi peningkatan keterampilan bagi anggota KK, yang sebagiannya merupakan perempuan miskin. **(MATIAS & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Dana Desa untuk Pertanian Berkelanjutan

Sistem pertanian yang menggunakan pupuk berbahan kimia dan pengendalian hama dengan pestisida adalah, sistem pertanian yang tidak ramah terhadap lingkungan. Beban tanah karena bahan kimia terus bertambah, yang semakin membuat tanah kering dan tidak subur. Di pihak lain, penggunaan pestisida yang terus-menerus menyebabkan lahirnya generasi hama dan penyakit yang kebal terhadap bahan-bahan kimia.

Bahan kimia yang digunakan tidak dimudah terurai sehingga akan terbawa air hujan masuk ke sungai dan sumber-sumber air yang lain, yang seterusnya terbawa hingga ke pesisir pantai. Sumber air baku yang diolah untuk air minum pun tidak terbebas dari bahan-bahan kimia yang masuk ke dalam perairan yang terbawa oleh air hujan.

Di daerah pesisir pantai, bahan-bahan kimia yang terangkut dari aliran sungai masuk ke pesisir, yang tidak hanya membunuh kehidupan biota di pesisir, tetapi mencerami perairan pesisir yang merupakan sumber air untuk perikanan, khsusunya budi daya ikan dan udang di tambak.

Hasil pangan dari pertanian berbasis bahan kimia pun tidak aman untuk konsumsi. Bahan kimia terakumulasi dalam makanan yang diproduksi dengan penggunaan bahan kimia tanpa kendali. Berbagai penyakit yang diderita manusia, di antaranya berasal dari bahan pangan yang dikonsumsi, yang diproduksi dengan cara yang tidak sehat dan tidak aman untuk lingkungan.

Karena itu, masyarakat yang sadar kesehatan dan sadar lingkungan menganjurkan pengembangan pertanian berbasis alami, yang dikenal sebagai pertanian alami. Pertanian alami adalah suatu bentuk pendekatan pertanian berwawasan lingkungan dengan mengandalkan bahan-bahan dari tanaman yang tersedia di sekitar lingkungan masyarakat.

Pertanian alami memungkinkan masyarakat/petani menyediakan sendiri pupuk dan pestisida sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya untuk menghasilkan bahan pangan yang sehat untuk dikonsumsi dengan biaya produksi murah.

Pupuk organik tidak kalah efektifnya dengan pupuk kimiawi, bahkan kelebihan pupuk alami memperbaiki struktur dan tekstur tanah (gembur, memperbanyak mikro organisme penghasil nutrisi tanah, menyimpan air lebih banyak, dan lain sebagainya).

Mengingat betapa besarnya manfaat pertanian alami, baik untuk kesehatan maupun dari aspek biaya dan kemudahan untuk memperolehnya, karena dibuat sendiri, maka lebih cocok untuk diterapkan oleh petani di lahan pertaniannya. Untuk itu, maka petani perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan mengolah pupuk dan pestisida alami serta aplikasinya di lahan. Pertanian alami perlu dimasyarakatkan ke semua lembang (desa) dengan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Kabupaten. Pemerintah dan masyarakat lembang dan secara mandiri dapat merencanakan kegiatan dan anggaran melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) di semua tingkatan.

Dengan adanya Dana Desa yang digelontorkan oleh Pemerintah Pusat ke lembang, maka pemerintah dan masyarakat lembang dapat melakukan kegiatan inovatif di berbagai bidang, terutama bidang pertanian yang banyak digeluti oleh masyarakat di lembang/desa sebagai mata pencaharian utama.

Pada dasarnya masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan-kegiatan inovatif, namun mereka belum didukung dengan dana dan keterampilan yang memadai. Dengan adanya dana desa maka masyarakat/petani memiliki kesempatan/peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka.

Pertanian alami merupakan suatu bentuk kegiatan inovatif di lembang/desa yang manfaatnya sangat besar, baik bagi petani maupun konsumen, bahkan bagi pemerintah sebagai keberhasilan dalam pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Informasi tentang pertanian alami sudah mulai tersebar dibeberapa wilayah Kabupaten Tana Toraja, khususnya dalam wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Pertanian alami diperkenalkan oleh Yayasan Kombongan Situru (YKS) sebagai mitra Yayasan BaKTI pada Program MAMPU di Kabupaten Toraja.

Informasi ini ditanggapi sangat baik oleh beberapa Pemerintah Lembang/Desa untuk mendukung terpenuhinya realisasi anggaran dana desa untuk kegiatan pemberdayaan, yang selama ini masih sangat terbatas jenis kegiatan yang dilakukan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Disamping itu, pelatihan pertanian alami menjadi kebutuhan petani untuk meningkatkan keterampilan dalam mengelola pertanian biaya murah, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, pangan yang sehat dan aman untuk dikonsumsi serta secara ekonomi dapat meningkatkan pendapatan rumah tangga.

Salah satu lembang yang mengakses dana desa untuk Pelatihan Pertanian Alami adalah Lembang Palipu, Kecamatan Mengkendek, yang difasilitasi oleh Kelompok Konstituen (KK) Buntu Kandora. Pelatihan dilaksanakan pada Bulan Desember 2016, yang diikuti oleh perempuan miskin, pengurus KK, dan beberapa laki-laki yang sangat berminat dan mereka semua antusias dan bersemangat mengikuti pelatihan.

Materi pelatihan meliputi: teori, yaitu: penguatan kelembagaan kelompok, pemahaman pertanian alami, nutrisi tanah dan kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, dan praktek pembuatan pupuk serta aplikasinya di lahan pertanian. Aplikasi pupuk alami dapat dilakukan dilahan sawah, kebun dan ternak dengan arahan dari fasilitator.

Jumlah masyarakat yang ikut pelatihan pada saat itu sangat terbatas karena dananya juga terbatas, sehingga Kepala Lembang merencanakan akan melaksanakan pelatihan yang sama pada tahun anggaran 2017 dengan melibatkan masyarakat lebih banyak. Namun saat ini masyarakat yang mengikuti pelatihan sudah menularkan pengetahuan dan keterampilannya kepada masyarakat lainnya sehingga penggunaan pupuk alami menyebar ke kelompok yang lain, Dasa Wisma, dan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga), PWGT (Perhimpunan Wanita Gereja Toraja). Aplikasinya masih pada tanaman sayur-sayuran di sekitar halaman rumah karena volume pupuk yang dibuat masih sangat terbatas, hanya untuk memenuhi kebutuhan pupuk sayur untuk konsumsi rumah tangga.

Di samping Lembang Palipu, Lembang Banga yang difasilitasi oleh KK Banga, juga telah melaksanakan Pelatihan Pertanian Alami melalui kerja sama dengan lembaga Gereja (Gereja Toraja Jemaat Banga) yang menyiapkan anggaran. Dukungan Gereja sangat berarti, karena akan semakin mempopulekanr sistem pertanian ini.

Ini sangat membanggakan, karena kesadaran masyarakat dan pemerintah lembang/desa mengenai pertanian alami. Pertanian yang menghasilkan pangan sehat, murah, dan berkelanjutan ini diharapkan direplikasi oleh petani, sehingga menjadikan pertanian sebagai usaha ekonomi yang selaras dengan alam. Pertanian alami dapat berkembang karena kesadaran petani dan konsumen untuk mengelola alam sesuai dengan cara alam bekerja. Manusia tidak boleh merusak atau memutus siklus alam, karena dampaknya terhadap kehidupan sangat besar dan panjang. **(MATIAS & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Oche

Aktivis Perempuan Tilomanda

Kabupaten Tana Toraja

Selama ini aktivis perempuan identik dengan perempuan berpendidikan tinggi dan tinggal di kota. Selain bekerja mengadvokasi hak-hak perempuan, kritis terhadap pemerintah, juga harus selalu masuk di media massa. Karena itu, label aktivis perempuan hanya melekat pada mereka yang "oposan" terhadap pemerintah.

Aktivis biasanya dilekatkan pada mereka yang berlembaga di LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) peduli perempuan, organisasi sosial perempuan, buruh perempuan yang aktif membela buruh/pekerja perempuan, advokat/pengacara yang peduli pada masalah-masalah perempuan dan anak, dan jurnalis perempuan yang menulis masalah-masalah perempuan.

Perempuan-perempuan yang bekerja untuk keselamatan perempuan dan anak, perlindungan perempuan, dan pemberdayaan perempuan tanpa pamrih, tidak dilabeli sebagai aktivis. Mereka ini

hanya dianggap berjasa untuk perempuan, tetapi belum dikategorikan sebagai aktivis perempuan. Apalagi umumnya mereka ini tidak kritis terhadap pemerintah, dan jarang atau bahkan tidak pernah diliput media massa.

Perempuan yang tidak diliput oleh media massa, namun terus bekerja tanpa pamrih, tanpa mengharapkan liputan dan pujian ini, jumlahnya sangat banyak. Mereka ini berada di kota, pinggiran kota, desa, dan pulau-pulau terpencil. Mereka juga bekerja bukan mengharapkan pengakuan, tetapi bekerja untuk kemanusiaan, untuk perempuan dan anak, dan sebagai umat beragama, mereka mengharap balasan dari Tuhan semata.

Jauh dari Makassar, tepatnya di Kabupaten Tana Toraja, seorang perempuan bernama Dorce Ramma Songga, adalah satu dari sekian perempuan yang bekerja untuk perempuan, tanpa pamrih, yang patut dijadikan teladan. Perempuan yang akrab dipanggil Dorce atau Oche ini adalah seorang aktivis perempuan di tengah dominas kaum pria.

Oche adalah Ketua Kelompok Konstituen (KK) Tiromanda, sebuah organisasi yang dibentuk di Kelurahan Tiromanda, Kecamatan Makale Selatan, Kabupaten Tana Toraja. KK adalah organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mengorganisasi dan mengadvokasi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan perempuan miskin, yang pembentukannya difasilitasi oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Ketua KK adalah satu dari beberapa organisasi yang digeluti Oche. Bagi Oche, aktif dalam berorganisasi merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Tidak Peduli apakah organisasi itu di level kampung atau kelurahan, kecamatan, atau bahkan di level Kabupaten. Baginya apapun jenis organisasi yang diikuti mengharuskan dia untuk melakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. Tidak heran jika pada periode 2013 – 2015, Oche berhasil menjadi Ketua RW (Rukun Warga) To'long, Kelurahan Tiromanda yang selama ini lebih didominasi oleh kaum pria. Baru – baru ini

juga dalam ajang pemilihan Bupati Tana Toraja tahun 2015, Oche dipercaya menjadi ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Tiromanda.

Menjadi Ketua RW, apalagi di daerah, merupakan terobosan. Ketua RW adalah jabatan yang selama ini identik dengan laki-laki. Keberanian Oche menjadi Ketua RW tentu meningkatkan posisi tawar perempuan di lingkungan tempat tinggal Oche. Oche membuka tradisi baru bahwa, perempuan dapat menduduki posisi-posisi strategis di publik.

Oche adalah ibu dari 3 orang anak dan kini sudah berumur 35 tahun, memilih untuk

menetap dan berkarya di Kelurahan Tiromanda, Kecamatan Makale Selatan, meskipun aslinya adalah warga Sarira, Kecamatan Makale Utara. Bagi Oche di manapun dia berada keinginannya adalah bagaimana dia bisa berguna dan memberikan dampak bagi orang lain.

Menurut Oche, bekerja dan berbuat bagi orang lain membuat dirinya senang. Apalagi apa yang dilakukannya dapat berguna dan membuat orang lain senyum. Karena itu, sejak terpilih menjadi Ketua KK Tiromanda tahun 2015, Oche menggerakkan pengurus dan anggota kelompoknya untuk aktif mengadvokasi dan mendampingi kasus-kasus yang dialami oleh perempuan dan anak.

KK Tiromanda merupakan salah satu KK yang cukup aktif dalam berkegiatan. Oche yang mempunyai kemampuan dan keterampilan menganyam, yang dipelajari dari tetangganya, Albertin, tidak dimilikinya sendiri. Oche dan Albertin membagi keterampilan tersebut melalui pelatihan untuk ibu-ibu di kelompoknya, maupun kelompok lain yang ingin mempelajarinya.

Keterampilan yang dimiliki oleh Albertin, yang kemudian dibagikan kepada Oche dan tetangganya, kini menjadi keterampilan ibu-

ibu. keterampilan tersebut telah berdampak dan bernilai ekonomi bagi ibu-ibu. Itu berarti, Oche adalah perempuan yang menginginkan kaumnya berdaya, dan selalu melihat apa yang dapat dilakukan atau dibagikan. Oche tidak mau berdaya sendiri di tengah tetangga dan kaumnya yang tidak mempunyai kegiatan.

Perkenalan Oche dengan Program MAMPU dimulai sejak proses pembentukan KK awal Maret 2015. Awalnya dia bergabung karena *"hobby"* berorganisasi dan kepedulianya terhadap orang lain. Ketika pemilihan ketua, secara aklamasi Oche terpilih menjadi Ketua KK Tiromanda. Kepercayaan warga dan perempuan di Tiromanda terhadap Oche sudah lama, sehingga ketika diusulkan untuk menjadi ketua KK, warga dan perempuan yang hadir pun langsung menyetujuinya. Oche pun dengan senang menerimanya, walaupun dia telah aktif di beberapa organisasi.

Oche aktif di beberapa organisasi, di antaranya: anggota Satgas (Satuan tugas) Narkoba, Ketua Dasa Wisma Po'pong, dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Po'pong Kelurahan Tiromanda. Keaktifannya berorganisasi menjadikan Oche selalu tampil menyampaikan berbagai permasalahan perempuan dan anak pada pertemuan-pertemuan dengan pengambil kebijakan. Oche telah terlatih untuk menyampaikan pikiran dan pendapat pada pertemuan, diskusi, dan lain-lain.

Dengan menjadi Ketua KK Tiromanda, Oche memperoleh pengetahuan mengenai hak-hak perempuan, hak asasi manusia (HAM), layanan publik, pengorganisasian, advokasi dan penanganan kasus. Menurut Oche, pengetahuan tersebut sangat penting bagi seorang perempuan.

Oche adalah perempuan di daerah yang mempunyai sejumlah aktivitas untuk orang lain. Dia bekerja tanpa pamrih dan tidak mengeluh. Dia memang senang bekerja dan melakukan sesuatu yang dapat berguna bagi orang lain. Oche adalah contoh aktivis perempuan yang tidak mendapat liputan, dan tidak butuh pengakuan.

Oche adalah satu dari banyak aktivis perempuan yang bekerja untuk masyarakat dan untuk perempuan. Mereka tidak terpantau oleh media massa, dan memang tidak butuh publikasi. Pekerjaan-pekerjaan yang mereka lakukan adalah pekerjaan penting yang dilakukan atas panggilan nurani semata. Mereka menyelamatkan nyawa perempuan, nyawa anak, dan nyawa warga tanpa dihitung dan dinilai dengan materi.

Mereka melakukan pekerjaan, yang sebenarnya adalah tanggungjawab dan kewajiban negara. Namun, negara/pemerintah kadang tidak melihat, apalagi mengapresiasi apa yang telah dilakukan para aktivis perempuan ini. Mereka ini bukan hanya layak disebut aktivis perempuan dan pantas diberitakan oleh media massa, tetapi mereka juga pantas mendapatkan pengakuan dan penghargaan dari negara. **(LENYNDA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

KABUPATEN

MAROS

Mitra :

Yayasan MAUPE

Muli

Gurunya para Ibu

Bagi aktivis dan pendidik kritis, nama Paulo Freire dan Ivan Illich adalah maha guru untuk pembebasan. Istilah konsientisasi *(contiencizacao)* atau penyadaran adalah istilah yang populer dan melekat dengan Paulo Freire. Baik Paulo Freire maupun Ivan Illich menekankan bahwa, pendidikan harus meningkatkan daya kritis, memberdayakan, membebaskan, dan memanusiakan.

Karenanya, manusia sekolah adalah manusia-manusia yang lebih baik. Manusia yang lebih kritis dan tidak membebek, tidak menjadi pengikut buta. Lebih berdaya dan mempunyai kekuatan untuk melawan diskriminasi, penindasan, dan kesewenang-wenangan, sehingga menjadi manusia bebas dan merdeka dari ketakutan dan eksploitasi dalam bentuk apa pun.

Sekolah, apa pun bentuk dan modelnya, adalah tempat untuk menempa manusia untuk menjadi manusia. Sekolah seyogianya merupakan lingkungan yang paling aman dan nyaman. Dan sekolah yang aman dan nyaman itu adalah sekolah-sekolah yang dibuat warga, sekolah yang tempat belajarnya di rumah-rumah, emperan rumah, kolong rumah, kolong jembatan, di bawah pohon, atau di tempat-tempat yang kumuh. Sekolah seperti ini menempatkan dan menghargai manusia sebagai mahluk Tuhan yang perlu belajar untuk mendapatkan ilmu dan keterampilan.

Guru Aksara Sukarela

Sri Mulyati, seorang perempuan desa dan ibu rumah tangga yang berusaha memberantas buta aksara di desanya adalah, sesuatu yang sangat penting dan berharga, sehingga harus diapresiasi dan didukung. Perempuan seperti Ibu Muli, begitu nama panggilan sehari-harinya, adalah perempuan langka.

Apalagi sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurusi segala kebutuhan dan keperluan rumah tangga yang telah menyita waktu, Ibu Muli menjadi pengajar bagi ibu-ibu, suatu pekerjaan yang tidak menghasilkan uang atau barang. Berbeda dengan guru-guru atau tenaga pengajar di sekolah-sekolah formal, nonformal, dan informal yang mengajar untuk mengepulkan asap dapurnya.

Awalnya, Ibu Muli diajak oleh Normawati, seorang guru SD (Sekolah Dasar) untuk bergabung di Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM). Tahun 2013 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (MAUPE) menyelenggarakan program pendidikan politik bagi perempuan di Kabupaten Maros, dan salah satu desa yang menjadi lokasi program adalah Desa Temappaduae, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Di desa inilah, Ibu Muli hidup dengan suami dan 8 orang anaknya.

"Daripada cuma mengurus rumah tangga dan menjadi bahan gunjingan tetangga, karena dilihat sebagai keluarga besar yang tidak mampu, lebih baik saya mengisi keseharian dengan hal-hal yang bermanfaat," demikian jawab Ibu Muli, ketika ditanya alasannya bergabung dengan SPPM. "Apalagi anak-anak saya sudah ada yang beranjak remaja sehingga sudah bisa saling menjaga dan mengurus adik-adik," ujar perempuan berusia 46 tahun ini memberi alasan.

Inisiatif Ibu Muli mengajar membaca dan menulis huruf latin muncul karena desakan seorang perempuan penyandang disabilitas yang tidak pernah mengecap bangku sekolah, Satria (25 tahun). Satria harus berjalan dengan menggunakan tongkat karena terkena penyakit polio sejak kecil. Sebagai perempuan dan penyandang disabilitas, upaya Satria yang mendesak Ibu Muli menjadi guru aksara sukarela patut diacungi jempol. Seorang Satria yang perempuan penyandang disabilitas dapat melihat kemampuan Ibu Muli yang harus ditularkan kepada warga desa yang lainnya.

Tanpa Tanda Jasa

Setelah Satria berhasil menyakinkan Ibu Muli untuk menjadi gurunya, beberapa warga juga tertarik untuk belajar. Awalnya, Ibu Muli mengajar 4 orang, kemudian bertambah menjadi 10 orang. Warga belajar berumur antara 25-50 tahun. Jam belajar ditetapkan bersama, sesuai dengan waktu lowong warga. Waktu belajar 2-3 kali seminggu, umumnya pada sabtu dan minggu sore. Pelajaran yang diberikan adalah baca tulis, bicara di depan umum, dan praktik membut tanda tangan.

Pelajaran tersebut merupakan pelajaran berkategori hadap masalah. Ibu-ibu yang tidak bisa baca tulis mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari, karena segala kebutuhan berhubungan dengan baca-tulis. Mereka juga tidak mampu membantu anak-anak mereka dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah.

Seorang peserta belajar menyatakan, jika mereka tidak mampu baca-tulis, mudah diperalat atau bahkan ditipu oleh siapa pun. Di daerah Maros saat ini terus membangun, termasuk pengembangan industri dan perumahan. Jika warga tidak bisa membaca, maka kemungkinan bisa ditipu untuk menjual tanah dan kebun dengan harga murah atau di bawah standar.

Mereka juga belajar berbicara, sehingga bila mengikuti rapat atau pertemuan tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga memberi masukan dan pendapat. Sedangkan belajar tanda tangan untuk menggantikan kebiasaan selama ini yang menggunakan jempol atau sidik jari. Tanda tangan dianggap lebih praktis dan berkelas dibandingkan dengan jempol yang sudah kuno dan identik dengan buta aksara.

Pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Muli adalah pengabdian tanpa tanda jasa. Apa yang dilakukannya adalah karena warga membutuhkan mengenal huruf latin, bisa membaca, bisa menulis, berbicara, dan bertanda tangan, yang kesemuanya merupakan

pengetahuan dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari.

Pengetahuan dan keterampilan tersebut sangat sederhana bagi seseorang yang menempuh pendidikan formal, minimal tamatan SD. Namun bagi mereka yang tidak pernah menginjakkan kaki di bangku sekolah atau berhenti sekolah sebelum mengenal pengetahuan dan keterampilan tersebut, tentu merupakan sesuatu yang sulit dan berat.

Membebaskan Warga

Tahun 2015 Ibu Muli bergabung menjadi pengurus Kelompok Konstituen (KK) Temappaduae. Di KK Temappaduae, istri Abd Wahab ini belajar tentang gender, berbicara di depan umum, demokrasi, politik, dan hak asasi manusia (HAM). Selain bersama KK mendampingi perempuan dan masyarakat miskin dalam mengakses layanan publik, yang merupakan Program Kerja, KK Temappaduae juga telah menjadikan pemberantasan buta aksara latin sebagai program kerja.

Program Kerja KK Temappaduae dibuat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga. Menjadikan pemberantasan buta aksara latin sebagai program kerja, menjadikan KK Temappaduae berupaya membebaskan warga dari buta aksara latin, yang akan berdampak pada peningkatan kualitas hidup warga. Warga yang tidak bisa membaca dan menulis huruf latin mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan layanan sosial yang disediakan oleh negara. Warga juga mudah ditipu oleh para rentenir, aparat, dan pihak-pihak yang memanfaatkan kekurangan warga.

Apa yang dilakukan Ibu Muli yang dimulai dari hal-hal kecil, namun sangat berguna, kemudian disadari bahwa itu menjadi kebutuhan warga sehingga dimasukkan ke dalam Program Kerja KK Temappaduae adalah, suatu kemajuan yang sangat berarti dan sangat positif. Perubahan selalu dimulai dari hal-hal kecil yang bermanfaat. Apa yang dibutuhkan oleh Satria, seorang perempuan penyandang disabilitas, ternyata juga dibutuhkan oleh warga lainnya. Dan apa yang dilakukan oleh Ibu Muli dan KK Temappaduae adalah sebuah terobosan untuk membebaskan warga! **(AGUSNAWATI & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Asa Bunga

"Kehidupan saya rumit. Sejak yang ketiga ini, saya mulai berpikir untuk melihat ulang rencana hidup saya." Kata Bungadiah, Ketua Kelompok Konstituen (KK) Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan.

Tiga kali membina mahligai perkawinan namun kandas. Perceraian ketiganya adalah pukulan berat bagi ibu dari Muh. Asriandy Nur (14 tahun) dan Nursyahra Agdia (5 tahun) ini. Bukan hal mudah untuk menangani dinamika hidupnya setelah tiga kali kandas membangun cita-cita mulia melalui perkawinan.

"Panjang kalau diceritakan." kata perempuan yang kini bermukim di Dusun Bontolangkasa, Desa Bonto Mate'ne sembari tertawa. Bungadiah beruntung menemukan inspirasi setelah bertemu teman-teman di MAUPE (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan) yang sedang giat memotivasi kaum perempuan untuk bangkit dan mengepakkan sayap harapan.

Perkenalannya dengan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), kerjasama MAUPE dan Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) bermula saat dia bertemu dengan ibu Agusnawati, pendiri Maupe pada tahun 2014.

"Ada kegiatan MAUPE saat itu dan saya bertemu Hajjah Una, Saya terkesan dengan kesibukannya membantu perempuan untuk maju. Masih baru, dalam tahun 2014." kata perempuan yang pernah menjadi koordinator ujian persamaan SMP (Sekolah Menengah

Bunga adalah profil perempuan korban pernikahan dini. Pernikahan dini selalu membawa korban perempuan, karena mereka menanggung beban melahirkan dan mengasuh anak, apalagi jika terjadi perceraian.

Pertama) di Kecamatan Lau, Maros yang juga merasa sering ikut acara-acara MAUPE seperti pelatihan enumerator, lokakarya, dan pertemuan-pertemuan kader perempuan desa.

"Saya termotivasi, sekarang saya adalah anggota KK." Katanya lagi. Bunga—panggilan akrab Bungadiah—adalah Ketua KK Bontomatene PAW (pergantian antar waktu) karena ketua terdahulu sibuk dengan bisnis.

Meski merasa terlambat bergabung dengan MAUPE namun Bunga tak berkecil hati. Dia merasa telah semakin kuat karena mempunyai banyak teman-teman yang mengalami tekanan-tekanan yang tak ringan tentang kehidupan, rumah tangga, dan status diri. Bunga bukan seorang dalam menghadapi kondisi tersebut.

Mengaku harus berbakti pada orang tua, Bunga harus memutuskan untuk menjadi tukang ojek tingkat kampung. Kampungnya yang pedalaman dan lumayan jauh dari pusat Kota Maros membuatnya berinisiatif untuk menyiapkan layanan jasa antar jemput. Bunga melihat peluang, walaupun sangat sangat kecil.

"Sebagian besar hanya membonceng orang-orang yang saya kenal, keluarga, atau anak-anak sekolah." kata perempuan yang mengaku mulai berhati-hati jika ada pria mendekatinya. Pernikahan dininya setelah tamat SMP telah memberinya banyak catatan tentang suka duka membina rumah tangga.

Bunga adalah satu dari sekian banyak perempuan di Maros dan di Sulawesi Selatan yang menikah dini. Pernikahan dini masih dianggap hal yang wajar bagi sebagian masyarakat. Pernikahan dini memutus harapan anak-anak di bangku sekolah, karena anak-anak yang dinikahkan secara dini akan putus sekolah. Mereka menjadi orang tua untuk anak-anaknya, padahal sejatinya mereka pun masih berusia anak.

"Bapak, meski sakit-sakitan masih membantu kami dengan bekerja di sawah." kata perempuan yang bersaudara dua orang ini. Bapak Bunga menderita sakit mata katarak dan Bunga sedang mencari jalan bagaimana

membantu mengurangi beban kesakitan itu.

"Jangan tertawai saya, saya senang sekali ikut kegiatan MAMPU, ikut pelatihan. Dengan itu saya bisa mengetahui tentang perlindungan sosial sehingga bapak saya bisa dioperasi katarak." Terang perempuan yang mengaku menikah dini setamat SMP. Bungadiah pernah ikut kursus kecantikan dan menjahit di Bonto Mate'ne.

Perempuan yang lahir tanggal 29 Oktober 1982 ini bernama Bungadiah tinggal di Kampung Batiling, Dusun Bontolangkasa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros. Kabupaten Maros merupakan salah satu wilayah Program MAMPU di Sulawesi Selatan yang didukung oleh Pemerintah Australia.

Apa yang dialami oleh Bungadiah dan fokus perhatian MAUPE merupakan hal penting dalam memandang eksistensi perempuan. Terkait perkara yang membelit perempuan saat berumah tangga hingga akses mereka memperoleh pelayanan negara dan perlindungan merupakan hal penting yang harus selalu diperjuangkan.

Perempuan di Maros nampaknya sedang dirundung banyak persoalan dari tahun ke tahun. Menurut data yang dirilis Humas Pengadilan Agama Maros, pada tahun 2014 terhitung Januari hingga Oktober, terdapat 414 perkara yang masuk di pengadilan. Sementara untuk data tahun 2013 jumlah perkara yang masuk sekitar 452 kasus. Cerai gugat sebanyak 310 perkara yang masuk dan cerai talak yang masuk hanya sekitar 104 perkara.

Ini hanya gambaran kecil isu perkawinan dan dilema yang dihadapi oleh perempuan. Tentu ini adalah masalah sosial, yang salah satu di antaranya terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang pelakunya adalah suami, tidak sedikit yang berujung di pengadilan.

"Menurut pengamatan kami, banyak kaum perempuan Maros yang selalu jadi korban. Korban dalam artian menampung berlipat persoalan rumah tangga. Persoalan beban ganda, padahal banyak hal yang telah diberikan oleh perempuan terhadap rumah tangga mereka. Belum lagi pada aspek yang lebih luas seperti pengelolaan kesehatan, pendidikan dan ekonomi rumah tangga." Imbuh Agusnawati, pendiri MAUPE.

Lantaran itu MAUPE dengan Program MAMPU mengambil inisiatif untuk mengajak perempuan berpikir tentang keadaan mereka baik melalui penyadaran kritis, Advokasi dan Pendampingan, Pengorganisasian, Penganggaran dan Pemahaman Hak Asasi Manusia dan Hak Asasi Perempuan (HAM/HAP) hingga aspirasi perempuan dan masyarakat miskin disampaikan kepada Anggota Parlemen Maros.

Bagi MAUPE, Bungadiah adalah salah satu bukti bahwa program MAMPU yang sementara dijalankan selama setahun ini memberikan manfaat nyata bagi kian menguatnya perempuan Maros dalam menghadapi persoalan kehidupan termasuk bahtera rumah tangga. Mereka tetap bersemangat berikhtiar seperti yang dipilih oleh Bungadiah untuk menjadi pemasar parfum, asesoris untuk perempuan, menjual abon, produk kendaraan roda dua sekaligus Penggiat Warga di desanya.

Bunga adalah profil perempuan korban pernikahan dini. Pernikahan dini selalu membawa korban perempuan, karena mereka menanggung beban melahirkan dan mengasuh anak, apalagi jika terjadi perceraian. Dengan pendidikan yang rendah, dan keterampilan yang sangat, perempuan diberi tanggungjawab mengasuh dan mendidik anak. Di pihak lain, negara sering luput terhadap perempuan-perempuan tersebut. **(KAMARUDDIN DG. NUNTUNG & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Bukan Sekadar **Omong Doang**

Dukungan Legislator Laki-Laki kepada Perempuan

Beberapa tahun terakhir, banyak istilah maupun akronim yang kemudian menjadi lazim digunakan. Istilah-istilah tersebut biasanya mulai dipakai oleh kalangan anak muda, namun karena seringnya digunakan dan didengarkan, akhirnya menyebar dan populer menjadi istilah yang umum dipakai oleh berbagai kalangan.

Salah satu istilah yang biasa digunakan adalah "omong doang" yang biasanya disingkat dan ditulis dengan "omdo", yang artinya banyak bicara, banyak ngomong, dan ngomong saja. Istilah ini kemudian menggantikan istilah yang lebih eksklusif seperti *lips service* atau istilah lainnya seperti NATO *(No Action Talk Only)*. Penggunaan istilah "omdo" kemudian lebih meluas digunakan karena lebih mudah diucapkan dan mudah dimengerti oleh semua kalangan.

Omong doang (Omdo) atau *Lips Service*, secara umum merupakan stigma yang dilekatkan masyarakat bagi orang yang "banyak bicara atau hanya bicara saja tapi tidak ada realisasi". Ini juga kemudian secara tidak langsung "diberlakukan" kepada wakil rakyat atau anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), yang selama ini telah kadung dinilai sebagai orang-orang yang hanya

menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Yang hanya mampu berjanji saat kampanye namun lupa ketika sudah duduk. Yang hanya mampu berkoar-koar dan tidak ada aksi nyata. Dan yang hanya mampu beretorika dan bersilat lidah namun masyarakat tidak merasakan manfaatnya.

Namun rupanya, uraian di atas tidak seluruhnya benar. Pada kenyataannya, dari sekian wakil rakyat yang telah di *"judge"* seperti itu, masih banyak pula yang memiliki komitmen kuat, perspektif yang jelas, dan kompetensi yang handal untuk memperjuangkan kebijakan (peraturan dan anggaran) untuk kepentingan masyarakat, khususnya perempuan dan masyarakat miskin.

Hal ini telah ditunjukkan oleh beberapa anggota DPRD di beberapa kabupaten/kota yang merupakan wilayah Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI seperti di Maros, salah satunya adalah Chaidir Syam selaku Ketua DPRD Maros.

Dalam kapasitasnya selaku Ketua DPRD Kabupaten Maros, Chaidir Syam memberikan dorongan, motivasi, dan pencerahan kepada anggota DPRD lainnya untuk mengoptimalkan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) masing-masing. Sebagai Ketua DPRD juga mendukung dan bekerjasama dengan anggota DPRD perempuan, sehingga kerjasama tersebut melahirkan kebijakan yang *pro poor* dan responsif gender.

Bahkan juga memberikan peluang dan posisi kepada anggota DPRD perempuan untuk menduduki dan menjabat pada posisi-posisi strategis pada alat kelengkapan DPRD seperti Ketua Komisi III oleh Hj. Haeriah Rahman dan Wakil Ketua Dewan Etik DPRD kepada Fitriani. Kedua perempuan anggota DPRD tersebut merupakan dua dari tujuh perempuan di DPRD Kabupaten Maros yang cukup menonjol.

Dengan kolaborasi peran yang sinergi dalam kiprahnya, sehingga melahirkan kebijakan mengenai PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) melalui Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. Peraturan ini mengatur tentang PAUD H-I (Holistik Integratif). Kebijakan daerah ini dibuat berdasarkan Perpres RI No. 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif Atau "PAUD H-I".

Pengembangan anak usia dini holistik dan integratif adalah pengembangan anak usia dini yang dilakukan berdasarkan pemahaman untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling berkait secara simultan dan sistematis (Bappenas, 2006). Menurut Direktorat Pembinaan PAUD, Holistik dan Integratif memiliki pengertian: Holistik artinya penanganan anak usia dini secara utuh/menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan dasar, gizi, pengembangan emosi dan intelektual, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan, untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak. Integratif/terpadu artinya penanganan anak usia dini dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat

Kabupaten Maros

masyarakat, pemerintah daerah, dan pusat. Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (2006) menyatakan bahwa, pengembangan anak usia dini secara menyeluruh (holistik) mencakup: kesehatan dasar, gizi, dan pengembangan emosi, serta intelektual anak.

PAUD Terpadu adalah program layanan pendidikan bagi anak usia dini yang menyelenggarakan lebih dari satu program PAUD seperti TK (Taman Kanak-Kanak), KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), SPS (Satuan PAUD Sejenis) yang dalam pembinaan, penyelenggaraan dan pengelolaannya dilakukan secara terpadu atau terkoordinasi.

Saat ini, implementasi PAUD di Kabupaten Maros dalam tahapan menuju "1 RW, 1 PAUD". Sehingga membuka akses yang seluas-luasnya bagi setiap anak usia dini, khususnya yang anak dari keluarga miskin atau kurang mampu. Sehingga permasalahan terkait sulitnya akses pendidikan bagi anak usia dini yang disebabkan ketersediaan fasilitas sekolah, jarak yang jauh, biaya dan faktor penghambat lainnya, telah diatasi dengan adanya PAUD H-I ini.

Selain mendapatkan pendidikan, anak usia dini juga mendapatkan pelayanan kesehatan (imunisasi, penimbangan), makanan tambahan/bergizi, pendidikan agama, tempat bermain, tempat penitipan dan layanan lainnya untuk mendukung tumbuh kembang anak. Selain itu, PAUD H-I ini juga menjadi solutif bagi ibu-ibu dari anak-anak tersebut sebagai tempat penitipan, mengefektifkan waktu karena tidak perlu lagi ke Pos Yandu, mendapatkan pengetahuan seperti parenting (pengasuhan), informasi hukum bahkan mendapatkan keterampilan sebagai upaya pemberdayaan khususnya pemberdayaan ekonomi.

Akhirnnya, peluang berupa peran dan posisi yang diberikan oleh Ketua DPRD kepada Legislator Perempuan di DPRD Maros, dapat menunjukkan tujuan akhir bahwa hal tersebut membawa manfaat bagi anak-anak, perempuan, keluarga dan masyarakat umum yang salah satunya diwujudkan melalui implementasi Perda Penyelenggaraan PAUD.

Hal ini juga sangat ditentukan oleh peranan dan kepedulian perempuan anggota DPRD Kabupaten Maros yang benar-benar mengemban amanah sebagai wakil rakyat untuk merumuskan dan mengawal kebijakan daerah sehingga bermanfaat untuk perempuan dan masyarakat sebagai konstituennya.

Perempuan yang duduk sebagai wakil rakyat di parlemen, pun dapat berbuat lebih banyak dan lebih baik, jika diberi ruang untuk berbuat. Dengan jumlah yang sedikit, namun dengan kualitas yang cukup baik, serta diberi ruang untuk berbuat, maka perempuan yang duduk sebagai anggota DPRD dapat melihat hal-hal yang tidak pernah dilihat oleh laki-laki, sekalipun anggota DPRD laki-laki sudah lama menjadi anggota DPRD.

Hj. Haeriah Rachman dan Fitriani adalah contoh anggota DPRD yang baru pertama kali duduk di DPRD, yaitu pada pemilihan legislatif tahun 2014, namun dengan kapasitas keduanya, serta didukung oleh anggota DPRD laki-laki, kedua menjadi contoh anggota DPRD perempuan yang dapat berbuat untuk konstituennya. **(LUSIA PALULUNGAN)**

Rasma

Mengabdi Tanpa Batas

Tulisan ini mengisahkan seorang perempuan yang bekerja sebagai bidan, mengabdi untuk membantu perempuan-perempuan dan anak-anak. Apa yang dilakukannya sangat menolong warga. Upaya yang dilakukannya tidak berhenti pada membantu, tetapi juga membangun komunikasi dengan pihak lain.

Suatu saat bidan desa ini bertemu dengan Kelompok Konstituen (KK), sebuah organisasi yang dibentuk atas dukungan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Yayasan BaKTI bermitra dengan MAUPE (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan) untuk pelaksanaan Program MAMPU di Kabupaten Maros.

Pertemuan bidan desa yang bernama Rasmamawati dengan KK, membuat usaha Rasmawati yang membantu perempuan dan anak-anak menjadi lebih dipeduli oleh pihak

Keprihatinan Rasma kembali teruji ketika didesanya ditemukan anak yang menderita penyakit HIV/AIDS. Anak tersebut merupakan anak tunggal dari orang tua yang juga telah wafat dikarenakan penyakit itu. Penderita yang kini berusia kurang lebih sepuluh tahun, dirawat oleh tantenya yang juga tergolong warga tidak mampu.

lain, termasuk media massa. Rasma semakin bersemangat karena semakin banyak pihak yang peduli terhadap perempuan dan anak. Keberadaan KK menjadi energi baru bagi Rasmawati, karena KK mengadvokasi hak-hak perempuan dan anak.

Sebelumnya, Rasmawati merasa hanya dirinyalah yang bersusah payah membantu perempuan dan anak, sementara pihak lain hanya bisa melihatnya, sekaligus prihatin. Karena tidak mempunyai rekan yang mempunyai kepedulian yang sama, maka Rasmawati melakukan sesuatu dengan sendiri. Dengan bertemunya Rasmawati dengan pengurus dan anggota KK, maka bebannya menjadi ringan, karena banyak yang memiliki kepedulian yang sama.

Rasma, nama panggilan Rasmawati, adalah lulusan Akademi Kebidanan Salewangang Maros tahun 2013. Setelah lulus, Rasma mengabdikan dirinya di POSKESDES (Pos Kesehatan Desa) Desa Tanete mulai Oktober 2013 hingga saat ini (2017). Bungsu dari tiga bersaudara ini merupakan perempuan kelahiran 13 April 1988. Rasma menghabiskan waktunya hanya untuk melayani dan mengabdi di desa kelahirannya tanpa memandang upah yang didapatkannya. Tentunya itu jauh dari cukup dari apa yang dia korbankan. Waktu dan tenaga yang keluarkan, mungkin lebih besar dari apa yang dia peroleh. Namun, dengan jiwa pengabdiannya, Rasma tetap bekerja tanpa keluhan.

Aktifitas kesehariannya yang selalu berinteraksi dengan ibu hamil, bayi, dan balita membuat dirinya kini lebih memiliki kepekaan sosial, ditambah lagi dengan kondisi desanya yang masih banyak terdapat masyarakat kurang mampu atau masyarakat miskin. Rasma prihatin dengan kondisi warga, terutama ibu hamil, bayi, dan balita yang kurang mendapat perhatian.

Keprihatinan Rasma kembali teruji ketika didesanya ditemukan anak yang menderita penyakit HIV/AIDS. Anak tersebut merupakan anak tunggal dari orang tua yang juga telah wafat dikarenakan penyakit itu. Penderita yang kini berusia kurang lebih sepuluh tahun, dirawat oleh tantenya yang juga tergolong warga tidak mampu.

Kondisi ini membuat Rasma sangat prihatin. Rasma bergerak bertanya ke sana ke mari dengan harapan mendapatkan dana untuk pengobatan anak-anak yang menderita HIV/AIDS itu. Rasma diharapkan pada situasi sulit, dimana Rasma harus menjaga keserahasian penderita, namun di pihak lain, Rasma juga membutuhkan dukungan pihak lain agar penderita ini ditangani.

Semua jalan sudah ditempuh, namun biaya belum diperoleh. Hingga pada suatu saat Program MAMPU masuk di Desa Tanete dan

membentuk KK. Rapat KK mengundang berbagai pihak di Desa, termasuk bidan desa, Rasma. Rasma menyampaikan berbagai permasalahan di Desa Tanete, dan menurutnya, yang paling mendesak adalah tentang penderita HIV/AIDS yang masih berumur anak-anak.

Diskusi KK mengenai penderita HIV/AIDS yang masih berumur anak-anak ini sangat serius. Pro-kontra antara perlindungan anak dari sorotan media massa dan diperlukan kepedulian para pihak, terutama pemerintah untuk penanganan korban tersebut. Sebagian mendukung perlunya publikasi mengenai kasus ini yang tujuannya adalah menjadi advokasi bagi pemerintah daerah. Sedangkan yang menolak, berargumen bahwa jika kasus ini terekspos dikhawatirkan berdampak terhadap anak.

Namun, setelah diskusi yang panjang, dan komunikasi dengan beberapa aktivis perempuan dan anak yang paham hak dan perlindungan, maka diputuskan bahwa kasus ini dapat dipublikasi ke media massa dengan beberapa catatan, untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak tersebut. Pemberitaan tidak sampai memunculkan identitas dan daerah, termasuk tidak foto. Pemberitaan juga dimaksudkan untuk menggugah dan mengadvokasi para pihak untuk penanganan anak penderita.

Forum media di Maros yang dibentuk atas dukungan Program MAMPU pun mendiskusikan kasus tersebut, agar menjaga kerahasiaan penderita, sekaligus tidak mengeksploitasi kasus ini. Pemberitaan dimaksudkan untuk advokasi terhadap pemerintah untuk peduli dan menangani anak yang menderita.

Melalui media massa dan KK, akhirnya informasi sampai kepada Ketua Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Maros H. Hatta Rahman, yang juga menjabat sebagai Bupati Kabupaten Maros. Sehingga H. Hatta Rahman, beserta rombongan (Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan) mengunjungi anak penderita di kediamannnya.

Pada saat kunjungan itulah, Baputi Maros langsung memerintahkan penanganan penederita. Anak penderita HIV/AIDS tersebut di bawa ke Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar untuk penanganan. Penderita mendapat penanganan sebagai peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) mandiri.

Penanganan penderita HIV/AIDS yang masih anak-anak sangat melegakan Rasma dan KK Tanete. Bagi Rasma, apa yang dilakukannya memang tidak membuahkan apa-apa untuk dirinya, tetapi dia sangat bersyukur karena bisa melakukan sesuatu untuk orang lain. Apalagi yang dilakukan itu untuk kepentingan seorang anak yang belum tahu apa-apa, namun sudah harus memikul beban penyakit yang sangat berat.

Namun perjuangan bidan desa Rasma kini diuji kembali, karena bantuan untuk biaya pengobatan penderita yang masuk langsung ke rekening tante penderita kini terhenti. Segala upaya telah dilakukan, dari mngidentifikasi sumber bantuan yang masuk ke rekening hingga menyampaikan masalah ini ke DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Maros dalam proses hearing dengan Kelompok Konstituen.

Semoga perjuangan ini membawa hasil. Usaha Rasma yang hanya seorang bidan desa untuk memenuhi hak dan melindungi seorang anak berusiaa 10 tahun, yang melawan penyakit ganas yang sedang menggrogoti daya tahan tubuhnya, dapat didukung oleh orang, jika ada organisasi yang menyatukan di antara orang-orang yang prihatin itu. Seorang Rasma yang didukung oleh KK berhasil memengaruhi dan mengadvokasi beberapa pihak.

(A. TENRIPADA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)

Patimang,

Menang di Pengadilan

Bagi rakyat kecil, keadilan hanyalah mimpi. Bukan hanya karena hukum yang selalu disebut sebagai tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi rakyat kecil juga tidak mempunyai pengetahuan mengenai proses hukum yang rumit dan panjang. Ketika mereka mengalami masalah hukum, mereka hanya pasrah dan mengikuti proses yang terjadi, sehingga terkadang mereka dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingannya.

Jika pun mereka menggunakan jasa advokat atau pengacara, kesulitan lainnya adalah, mereka tidak mampu membayarnya. Sementara itu, pengacara-pengacara di lembaga sosial dan hukum yang biasanya meluangkan waktu untuk mendampingi rakyat kecil, jumlahnya sangat terbatas.

Karena itu, proses-proses hukum yang melibatkan rakyat kecil, selain menyulitkan mereka dalam menjalaninya, juga sering merugikan mereka karena proses-proses yang panjang dan rumit itu. Tidak jarang ditemukan, rakyat kecil yang ditipu oleh mereka yang paham proses hukum.

Karena itu, ketika terdengar seorang perempuan miskin yang bekerja sebagai penggembala menang di Pengadilan, orang seakan tidak percaya. Apalagi yang dilawan adalah seorang saudagar kaya. Perempuan miskin bernanama Patimang ini digugat oleh seorang pengusaha di Pengadilan, karena dituduh membakar kandang ayam miliknya. Nilai gugatannya sebesar Rp. 30 juta.

Patimang yang berprofesi sebagai penggembala sapi dan petani penggarap ini dituduh sengaja membakar sampah di dekat kandang ayam tetangganya yang seorang pengusaha, sehingga menyebabkan kandang tersebut terbakar. Namun, Patimang

membantah tuduhan tersebut. Patimang menyatakan bahwa dia membakar sampah jauh dari kandang tersebut, dan dia sangat yakin bahwa, sudah tidak ada titik api saat dia meninggalkan lokasi.

Patimang memikirkan nilai gugatan sebesar Rp. 30 juta. Nilai tersebut sangat besar bagi seorang petani yang menggarap sawah milik orang lain. Apalagi suaminya yang sakit-sakitan, sehingga tidak mungkin membantunya mencari uang untuk membayar gugatan. Untuk makan sehari-hari saja sudah sangat memberatkan Patimang. Apalagi, dia sangat yakin bahwa, dia bukan penyebab terbakarnya kandang ayam itu.

Patimang yang sedang khawatir akan gugatan tersebut, bertemu dengan tetangganya. Oleh tetangganya, Patimang disarankan untuk mengadukan masalah yang dialaminya kepada Kelompok Konstituen (KK) Maharani, Desa Purnakarya, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Datanglah Patimang ke KK Maharani menemui Ibu Nurdiana.

Di depan Dea, nama panggilan Nurdiana, Patimang mengisahkan masalahnya. Dea mendengar dan mencatat dengan seksama apa yang diceritakan oleh Patimang. Dea kemudian menyampaikan kepada Patimang untuk bersabar, karena KK Maharani akan membicarakan masalah tersebut, mudah-mudahan KK Maharani dapat membantu Patimang.

Sebagai Ketua KK Maharani, Dea mengundang pengurus KK untuk membicarakan kasus yang menimpa Patimang. Karena terkait dengan masalah hukum, diputuskan untuk mengkonsutasikan kasus ini ke MAUPE (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan). Apalagi KK Maharani belum mempunyai pengalaman dalam mendampingi kasus-kasus hukum. Beberapa paralegal yang sudah dilatih pun belum memiliki kartu sebagai Paralegal.

Sebagai pelaksana Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan) di Kabupaten Maros, yang bermitra dengan Yayasan BaKTI, orang-orang di MAUPE tentu lebih paham mengenai advokasi dan pendampingan untuk kasus-kasus hukum.

Staf Program MAMPU di MAUPE memberi saran kepada KK Maharani mendampingi Patimang ke Makassar untuk meminta bantuan dan dukungan LBH APIK (Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan) Makassar. Apalagi kasus Patimang adalah kasus hukum yang membutuhkan pendampingan hukum.

Proses peradilan yang panjang dan rumit akan dilalui oleh Patimang. Karena itu, Patimang membutuhkan pengacara selama proses persidangan. Dengan adanya pengacara, Patimang mempunyai kekuatan untuk menjalani proses. Sejak KK Maharani dan MAUPE menyatakan mendampingi Patimang dalam menghadapi proses peradilan., Patimang sudah mulai kuat. Dengan adanya tambahan pengacara yang akan mendampingi Patimang di dalam dan di luar Pengadilan, maka Patimang akan semakin kuat menghadapi gugatan.

Bagi Patimang, menginjakkan kaki di Kota Makassar adalah pengalaman untuk pertama kalinya. Walaupun Kabupaten Maros berbatasan dengan Kota Makassar, Patimang tidak pernah menginjakkan kaki di Kota Makassar. Kasus yang menjerat itulah yang mengantarkan Patimang sampai di Kota Makassar.

Kasus Patimang kemudian didiskusikan di LBH APIK Makassar. Sebanyak 6 pengacara ditunjuk untuk mendampingi Patimang. Pada 10 Mei 2016 tibalah waktu persidangan untuk mendengarkan putusan Pengadilan Negeri Maros. Pada sidang untuk mendengarkan putusan, keluarga Patimang dan KK Maharani ikut mendengar langsung putusan melalui *video call* dengan salah satu pengacara Patimang, Ibrahim Massidenreng, SH.

Ketika Pengadilan memutuskan bahwa Patimang tidak bersalah, dia tidak bisa berkata apa-apa. Patimang hanya menangis dan bersujud syukur. Karena sebagai orang kecil dan miskin, dia tidak pernah membayangkan bisa menang melawan orang yang memiliki harta. Patimang hanya yakin bahwa, dia tidak pernah melakukan apa yang dituduhkannya itu. Dan jika kalah dan hakim memutuskan Patimang untuk membayar nilai gugatan sebesar Rp. 30 juta, maka Patimang pun tidak mampu membayarnya.

Bagi KK Maharani, kasus Patimang adalah salah satu pembelajaran mengenai dukungan dan pendampingan terhadap orang-orang kecil dan miskin, terutama perempuan. Menurut Dea, perempuan dan perempuan miskin memiliki posisi yang lemah di masyarakat, sehingga ketika mereka menghadapi kasus tertentu, kemungkinan akan diam, sekalipun berada di posisi kuat dan benar. Karena diam, orang-orang kemudian memanfaatkan untuk merugikan, misalnya dengan ditipu atau diperas.

Pengurus dan anggota KK Maharani senang dengan kemenangan Patimang di Pengadilan. Padahal bukan hanya Patimang yang ragu, pengurus dan KK Maharani pun tidak yakin akan kemenangan tersebut. Sebagaimana yang sudah umum terjadi, rakyat kecil sering kali mengalami kekalahan dalam proses hukum.

Kemenangan Patimang adalah harapan bagi orang-orang kecil, apalagi perempuan dan miskin. Namun, untuk mendapatkan keadilan diperlukan dukungan dan advokasi. KK Maharani sebagai organisasi yang dibentuk untuk pengorganisasian mendapat manfaat dari advokasi pada kasus Patimang. Kasus Patimang memberi pelajaran kepada pengurus dan anggota KK Maharani bahwa, membangun jejaring adalah salah satu cara membangun kekuatan.

(A. TENRIPADA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)

KABUPATEN

BELU

Mitra :

Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi
Keuskupan Atambua (PPSE KA)

Mama Walde

Mengabdi Tanpa Batas

Sosok perempuan kelahiran Sukabiren, 25 Juni 1972 ini penuh semangat dan kegigihan tanpa lelah berjuang menyuarakan aspirasi dan hak-hak kaum perempuan melalui Kelompok Konstituen (KK). Waldetrudis Lin yang akrab disapa ibu Walde atau Mama Walde, adalah sedikit perempuan desa yang menjadi pelopor untuk pemberdayaan kaumnya.

Melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) kerjasama Yayasan BaKTI Makassar dan PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua), di Desa Leosama dibentuk KK. Bagi Mama Walde yang menjabat sebagai Ketua KK, dia dan pengurus KK harus melakukan kegiatan-kegiatan penting dan berguna untuk penguatan masyarakat.

Menurutnya, manfaat program ini sangat baik dalam menyuarakan hak-hak kaum perempuan dan masyarakat miskin di Desa Leosama. Dengan demikian berkat pemahamannya ia mencoba mengorganisir anggota KK untuk membantu pemerintah desa dalam tugas-tugas pelayanan di tingkat desa yang berhubungan terkait tema-tema Program MAMPU.

Dikisahkan Mama Walde bahwa, lewat Program MAMPU, KK termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan Kelompok Konstituen, melakukan pertemuan rutin bulanan, dan pendokumentasian hasil pertemuan dibuat secara baik sehingga menjadi bahan evaluasi bulan berikutnya. Saat ini Mama Walde dan keluarga tinggal di Dusun Lalori, RT/RW 002/001 Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak.

Ia hanya lulusan Sekolah Dasar (SD). Mama Walde tidak bisa melanjutkan sekolah karena keadaan Ekonomi. Kata pepatah "asam di gunung garam di laut" seperti yang terjadi dalam perkawinannya. Mama Walde sendiri berasal suku Marae yang merupakan daerah pegunungan, kemudian bertemu dengan suaminya yang berasal dari daerah pesisir. Bersama keluarga mereka memilih menetap di pesisir dengan alasan lebih mudah untuk mencari nafkah.

Dalam perjalanannya pada tahun 1989 ia dipilih mejadi kader posyandu. Dengan keterbatasan tingkat pendidikan yang hanya lulusan SD, ia juga dipilih menjadi Tutor pada

PAUD (pendidikan anak usia dini) di Desa Leosama. Dalam perjalanan ia berpikir dan merasa pendidikan itu sangat penting, dan untuk menunjang semua itu ia harus memiliki ijasah sebagai pendukung, maka ia pun mengikuti pendidikan paket B dan C.

Ketika Program MAMPU memasuki Desa Leosama, sesuai kesepakatan bersama, maka Mama Walde dipilih menjadi Ketua KK "Laran Ida" Desa Leosama. Pemahamannya tentang lima tema MAMPU masih minim, namun seiring berjalannya waktu ia tetap serius dan tekun dalam mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan. Katanya untuk menambah pengetahuan. Menurutnya, ia dan perempuan desa lainnya bahwa yang mereka pahami mengenai KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan fisik saja, dan pelakunya tidak bisa dihukum. Tetapi kini pengetahuan mereka sudah semakin luas, termasuk mengenai hak-hak warga.

Ketika Musyawarah Dusun (Musdus), semua anggota KK pada setiap dusun diundang. Pada tingkat Musrenbangdes Mama Walde dipilih menjadi perwakilan perempuan yang akan ikut dalam Musrenbang Kecamatan. Tidak hanya itu, ketika ada pengaduan masalah yang terjadi yang berhubungan dengan perempuan, Mama Walde bersama beberapa anggota KK menyampaikan kepada Kepala Desa setempat.

Dan ketika penyelesaiannya dilakukan di Kantor Desa secara resmi, Ketua dan 2 anggota KK diundang untuk menghadiri dan menyaksikan proses penyelesaian masalah. Menurutnya, menyampaikan informasi seputar lima tema MAMPU kepada masyarakat sangatlah penting. Mengingat tingkat pendidikan rata- rata SD bahkan ada yang tidak tamat, jadi gampang-gampang susah. Namun ia yakin jika semua dilakukan dengan tulus ke depannya perempuan akan mampu dalam segala hal yang dapat menunjang kehidupannya dan keluarganya.

Dalam rangka menunjang ekonomi produktif Mama Walde bersama anggota KK berinisistif membuat olahan makanan lokal dari hasil laut dan pertanian, yang mana hasil dari olahan makanan lokal direncanakan akan dijual pada hari pasar hari minggu dan hari rabu disepanjang jalan umum di depan gereja di Desa Leosama.

Tahun 2016 masa kepemimpinan Kepala Desa Leosama akan berkahir dan akan digantikan oleh pemimpinn yang baru, sebagai ketua KK "Laran Ida" Mama Walde diusung untuk masuk dalam bursa pencalonan Kepala Desa Leosama Periode 2016-2021. Hal ini sudah dilakukan pendekatan dari BPD Desa dan Para tokoh adat setempat serta masyarakat untuk meminta kesediaan Ibu Waldetrudis Lin (Ketua KK Leosama) maju dalam pencalonan Kepala Desa. Beliau sementara diskusikan dengan keluarga.

Selain itu, Kepala Desa Leosama meminta Mama Walde dan KK untuk masukan kegiatan tematik MAMPU agar dianggarkan dalam ADD (Alokasi Dana Desa). Usulan itu sudah diberikan dan terdokumentasi dalam RPJMDes Desa Leosama.

Desa Leosama salah satu Desa di Kecamatan Kakuluk Mesak yang berjarak sekitar 13 km dari Kota Atambua. Kondisi jalan menuju ke desa ini sangat bagus karena berada pada jalur jalan Atambua - Timor Leste dan Atambua – Oecuse salah satu distrik dari Negara Timor Leste. Jarak Desa Leosama menuju ke pelabuhan Atapupu kurang lebih 1 km. Desa Leosama tergolong desa pesisir karena satu areal dengan desa-desa lainya di wilayah Atapupu. Sebanyak 99 % Penduduk Desa Leosama adalah petani dan 1% sisanya adalah PNS-TNI Polri, wirausaha, dan nelayan.

Desa Leosama dikenal oleh masyarakat Kabupaten Belu sebagai salah satu desa penghasil sayur untuk kebutuhan Kota Atambua. Masyarakat desa ini memiliki daya juang hidup sangat tinggi karena dengan ketersediaan air yang pas-pasan diusahakan semaksimal mungkin untuk menanam sayuran dan hasilnya bisa dipasarkan ke Kota Atambua.

Dengan adanya KK diharapkan masyarakat Desa Leosama, terutama perempuan semakin berdaya dan dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa. Mama Walde adalah salah satu perempuan yang mampu menggerakkan perempuan untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa. Bagi Mama Walde, perempuan tidak harus selalu menunggu, tetapi harus berinisiatif untuk kepentingan perempuan dan pembangunan desa. **(FRIDA ROMAN)**

UU Desa dan Aspirasi Perempuan Desa

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut Undang-Undang Desa), selain merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap keberagaman desa, juga hendak mendorong prakarsa dan gerakan masyarakat desa untuk kesejahteraan warga desa. Dengan demikian, Undang-Undang Desa juga menjadi instrumen untuk mendorong dan memberikan kesempatan kepada perempuan dan masyarakat miskin dalam mengembangkan kemampuannya.

Undang-Undang Desa membuka peluang bagi perempuan desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Namun partisipasi perempuan desa tidak serta-merta dapat diakomodasi di dalam kelembagaan yang ada. Sedikit sekali perempuan terlibat di dalam lembaga pemerintahan desa dan lembaga atau organisasi di luar pemerintahan. Kelompok petani, nelayan, peternak, usaha bersama, dan lainnya yang ada di desa, hanya sedikit sekali melibatkan perempuan.

Karena itu, aspirasi perempuan tidak mudah diakomodasi dalam dokumen-dokumen

perencanaan dan kebijakan di desa. Upaya para pihak untuk mendorong penguatan perempuan, termasuk dalam bentuk kelompok adalah salah satu jalan keluar untuk memfasilitasi perempuan dalam berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa terkait dengan kebijakan dan perencanaan.

Salah satu yang dibentuk di desa dan kelurahan adalah kelompok konstituen (KK). Kelompok konstituen adalah lembaga yang dibentuk sebagai bagian dari Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI dengan mitra di daerahnya. KK adalah lembaga yang dibentuk untuk menghimpun kekuatan perempuan untuk membangun hubungan dengan wakil mereka di parlemen. Di samping itu, KK diperkuat untuk mengadvokasi dan mengakses layanan publik yang disediakan oleh negara.

Kelompok Konstituen di Desa Fatuketi

Layanan publik di tingkat desa yang disediakan oleh negara tidak selalu mudah diakses perempuan. Atau layanan yang disediakan tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan di desa. Pasalnya, seringkali kebijakan dan perencanaan untuk menyediakan layanan, selain dilakukan oleh laki-laki, juga menggunakan perspektif laki-laki.

Untuk mengubahnya, perempuan harus ikut memengaruhi kebijakan dan terlibat dalam perencanaan. Tentu untuk melibatkan perempuan dalam kegiatan-kegiatan strategis di tingkat desa juga bukan perkara mudah, di tengah masyarakat yang menempatkan perempuan sebagai pelengkap dan berperan di ranah domestik. Namun, ada juga pengakuan terhadap perempuan untuk ikut berperan di ranah publik. Karenanya, di samping mendorong dan memberi peluang perempuan untuk beraktivitas di ranah publik, diperlukan mengubah perspektif dan cara pandang laki-laki dalam melihat perempuan.

Kehadiran KK Talimanikin di Desa Fatuketi, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT) ternyata membawa berkah bagi perempuan dan pemerintah desa setempat. Belum cukup setahun, KK Talimanikin dibentuk dan diperkuat, organisasi yang mayoritas menghimpun perempuan ini menunjukkan kemajuan yang signifikan. KK Talimanikin menerima pengaduan berbagai permasalahan perempuan dan kemiskinan, kemudian berupaya untuk menyelesaikan melalui jalur-jalur yang ada. Kegiatan tersebut mendapat perhatian Kepala Desa Fatuketi, Markus Y. Taus. Pada pertemuan-pertemuan desa, pengurus dan anggota KK cukup aktif memberi masukan-masukan yang konstruktif, dengan mengacu pada tema MAMPU.

Karena itu, ketika Pemerintah Desa Fatuketi hendak membuat RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) 2016-2021, KK Talimanikin telah diakomodasi untuk menjadi bagian dari tim. Sebanyak 5 orang pengurus dan anggota KK Talimanikin direkomendasikan untuk bergabung dalam Tim 11 (sebelas) guna membantu proses penggalian gagasan di setiap dusun sebagai acuan dalam menyusun prioritas dalam penyusunan RPJMDes Fatuketi. Kelima orang tersebut terdiri dari 2 perempuan dan 3 laki-laki, yaitu Marselinus Leon (pembina), Lili Pricilya Mau (sekertaris I), Henia Moreira (sekertaris II), Arkadius Moruk (seksi pengduan), dan Yohanes Suardi (anggota).

Perempuan dalam Perencanaan Desa

Nilai plusnya adalah, kesempatan penggalian gagasan di dusun juga dimanfaatkan oleh perwakilan dari KK untuk menjelaskan kepada pemerintah di tingkat dusun dan warga dusun tentang Program MAMPU dan tujuan dibentuknya Kelompok Konstituen di Desa Fatuketi.

Pada saat pertemuan penyusunan RPJMDes, Fasilitator Kecamatan, Susanti Jami meminta perwakilan KK Talimanikin untuk menjelaskan Program MAMPU. Setelah mendengar penjelasan dari perwakilan KK Talimanikin, fasilitator mengapresiasi dan menyatakan bahwa, isu-isu dalam Program MAMPU adalah isu strategis dan penting. Karena itu, fasilitator meminta Kepala Desa Fatuketi menyurat ke PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua) untuk hadir dalam perumusan Bidang Pembinaan

Kemasyarakatan (Point III) dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Point IV).

Pada 12 Oktober 2015, Yosef Metkono dan Pak Fres Nahak perwakilan PPSE-KA, menghadiri kegiatan penyusunan RPJMDes. Pada saat diskusi kelompok, perwakilan KK Talimanikin menjelaskan tentang 5 tema MAMPU sebagai isu strategis dan hal ini disambut baik oleh fasilitator kecamatan dan peserta. Fasilitator mengingatkan semua warga yang hadir bahwa sesungguhnya menyusun RPJMDes perlu memiliki isu strategis seperti yang dipaparkan oleh perwakilan KK Talimanikin.

Dari hasil debat pendapat yang berlangsung selama sehari ini, akhirnya KK Talimanikin berhasil memasukkan 7 (tujuh) point program/kegiatan dan diterima forum untuk masuk dalam agenda kerja RPJMDes. Point-point yang merupakan usulan dari KK Talimakin sebagai berikut: (1) sosialisasi dan penanganan kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga); (2) pembinaan TKI (Tenaga Kerja Indonesia)/Buruh Migran Perempuan; (3) sosialisasi langkah-langkah migrasi aman; (4) sosialisasi tentang *trafficking*; (5) pelatihan/penguatan kapasitas Kelompok Konstituen terkait 5 tema MAMPU; (6) sosialisasi dan pendataan permasalahan sosial di tingkat RT/RW dan Dusun; serta (7) perumusan indikator kemiskinan lokal sesuai kearifan lokal setempat.

Pada 17 Oktober 2015 adalah tanggal penetapan RPJMDes Desa Fatuketi, dan perjuangan KK telah menjadi agenda kegiatan desa untuk periode 2016–2021. Masuknya usulan KK Talimanikin di dalam RPJMDes Desa Fatuketi merupakan pengakuan mengenai perempuan dan potensi perempuan. Aspirasi perempuan dan pengakuan mengenai partisipasi perempuan dapat diakomodasi dalam perencanaan desa. Artinya Undang-Undang Desa membuka peluang partisipasi perempuan dalam perencanaan, berarti membuka ruang bagi masuknya aspirasi perempuan di dalam pembangunan.

Apa yang dilakukan dan dicapai KK Talimanikin di Desa Fatuketi walaupun masih merupakan tahap awal, sudah merupakan suatu kemajuan yang baik. Perempuan mampu menjadi bagian penting dalam perencanaan dan pembangunan desa. Karena itu, mengabaikan perempuan, berarti mengabaikan potensi dan kekuatan yang sudah diciptakan Tuhan. **(YOHANES M.V. NAHAK & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Mama Siska

Perempuan Hebat dari Desa Naekasa

Kabupaten Belu

Di antara peserta Konferensi Perempuan Timor yang mengacungkan tangan untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan kepada narasumber, salah satunya adalah Fransiska Abuk. Setelah dipersilahkan oleh moderator, perempuan yang akrab dipanggil Mama Siska itu, dengan sigap berdiri dan memegang mike.

"Saya Fransiska Abuk, saya adalah pengurus Kelompok Konstituen (KK) Lalian Tolu di Desa Naekasa." Kemudian Mama Siska mengemukakan berbagai permasalahan yang menimpa perempuan-perempuan di Desa Naekasa, yang menurutnya, itu juga terjadi di desa-desa lain di Kabupaten Belu. Kemudian dia bersama KK mencoba untuk menangani beberapa permasalahan tersebut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, termasuk mengusulkan kepada pemerintah desa agar, anggaran desa digunakan untuk pemberdayaan perempuan.

Di depan Bupati Kabupaten Belu, Willybrodus Lay yang menjadi salah satu narasumber pada Konferensi Perempuan Timor, 17-19 Oktober 2016 di Atambua itu, Mama Siska meminta agar perhatian pemerintah pada pembangunan desa harus memperhatikan perempuan.

Mama Siska menyebut, kekerasan terhadap perempuan dan anak, anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, anak yang putus

sekolah, suami-istri yang tidak mempunyai akta nikah, dan buruh migran yang berangkat secara ilegal adalah masalah umum yang terjadi dan ditangani oleh Mama Siska dan pengurus KK lainnya.

Kelompok Konstituen adalah organisasi masyarakat yang didorong pembentukannya oleh PPSE-KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua) Belu dan Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Aktivis Perempuan di Desa

Mama Siska adalah profil aktivis perempuan dari desa dan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan di desa. Perempuan kelahiran Wekmidar, Kabupaten Malaka, 31 Desember 1962 hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama). Tapi soal kemampuan dalam mengorganisasi kelompoknya patut diapresiasi.

Mama Siska pernah mengenyam pendidikan di SMP Nela, Desa Naekasa, dan kemudian menetap menjadi penduduk di Desa Naekasa. Di desa ini pula Mama Siska melakukan kegiatan-kegiatan untuk perempuan dan desa yang ditinggalinya.

Tahun 1999-2000 pertama kali diberikan kesempatan untuk bekerja di desa Naekasa menjabat sebagai kader dibidang kesehatan dan pendidikan, pada sebuah program yang didukung oleh UNICEF *(The United Nations Children's Fund)*. Sejak saat ini, beberapa program pemerintah dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat mulai dilakoni oleh perempuan yang sudah berusia 54 tahun ini.

Pada tahun 2015 dibentuk KK Lalian Tolu. Mama Siska terpilih menjadi ketua. Anggota KK memilih istri dari Yakobus Taek (60 tahun) menjadi Ketua KK Lalian Tolu, karena Mama Siska sudah dikenal sering membantu warga untuk mengurus hal-hal yang terkait dengan pemerintah desa, misalnya administrasi kependudukan. Mama Siska dikenal ringan tangan dalam membantu warga tanpa pamrih.

Terus Belajar

Menurut Mama Siska, menjadi Ketua KK Lalian Tolu memang merupakan tanggungjawab yang berat. Tapi dari situ ia

belajar mengenai pemberdayaan masyarakat secara terorganisasi. Dengan bergabung di KK Lalian Tolu, Mama Siska dan pengurus KK belajar mengenai hak asasi manusia (HAM), gender, pelayanan publik, pengorganisasian, dan penanganan kasus-kasus yang terjadi di masyarakat.

Sejak dibentuk, KK Lalian Tolu menerima berbagai kasus yang dilaporkan oleh warga Desa Naekasa. Pengurus KK mengupayakan penyelesaian kasus-kasus tersebut secara kekeluargaan. Jika kasus terserbut harus dirujuk ke lembaga layanan lain untuk proses lebih lanjut, maka pengurus KK ada mendampingi korban dalam proses.

KK Lalion Tolu kemudian menjadi populer di desa dan menjadi mitra yang baik bagi pemerintah desa. Pemerintah Desa menganggap KK Lalion Tolu sebagai mitra yang baik bagi pembangunan desa, karena itu pemerintah desa selalu melibatkan KK dalam kegiatan-kegiatan strategis.

Mama Siska sebagai KK Lalion Tolu pun mendapat posisi penting di masyarakat. Ketika pemerintah desa membuat perencanaan penganggaran desa, maka Mama Siska dimasukkan sebagai salah satu anggota tim sebelas yang menyusun perencanaan penganggaran tersebut.

Tentu kehadiran KK Lalion Tolu dan Mama Siska juga memuculkan rasa iri dari beberapa pihak, terutama yang tidak senang dengan kegiatan KK, yang memang mendorong pemberdayaan perempuan. Menurut Mama Siska, banyak yang tidak suka KK dan dirinya, karena mereka ini menentang dan mengadvokasi kekerasan dalam rumah tangga.

Artinya, budaya dan masyarakat patriarki memang dipelihara oleh orang-orang tertentu, baik untuk melanggengkan kekuasaannya, maupun karena ketidakmampuannya dalam bermasyarakat. Pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kelompok yang berusaha melanggengkan budaya patriarki, dengan berbungkus tradisi, adat, atau pun agama.

Bagi perempuan yang mempunyai 8 orang anak ini, tidak jadi soal kalau ada orang yang tidak suka dengan kegiatan KK Lalion Tolu. “semua perbuatan atau pekerjaan yang baik, pasti ada yang menentangnya” demikian Mama Siska berfilosofi. Tapi dengan terus belajar dan melakukan hal-hal baik, maka orang-orang yang menentang itu, suatu saat akan menjadi sadar juga.

Perempuan Harus Berdaya

Mama Siska adalah panutan. Nenek yang telah mempunyai 5 cucu ini adalah salah satu sosok ibu rumah tangga yang dihormati. Keluarganya menjadi panutan masyarakat. Sementara dirinnya sebagai aktivis perempuan di desa, Mama Siska juga menjadi teladan bagi perempuan-perempuan di desa. Namun Mama Siska adalah orang yang tidak suka menonjolkan diri.

Mama Siska selalu berbagi dengan apa yang dia dapatkan. Dia juga selalu mengajari perempuan-perempuan muda apa yang dianggap baik. Dia selalu berpesan bahwa, perempuan harus bisa berbuat sesuatu. Perempuan tidak selalu hanya berada di belakang, tetapi harus bisa tampil ke depan. Kemajuan perempuan akan berguna bagi anak-anak dan keluarga.

Mama Siska dikenal kritis. Berbagai program yang dilaksanakan di desa, akan dipertanyakan dan diadvokasi, jika ada laporan masyarakat terkait pemotongan, atau hal-hal lain yang merugikan masyarakat. Menurutnya, siapa pun tidak boleh merugikan masyarakat. Bantuan atau apa pun dari pemerintah atau lembaga sosial adalah hak-hak warga, sehingga mereka harus mendapatkannya. Karenanya dia dan KK Lalion Tolu bertekad untuk selalu mengawal setiap program yang masuk ke desanya. Dengan begitu warga desa tidak selalu dibodohi, seperti sebelum-sebelumnya.

Bagi Mama Siska, jika perempuan berdaya, maka keluarga-keluarga juga ikut kuat. Karena perempuan merupakan pihak yang mengelola rumah tangga. Selama ini perempuan tidak pernah dilibatkan dalam urusan-urusan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan. Namun, perempuan juga harus meningkatkan kemampuannya untuk dapat berperan di dalam masyarakat, tidak terus menunggu.
(WILHELMINA TAEK & SIJU MORIERA)

”

Pertanian alami merupakan pertanian yang mengandalkan kekuatan alam yang telah disiapkan oleh Tuhan.

(ARMIN SALASSA)

Bertani selaras Alam

Sistem pertanian modern yang bergantung pada penggunaan pupuk berbahan kimia, serta penggunaan obat-obatan berbahan kimia untuk penanggulangan hama dan penyakit, telah menimbulkan berbagai masalah serius. Akibat penggunaan pupuk berbahan kimia yang terus-menerus, tanah mengalami kelelahan *(soil fatiqueness)* dan semakin kering.

Di sisi lain, penggunaan obat-obatan berbahan kimia untuk penanggulangan hama dan penyakit menimbulkan lahirnya hama dan penyakit baru yang kebal terhadap bahan kimia. Residu dari bahan kimia yang terbawa hujan menyebabkan pencemaran perairan, seperti sungai, danau, waduk, dan laut.

Situasi ini cukup memprihatikan, untuk tidak dikatakan mengerikan. Lahirnya generasi hama dan penyakit yang kebal terhadap obat-obatan dan sumber air yang tercemar menjadi ladang bisnis baru bagi industri raksasa di bidang pertanian, farmasi, dan air minum. Inovasi akan terus dilakukan untuk menghasilkan bahan dan peralatan yang dapat digunakan oleh pertanian skala industri.

Namun, tidak bagi petani subsisten. Petani kecil yang hidup bertani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari akan menghadapi permasalahan serius ketika harga-harga sarana produksi sangat mahal, sementara produksi mereka juga sangat bergantung pada musim.

Petani kecil juga masih harus bersaing dengan industri pertanian raksasa yang produksinya tidak masuk di pasar-pasar modern, tetapi di pasar-pasar rakyat tradisional. Karena itu, "kekalahan" petani subsisten berkali-kali.

Agar Lingkungan tidak Semakin Rusak

Tentu petani subsisten tidak mampu bersaing dengan industri pertanian yang mempunyai modal besar. Namun demikian, petani subsisten harus mengubah cara-cara bertani yang mengandalkan bahan-bahan kimia yang merusak tanah dan meningkatkan kekebalan hama dan penyakit.

Berbagai inovasi dilakukan untuk meningkatkan produksi pertanian, dengan tidak semakin merusak alam. Salah satu di antaranya adalah Pertanian Alami yang dikembangkan oleh Petani di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba. Salah satu motor Pertanian Alami di Desa Salassae adalah Armin Salassa.

Pengembangan Pertanian Alami di Salassae dimulai sejak tahun 2011. Kini telah disebarkan ke 25 desa tetangga dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, termasuk mulai dikembangkan di luar Sulawesi Selatan. Pestisida dan pupuk kimia mulai ditinggalkan dan beralih menggunakan bahan-bahan alami pada Pertanian Alami Salassae.

Pada 26-28 Oktober 2016 bertempat di Kantor Desa Leun Tolu, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan Pelatihan Pertanian Alami. Desa Leun Tolu merupakan salah satu wilayah dampingan Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan)-Yayasan BaKTI di Kabupaten Belu. Pelatihan Pertanian Alami ini adalah salah satu bentuk penguatan Kelompok Konstituen (KK) di Kabupaten Belu. Di Kabupaten Belu, Yayasan BaKTI bekerjasama dengan PPSE KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi-Keuskupan Atambua) dalam Program MAMPU.

Armin Salassa, pemateri dalam pelatihan tersebut mengatakan bahwa, tujuan dari pelatihan ini agar peserta: (a) mempunyai pengetahuan terkait dengan pertanian alami dalam pembuatan pupuk kompos dan juga menjadi ahli dalam pembuatan pupuk; (b) memahami siklus tanaman; (c) memproduksi dan memberi nutrisi bagi tanaman, (d) peserta juga bisa lebih memperkuat dalam organisasi, terutama kelompok konstituen bisa jauh lebih baik setelah pelatihan ini. Bertani harus berorganisasi dan paham dalam penggunaanya, dan peserta harus mempunyai perencanaan dalam usaha pertanian.

Dalam pelatihan ini ada tiga hal penting yang peserta harus pelajari, yaitu: (1) Pertanian Alami, (2) Organisasi, dan (3) Perencanaan Usaha Pertanian. Faktor yang berpangaruh dalam pertanian alami sendri adalah tanah, bibit, perawatan, air, tanaman, hasil panen, harga, dan nutrisi. Karena bertani sendiri merupakan bagaimana kita mengurusi tanah, menyatu dengan tanaman dan merasa memilik

tanaman, sebab kita sendiri yang harus pelajari, kita sendiri yang jadi murid dan gurunya. Sedangkan pada organisasi dan perencanaan usaha pertanian harus mempunyai visi-misi, program kerja, kegiatan, partisipasi anggota, dan kerjasama dalam membangun jejaring.

Pupuk Organik

Menurut Armin, bahwa usia dunia pertanian dimuka bumi mencapai 70.000 tahun, dan pada 50 tahun terakhir ini pertanian kita mengalami kehancuran. Sebagaimana diketahui pada pupuk kimia sendiri diproduksi oleh pabrik dimana bahan utamanya diambil dari alam, namun pupuk ini diproduksi dengan penuh tekanan dengan pencampuran kimia. Nitrogen, TSP, KCL, ZA bersifat gas, bahan-bahan pencampur ini yang berbahaya, misalnya pupuk urea 46% mengandung nitrogen, dan 54 % adalah pengikat dimana terbuat dari bahan pembuatan semen, bebatuan, atau plastik. Sehingga jika sawah pernah diberi 100 karung pupuk urea, berarti ada 54 karung itu pengikat dan itulah yang membuat tanah kita menjadi makin keras dan kering.

Dikatakan Armin, bahwa bagaimana Tuhan menciptakan makhluk hidup yang tidak terlihat yang disebut mikroorganisme, makhluk kecil yang hanya bisa di lihat dengan mikroskop yang mana jumlahnya ada miliaran di alam raya. Mikroorganisme inilah yang selama berabad-abad menyiapkan makanan bagi tanaman apapun di atasnya. Ada empat fase dalam pertumbuhan tanaman: (1) Pra pertumbuhan; (2) Pertumbuhan; (3) Peralihan dan, (4) Produksi/berbuah. Dimana pada fase ini tanaman butuh nitrogen, fosfor, Kalium, Calsium, dan herbal, dan semua ini tergabung dalam nutrisi.

Fungsi dari nitrogen sendiri gunanya untuk pertumbuhan tanaman, fosfor memperkuat ranting atau dahan tanaman, kalium untuk merangsang bunga atau merangsang pertumbuhan batang. Sementara itu ada tiga hal yang perlu di perhatikan dalam tanah: (1) Mikroba, dia yang menentukan kurang tidak suburnya tanah; (2) Rumput, untuk menjaga kelembaban tanah sehingga membuat mikroorganisme hidup dalam tanah (3) Air Laut, 1 liter air laut : 1 liter air tanah, di siram pada tanah.

Pada hari pertama ini materi yang di berikan berupa teori, sedangkan hari kedua dan ketiga masuk pada proses prakteknya. Pada teori ini peserta diberi dasar-dasar terkait dengan pertanian alami dan tahap-tahap pembuatan pupuk organik. Pada hari kedua peserta dilatih untuk membuat pupuk organik. Bahan-bahan yang digunakan di antaranya: bawang butih, gula merah, jantung pisang (fosfor), jahe (herbal), bawang putih (herbal), buah nenas masak (calcium), buah pepaya mentah (fosfor), batang pisang (kalium), kangkung (kalium), ikan (nitrogen), pisang masak (calcium), dan nasi putih (microba).

Organisasi dan Pengembangan Usaha

Agar pertanian alami dapat diterapkan di

dalam suatu komunitas, desa, atau wilayah, organisasi dan perencanaan usaha juga harus diperkuat. Organisasi yang kuat akan menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat posisi petani ketika berhadapan dengan berbagai kondisi, termasuk dalam mengembangan usaha yang kompetitif.

Organisasi yang kuat sangat penting, karena posisi petani subsisten ketika berdiri sendiri tidak mempunyai kekuatan apa pun. Industri pertanian mempunyai kekuatan raksasa, karena itu organisasi petani, harus diperkuat untuk menaikkan dan posisi tawar ketika berhadapan dengan industri pertanian dan pihak-pihak dari luar.

Menurut Armin, ada empat hal yang harus kita bangun demi kemajuan desa atau wilayah, yaitu: (1) Pemerintah Desa, bagaimana kita membangun dan bekerja sama dengan Pemerintah desa untuk memajukan pembangunan di desa; (2) Masyarakat, dengan melibatkan kelompok-kelompok di desa dan masyarakat yang ada di dalam maupun diluar desa untuk bekerja sama; (3) Sumber Daya Alam/Lingkungan; potensi-potensi apa yang harus kita gali di desa untuk menghasilkan keunggulan; dan (4) Nilai-Nilai dan Aspek lain yang ada di desa.

Akhirnya, alam telah menyediakan segala sesuatu secara seimbang. Manusia yang memanfaatkan alam harus menjaga keseimbangan tersebut untuk kepentingan manusia dan lingkungan. Ketika bertani pun harus selaras alam!! **(SIJU MOREIRA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Maria

Belajar untuk Maju dan Bisa Berbuat

Nama lengkapnya Maria Funan. Namun dia lebih akrab disapa Mama Maria. Perempuan yang lahir di Halilulik 13 Maret 1978 adalah Ketua Kelompok Konstituen (KK) Husar Ida Binan Ida, Desa Leuntolu, Kecamatan Rainmanuk, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sebagai Ketua KK Husar Ida Binan Ida, Maria tergolong cekatan dalam mengelola organisasi ini. Walaupun Maria hanya lulusan Sekolah Dasar (SD) dan hanya seorang ibu rumah tangga, dia mempunyai kemampuan dan keberanian. Kemampuannya mengorganisasikan teman-temannya di KK patut diacungi jempol. Demikian juga, keberaniannya bersama KK mendampingi korban perempuan dan anak patut dicontoh.

Sebelumnya Maria hanyalah anggota pada KK Husar Ida Binan Ida. Ketua KK pertama adalah isteri kepala desa setempat. Namun, karena isteri kepala desa sakit, akhirnya Maria ditunjuk untuk

Kabupaten Belu

menggantikannya. Anggota yang lain pun menyetujui Maria sebagai ketua, karena selain aktif, Maria juga mempunyai kemampuan.

Maria menerima dan menyatakan bahwa, yang paling penting adalah selalu bersama dengan semua pengurus dan anggota, serta mendapat pelatihan dan pendampingan dari PPSE KA (Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua), yang merupakan mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Selalu Belajar

Maria adalah perempuan desa pembelajar. Menyadari dirinya hanyalah lulusan SD, Maria tergolong sangat tekun ketika mengikuti pelatihan-pelatihan, baik yang dilakukan oleh PPSE-KA atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) lainnya, pemerintah, maupun kegiatan-kegiatan kerohanian yang dilaksanakan oleh gereja.

Menurutnya, belajar untuk mendapatkan ilmu itu di mana saja. Mengikuti pelatihan, diskusi-diskusi warga, mendengar nasehat keagamaan, dan lainnya juga memperoleh ilmu, sehingga bisa menambah wawasan. Bagi Maria setiap orang harus selalu belajar, kapan dan dimanapun untuk mengembangkan diri.

Bermodalkan kepercayaan dan terus belajar, Maria bersama KK ingin mengembangkan kelompok tersebut sehingga berguna untuk warga. Mereka sangat yakin bahwa warga bisa mandiri dan berdaya, namun itu dibutuhkan kerja keras dan waktu. Warga harus bersama-sama untuk mencapai kemajuan. Kelompok atau organisasi merupakan salah satu wadah yang dibutuhkan untuk memperkuat dan memberdayakan warga.

Menurut Maria, selama ini warga terbiasa menerima bantuan tunai, sehingga mereka kemudian selalu mau menunggu bantuan. Walaupun itu merupakan hak-hak warga yang miskin, namun bantuan tunai ternyata tidak memperbaiki kondisi warga. Warga yang menerima bantuan tunai akan terus menunggu bantuan tunai, dan sulit sekali untuk mengubah diri.

Maria dan teman-temannya yang bergabung dalam kelompok berusaha untuk memengaruhi pikiran warga, terutama perempuan yang telah sekian lama dimanja dengan segala bantuan tunai itu. Namun itu, tidak mudah. Maria dan kelompok terus berusaha untuk mengajak dan menyakinkan kepada warga agar bersama-sama memikirkan dan berbuat sesuatu untuk mengatasi permasalahan perempuan di desa.

Berbuat untuk Orang lain

Sejak dibentuk, KK Husar Ida Binan Ida telah mendamping beberapa kasus yang korbannya adalah perempuan dan anak. Pertama kali, KK menerima laporan mengenai warga yang kehilangan kontak dengan keluarganya yang menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di Malaysia. KK merapatkan kasus ini, kemudian menghubungi pihak-pihak yang dianggap berkompeten untuk menyelesaikan kasus ini.
Dari kasus pertama ini, pengurus dan KK belajar mengenai jaringan. Jika KK berjejaring dengan lembaga lain, maka kasus-kasus yang masuk lebih mudah ditangani. Dari situ juga mereka sadar bahwa, pemerintah juga sudah berusaha untuk memastikan warga yang kehilangan kontak dengan keluarganya. Namun, warga juga harus sadar agar tidak menjadi TKI yang berangkat secara illegal.

Kasus yang cukup menyita perhatian yang ditangani oleh Maria dan KK adalah kasus pemerkosaan anak berusia 15 tahun hingga hamil. Pelaku mengancam korban dan keluarga korban. Maria dan KK menangani kasus ini, mulai dari melaporkan pelaku ke polisi, ke rumah aman, dan mengurus kebutuhan administrasi untuk penanganan kesehatan korban.
Sebagai langkah strategis, Maria dan KK juga melaporkan kasus ini ke Pastor Paroki untuk mendapatkan dukungan moral. Maria dan KK juga membangun komunikasi dengan Forum Peduli Perempuan dan Anak (FPPA), sehingga kasus ini pun mendapat perhatian banyak pihak, tidak hanya di Atambua saja.

Menurut pengalaman Maria, sebelumnya ada kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena pelakunya orang-orang berpengaruh. Atau

kasus-kasus itu tiba-tiba hilang dan dilupakan, karena korban ketakutan, dan tidak ada perhatian dan kepedulian orang lain. Jika orang-orang tidak berani dan terus-menerus mendiamkan, maka pelaku akan mengulangi lagi perbuatannya, atau orang tidak takut melakukan kejahatan terhadap perempuan dan anak.

Maria merasa sangat senang karena dia bisa membantu orang lain. Apalagi yang dibantu adalah perempuan yang menderita. Dia juga merasa heran karena di masyarakat, masih orang menyalahkan perempuan yang menjadi korban. Namun bagi Maria, tentu dibutuhkan penyadaran agar masyarakat sadar bahwa, korban harus dibantu untuk kuat dan kembali beraktifitas, bukan dengan menyalahkannya.

Maria dan KK biasanya menggunakan biaya sendiri ketika membantu korban. Namun, bagi Maria dan kelompoknya bukanlah masalah. Bahkan ada juga yang menilai, Maria sebagai orang yang kurang kerjaan karena mengurusi masalah orang lain. Namun, Maria selalu menanggapinya dengan sabar dan senyum. Baginya yang penting memperjuangkan kebenaran sama halnya dengan kegiatannya mengikuti kelompok Doa di Legio Maria. Baginya semua hal yang dipercayakan kepadanya memang tidak bisa dikerjakannya sendiri, tetapi dengan bekerjasama, konsultasi dan koordinasi dengan semua pihak yang paham tentang apa yang diperjuangkan akan memperoleh hasil yang baik.

Karena keaktifan KK Husar Ida Binan Ida yang diketuai oleh Maria, maka ketika Yayasan BaKTI mereplikasi Pertanian Alami Ke Atambua, Desa Leuntolu dipilih sebagai wilayah untuk pengembangan pertanian tersebut. Pertanian yang dikembangkan oleh Petani Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini diharapkan mengubah cara bertani agar ramah lingkungan. Dan Desa Leuntolu diharapkan menjadi salah satu pionirnya. **(FRIDA ROMAN & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

KOTA

PARE PARE

Mitra :

YLP2EM

(Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat)

Integrasi Jamkesda-BPJS untuk Warga Miskin

Catatan Advokasi BPJS Kesehatan di Parepare

Mulai 1 Januari 2014 sistem jaminan sosial terbaru atau JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) resmi diberlakukan. Sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), ditetapkan baahwa, seluruh masyarakat Indonesia akan dijamin kesehatannya dan kepesertaannya bersifat wajib. Untuk masyarakat misikin, pembiayaan individu akan ditanggung oleh pemerintah.

Sebelumnya, di beberapa daerah, pemerintah daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat dalam berbagai skema, misalnya Jamkesda (Jaminan kesehatan daerah). Pemerintah Kota Parepare adalah salah satu pemerintah daerah yang menerapkan Jamkesda yang didukung oleh Pemerintah

Provinsi Sulawesi Selatan dalam Program Kesehatan Gratis sejak Juli 2008.

Rapat di Kantor BPJS

Namun, sejak tahun 2014, dengan berlakunya JKN yang dikelola oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), dan rencana integrasi peserta Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare, membuat warga Parepare resah.

Pasalnya, selain kurangnya sosialisasi, baik rencana Pemkot Parepare untuk mengintegrasikan Jamkesda ke dalam BPJS Kesehatan, maupun prosedur dan syarat menjadi Peserta BPJS-Kesehatan. Justru masyarakat mendapatkan informasi yang simpang siur, misalnya waktu berlakunya Jamkesda hanya sampai 20 Agustus 2015 di Puskesmas (Pusat kesehatan masyarakat).

Masalah Jamkesda dan berlakunya JKN juga menjadi isu menarik pada Diskusi mengenai Tema MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) pada awal Januari 2015 yang dilaksanakan atas kerjasama YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dan Yayasan BaKTI. Minimnya sosialisasi program perlindungan sosial pemerintah—seperti JKN-BPJS, data warga miskin yang tidak valid, warga miskin yang tidak mendapat perlindungan sosial, dan bantuan yang salah sasaran merupakan masalah yang selalu mengemuka.

Keresahan masyarakat mengenai Jamkesda-BPJS Kesehatan di Parepare terlihat dari laporan pengaduan Kelompok Konstituen (KK). Sebagai lembaga yang dibentuk untuk mendorong keberdayaan masyarakat, KK menerima berbagai pengaduan, termasuk pengaduan mengenai Jamkesda-BPJS Kesehatan yang jumlahnya meningkat pada awal Agustus 2015. Sebagian pengaduan telah sampai ke YLP2EM. Sebagai mitra Yayasan BaKTI dalam Program MAMPU, YLP2EM kemudian membicarakan perkembangan pengaduan KK terkait dengan Jamkesda-BPJS Kesehatan, kemudian dilanjutkan dengan mini workshop staf

Hasil TA dan Mentoring KK mengenai BPJS, dipetakan dan dikomunikasikan pada pihak Pemkot Parepare dan Pengelola BPJS dalam Wokshop Advokasi Kebijakan tentang BPJS dan JKN serta Pengelolaan Pengaduan Masyarakat,

Program MAMPU dengan Pengelola BPJS Parepare di Kantor BPJS Parepare pada 14 Agustus 2014.

Dalam workshop tersebut terungkap bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan di Parepare baru mencapai 24.000 orang, padahal ditargetkan 62.955 orang. Demikian disampaikkan Jabbar, Kepala Unit Pemasaran BPJS Parepare saat itu. Hasil pertemuan dengan BPJS Parepare ditindaklanjuti dengan beberapa seri pertemuan dengan KK melalui TA (Technical Assistance) dan mentoring Penguatan KK tentang BPJS di masing-masing kelurahan, di antaranya mengenai prosedur dan syarat pengurusan kepesertaan BPSJ, batas waktu berlakunya Jamkesda (sampai akhir Desember 2015), dan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dari pemerintah.

Respon Kelompok Konstituen

Dalam pertemuan dengan KK terungkap beberapa cerita menarik. Ibu Doly, Ketua RT, yang juga seorang pengurus KK mengatakan bahwa, ada beberapa warganya belum ter-cover dalam BPJS Gratis, termasuk ibu yang melahirkan (anaknya belum tercatat dalam KK). Ibu Doly pada saat itu telah mengumpulkan 110 Kartu Keluarga untuk didaftar kembali. Sementara Ibu Isfawanty, yang juga pengurus KK punya pengalaman dengan membawa suaminya berobat ke Puskesmas dan kaget ketika ada oknum petugas layanan menginfokan bahwa Jamkesda berakhir bulan depan (September 2015).

Pengurus KK yang lain, Ibu Khatija, memiliki data di Puskesmas, dimana seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) pemegang Askes (Asuransi kesehatran) juga terdata sebagai BPJS Gratis. Hal lain yang terungkap dalam diskusi yakni dari Ibu Hartati, Koordinator KK, sempat mengutif pernyataan Jhon Penannangan, Plt (Pelaksana tugas) Ketua DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Parepare yang berasal dari Pemilihan Kecamatan Soreang. Menurutnya, Ketua DPRD Parepare akan mempertanyakan kepada Dinas Kesehatan perihal kekisruhan data BPJS Gratis dan layanan Puskesmas yang tidak lagi menerima peserta Jamkesda.

Sementara menurut Ibu Nurjanna, seorang Ketua RW dan pengurus KK Bahagia, Kelurahan Wattang Soreang, Kecamatan Soreang, mengatakan bahwa, adanya informasi tidak jelas sehingga KK merespon untuk mengumpulkan kembali Kartu Keluarga warga. Di sisi lain, Ibu Amriani, staf Kelurahan Wattang Soreang, mengakui bahwa, kekisruan tersebut terjadi karena data dari Dinas kesehatan, bukan data per kelurahan, melainkan data dari layanan Puskesmas.

Ibu Bidayani, juga seorang Koordinator KK mengungkapkan pernyataan Amiruddin Said (anggota DPRD Parepare) pada saat Reses. Amiruddin Said menyatakan akan berkoordinasi dan memastikan kesedian BPJS untuk mensosialisasikan kembali Program BPJS. Di samping itu, Amiruddin Said berjanji akan koordinasi dengan anggota DPRD yang lain untuk melakukan sidak di sejumlah layanan kesehatan termasuk Puskesmas.

Di KK Kartini, Kelurahan Cappa Galung, Kecamatan Bacukiki Barat, dalam Buku Pengaduan Agustus 2015, tercatat 110 pemegang Jamkesda belum dialihkan ke BPJS-PBI (Penerima Bantuan Iuran). Hal ini sudah dikeluhkan oleh Andi Nurhanjayani, anggota DPRD asal daerah pemilihan Bacukiki dan Bacukiki Barat, pada saat Reses Agustus 2015.

Andi Nurhanjayani berjanji akan menanyakan langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Tindak Lanjut

Hasil TA dan Mentoring KK mengenai BPJS, dipetakan dan dikomunikasikan pada pihak Pemkot Parepare dan Pengelola BPJS dalam Wokshop Advokasi Kebijakan tentang BPJS dan JKN serta Pengelolaan Pengaduan Masyarakat, 15 September 2015 di Hotel Grand Kartika. Dalam workshop itu menghadirkan narasumber dan peserta aktif yakni Hj. Nating, mewakili Kepala Dinas Kesehatan Parepare dan Ade Satriya dari BPJS Parepare. Disamping hadir pula pengelola Puskesmas dan Rumah Sakit serta wakil KK. Sementara DPRD Parepare diwakili oleh Ibu Andi Nurhanjayani. Dalam Workshop itu tersebut hadir pula M. Taufan dan M. Ghufran H. Kordi K., dari Program MAMPU-BaKTI untuk memberikan masukan soal penanganan pengaduan.

Akhir Agustus 2015, beberapa anggota DPRD Parepare melakukan sidak di beberapa Puskesmas untuk mengetahui pengguna Jamkesmas/Jamkesda sebelum mempunyai Kartu BPJS-PBI. Demikian halnya pihak Kelurahan melalui Ketua RW/RT menghimbau kepada warga untuk memasukan kembali Kartu Keluarganya yang belum termuat kepesertaannya pada BPJS. Dalam pendataan dan pengumpulan foto copy Kartu Keluarga, Pengurus KK terlibat aktif dengan mendatangi warga bersama Ketua RW/RT di masing-masing kelurahan.

Pada Reses anggota DPRD Parepare, Andi Nurhanjayani menerima masukan yang banyak mengenai BPJS di di Perumahan Yasmin, Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Bacukiki Barat, 14 Agustus 2015. Hal serupa juga dilakukan oleh Plt Ketua DPRD Parepare John Panannangan yang melakukan Reses di Jalan Takkalao Kelurahan Bukit Indah Kecamatan Soreang, 12 Agustus 2015. Masalah pelayanan dasar, termasuk BPJS, masih mendominasi aspirasi warga dalam reses tersebut.

Sebelumnya, pada 11 Agustus 2015 bertempat di Ruang pertemuan Walikota Parepare, dilaksanakan Mini Workshop Strategi Tindak Lanjut Kertas Posisi 5 tema MAMPU. Dalam Mini Workshop tersebut, Walikota Parepare, HM. Taupan Pawe mengatakan bahwa, Program MAMPU melalui lima isunya Memperkuat program Pemkot terhadap kaum perempuan. Walikota di hadapan peserta Workshop mengintruksikan kepada Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait untuk menindaklanjuti Kertas Posisi tersebut. Workshop dihadiri oleh Ketua DPRD, para Kepala SKPD, Prof. Dr. Siri Dangnga, MS (Direktur Pasca Sarjana UMPAR) yang juga Ketua Dewan Pembina YLP2EM, dan Muh. Yusran Laitupa dari Yayasan BaKTI, wakil Program MAMPU-BaKTI.

Gayungpun bersambut, Kepala Bappeda Parepare, Zahrial Djafar mengundang beberapa SKPD yang tupoksi (tugas pokok dan fungsinya)-nya terkait dengan 5 tema MAMPU untuk menindaklanjuti komitmen Walikota dalam mengintegrasikan 5 tema MAMPU kedalam RKPD Tahun Anggaran 2016 di Kantor Bappeda, 20 Agustus 2015. Dalam pertemuan itu hadir Kepalda Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Sosial, Perindustrian dan Perdagangan, serta Badan KBPP (Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan) melalui Kegiatan TA dan Mentoring RKA Responsif Gender.

Akhirnya, pada 8 Oktober 2015 bertempat di Restoran Dinasty, Pemkot Parepare menandatangi MoU *(Memorandum of Understanding)* dengan BPJS Parepare untuk mengintegrasikan Jamkesda ke dalam BPJS sebanyak 62.955 warga Parepare. Pemkot Parepare telah menganggarkan Premi BPJS-PBI dalam APBD 2016. Program yang dinamakan Penyediaan Layanan Kesehatan Masyarakat (BPJS-PBI) tersebut dianggarkan sebesar Rp. 17.940.000.000.

Anggota DPRD Kota Parepare, John Panannangan berjanji akan terus melakukan kontrol terhadap pelayanan kesehatan bagi warga, baik itu warga yang telah menjadi peserta BPJS Kesehatan melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD maupun pasien umum lainnya. Saat ini sebanyak 62.955 jiwa yang telah terdaftar untuk mendapatkan PBI daerah dan baru sekitar 24.000 jiwa yang telah diverifikasi untuk mendapatkan kartu dari BPJS Kesehatan yang dibayarkan melalui Pemkot Parepare.

Advokasi untuk mendorong alokasi anggaran di APBD untuk peserta BPJS-PBI ini didukung penuh oleh DPRD Parepare. Dukungan lainnya datang dari forum media " PIJAR" yang terus-menerus memberitakan Program MAMPU kerjasama YLP2EM dan Yayasan BaKTI. Media massa, seperti Pare Pos, Ajatapareng News, Radar online, TV Pare, dan beberapa media lainnya, tidak henti-hentinya memberitakan BPJS Kesehatan dan Beras Sejahtera. Disamping itu, forum media dan YLP2EM juga menyebarkan Bulletin dan lembaran informasi tentang Kepesertaan BPJS-PBI. Dan pihak yang paling gencar membicarakan BPJS di berbagai kesempatan adalah KK. **(SURYANTI AKKAS & ABD SAMAD SYAM)**

Foto : www.makassar.terkini.id

Advokasi Beras Sejahtera di Parepare

Kebijakan Walikota Parepare, Sulawesi Selatan, HM.Taufan Pawe, yang mengratiskan Rastra (beras sejahtera)—dulu: Raskin (beras miskin)—bagi warga miskin mulai 1 Januari 2016 untuk 4.965 penerima di Kota Parepare merupakan kebijakan inovatif. Kebijakan Program Rastra ini tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) dan APBD (Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2016.

Dengan kebijakan tersebut, penerima Rastra tidak lagi dibebani biaya pembelian sebesar Rp. 24 ribu per zak. Seluruh biaya akan ditanggung oleh Pemerintah Kota Parepare. Walikota Parepare, HM Taufan Pawe mengatakan, intervensi pemerintah ini dibutuhkan untuk memastikan program Rastra benar-benar tepat sasaran, karena faktanya meski dikatakan Rastra atau Raskin tetapi masyarakat tetap mengeluarkan biaya untuk dapat memperoleh Rastra *(Pare Pos, 19/12/2015)*.

Kebijakan ini, merupakan komitmen Walikota Parepare HM. Taufan Pawe pada saat Mini Workshop Strategi Tindak Lanjut Kertas Posisi 5 tema MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), Selasa, 11 Agustus, 2015 di Ruang Pertemuan Walikota yang dihadiri oleh Plt. (Pelaksana tugas) Ketua DPRD, Jhon Panannangan, Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Prof. Dr.H. Muh. Siri Dannga, MS, Dewan Pembina YLP2EM (Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) dan M. Yusran Laitupa, dari Program MAMPU Yayasan BaKTI.

Dalam sambutannya, Walikota mengatakan "Program MAMPU melalui lima isunya dapat meneguhkan program pemkot (pemerintah

Sebelum kebijakan Walikota tentang program Rastra Gratis Tahun 2016, lebih awal isu ini, muncul pada saat pembentukan Kelompok Konstituen (KK) pada Maret 2015. Di mana warga mengeluhkan tentang Rastra yang tidak mencukupi, pembagian tidak merata, serta kualitas beras yang buruk.

kota) terhadap kaum perempuan, untuk tidak berhenti pada isu gender. Saya kira bukan hanya political will tetapi political action penting, kami apresiasi program yang dijadikan lokomotif bagi pemkot sekarang dan akan datang dengan memberikan aksi lebih baik dalam mengentaskan kemiskinan." Meskipun Walikota tidak menyebut secara tersurat tentang Program Rastra gratis dalam Mini Workshop tersebut, paling tidak komitmen tersebut dibuktikan dalam kebijakan Anggaran APBD 2016 untuk Program Rastra gratis.

Sebelum kebijakan Walikota tentang program Rastra Gratis Tahun 2016, lebih awal isu ini, muncul pada saat pembentukan Kelompok Konstituen (KK) pada Maret 2015. Di mana warga mengeluhkan tentang Rastra yang tidak mencukupi, pembagian tidak merata, serta kualitas beras yang buruk. Bahkan salah sasaran dan data keluarga penerima yang tidak jelas. Kemudian ditindakalanjuti dengan diskusi penguatan KK pada Agustus –September 2015. Tujuan Diskusi ini sebenarnya mengungkap fakta masyarakat terhadap soal Rastra melalui buku pengaduan masing-masing KK. Data Rastra inilah kemudian KK mengkoordinasikan dengan pihak Kelurahan. KK juga mengungkapkan dan menyampaikan kepada anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) pada saat reses DPRD asal daerah pemilihannya pada Agustus 2015.

Beberapa keluhan warga soal Rastra diungkap oleh Pengurus KK, di antaranya KK Mario Kelurahan Labukkang, Kecamatan Ujung. Menurut Ibu Masdalia, Koordinator KK Mario bahwa, data penerima Rastra sebanyak 264 kepala keluarga pada RTS (Rumah Tangga Sasaran) sementara yang terdata dalam TNP2K (Tim Nasional Percepatan dan Penanggulangan Kemiskinan) sebanyak 128 RTS. Lebih lanjut, Ibu Masdalia merincikan RW 04, data penerima Rastra sebanyak 20 RTS sementara TNP2K 4 RTS, RW 8 100 RTS penerima Rastra, sedangkan data TNP2K hanya 70 RTS, di RW 01 data TNP2K sebanyak 48 RTS, sementara penerima Rastra sebanyak 96 RTS, demikian halnya di RW 02, TNP2K 6 RTS sementara penerima Rastra sebanyak 48 RTS. Dengan demikian selisinya 136 RTS jauh lebih besar dari 264 RTS jatah Rastra dari TNP2K sebanyak 128 RTS (Hasil FGD Mentoring dan TA Penguatan KK, 18 September 2015).

Keluhan Rastra juga terungkap di KK Pancasila Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung. "Saat ini data yang terdaftar sebagai penerima Rastra di RW II hanya 28 orang, sedangkan yang menerima 59 orang sehingga jumlah Rastra sebanyak 28 zak dibagi perliter. Data seharusnya adalah 59 orang akan tetapi mengalami pengurangan sejak tahun 2013 (verifikasi data TNP2K-Dinas Sosial)" ungkap ibu Nureni Tjumma, Koordinator KK Pancasila. Lebih lanjut Terkait dengan data Rastra ini sebenarnya sudah dilakukan klarifikasi pada saat pendataan BPS 2015, hasilnya data 59 penerima Rastra ini masih ada di database BPS, namun tidak pernah dimunculkan. Setelah KK Pancasila melakukan pengecekan dengan pihak BPS ternyata data ini masih ada sehingga usulan KK Pancasila kepada BPS untuk dimasukkan kembali. Lain halnya Ibu Rastina, dari KK Srikandi Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung, juga menyorot soal Rastra, " Di RW 08 tidak merata pembagian Rastra, ada yang menerima 3 bulan sekali bahkan ada yang 4 bulan baru menerima."

Persoalan Rastra juga bahan diskusi di KK Damai Kelurahan Sumpang Minangae, Kecamatan Bacukiki Barat, dimana Ibu Murni (bagian Pengaduan) mengatakan bahwa, yang diresahkan warga adalah Rastra, soalnya ada warga tidak mampu tidak dapat Rastra, karena

tidak memiliki Kartu Penjaminan Sosial (KPS). Sementara Ibu Rosmawati, Koordinator KK Kartini Kelurahan Cappa Galung mengeluhkan soal pendataan yang tidak akurat. Dan Lebih lanjut ibu Rosmawati mengatakan bahwa, sekarang ini lebih banyak jumlah keluarga miskin dari pada jumlah Rastra. Jadi pendataan memang harus benar-benar akurat sehingga penerima bantuan raskin bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini, banyak warga yang dari segi ekonomi pendapatannya sudah mapan dan berkecukupan terdaftar sebagai penerima bantuan Rastra, di sisi lain ada warga yang tidak mampu malah tidak terdaftar sebagai penerima Rastra.

Sementara Pengaduan soal Rastra di KK Sumber Harapan Kecamatan Bacukiki, sebagaimana diungkapkan oleh Hariayani bahwa, banyak warga yang layak mendapatkan Rastra tidak terdaftar sebagai penerima, tetapi ada warga yang penghidupannya sudah sangat layak malah terdaftar sebagai penerima Rastra. Hal yang sama dikemukakan Ibu Ratna Herman, bahwa di RT saya, ada kebijakan dari Ketua RT untuk membagi rata jatah Rastra ke semua warga tanpa kecuali. Tetapi menurut saya, hal itu mungkin akan merugikan warga miskin penerima Rastra karena jatahnya otomatis berkurang. tidak masalah jika pembagiannya memang diperuntukan bagi warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima Rastra.

Hal serupa juga terjadi di Kecamatan Soreang, misalnya di KK Bahagia Wattang Soreang. Jumlah penerima Rastra jauh dari ditetapkan TNP2K, sehingga pihak kelurahan membagi dua kelompok A dan B, sebagaimana diungkapkan Ibu Nurjanna. Begitu halnya di Kelurahan Bukit Indah ada dua kelompok juga. Sedangkan di KK Harapan di Kelurahan Bukit Harapan, menurut ibu Erni, Pengurus KK, bahwa masih ada warga miskin yang tidak mendapatkan Rastra di RW 08, jata beras dari kelurahan hanya 30 sak sedangkan penerima Rastra 90 RTS jadi yang di dapat 6 liter/bulan.

Sejumlah persoalan Rastra inilah, kemudian direspon oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Parepare pada saat Reses di Dapil (Daerah pemilihan) yang berbeda. Misalnya Andi Nurhanjayani,

Musdalipa Pawe, Heri Ahmadi, H. Muliadi dan Ridwan Rombe di Kecamatan Bacukiki dan Bacukiki Barat. Jhon Panannangan, Hj. Apryani Jamaluddin, Abd. Salam Latief, Amiruddin Said, Andi Fudhail, Andi Firdaus Jollong serta H.Tasming Hamid di Kecamatan Soreang. Sementara di Dapil Kecamatan Ujung Bulu, soal Rastra direspon oleh Kuratapai, Andi Darmawangsyah, S. Parman Agus Mante, dan Rahmat Syamsu Alam.

Hasil reses ini kemudian dibahas di tingkat komisi, dan Rapat Gabungan Komisi bahkan pada Rapat Pemerintah Kota Parepare dan DPRD sepakat menandatangani MoU KUA-PPAS APBD perubahan tahun 2015. Penandatanganan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Parepare Senin 14 September 2015. Wakil ketua DPRD Kota Parepare Rahmat Syamsu Alam mengatakan Dewan menyepakati rancangan KUA-PPAS ini setelah melihat urgensi, dasar dan subtansi perubahan yang diajukan. Sementara Walikota Parepare Dr. HM. Taufan Pawe mengatakan penetapan KUA-PPAS ini tetap mengacu pada kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat dan provinsi untuk menjaga sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan guna menyamakan persepsi, penajaman prioritas dalam mendukung agenda pembangunan di Kota Parepare. Pada kesempatan ini juga Walikota menyampaikan pada tahun 2016 mendatang Pemkot telah memikirkan untuk melakukan subsidi terhadap program Rastra/Raskin, karena selama ini masyarakat yang menerima Rastra masih harus mengeluarkan uang untuk dapat menikmati program tersebut dengan adanya subsidi para penerima Rastra diharapkan dapat menikmati program ini secara penuh.

Pernyataan Walikota inilah semakin memperjelas komitmen Walikota untuk Program Rastra Gratis, yang kemudian tertuang dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) 2016 dan direalisasikan dalam APBD 2016. Meskipun telah ada pernyataan Walikota Parepare untuk mengratiskan Raskin 2016, tetapi Kelompok Konstituen tidak diam, justru malah sebaliknya. Para wakil dari KK melakukan beberapa kali pertemuan persiapan untuk kunjungan ke Instansi terkait di Kantor YLP2EM untuk mempermantap hasil laporan pengaduan KK dan diskusi mentoring dan TA Penguatan KK. Maka pada tanggal 28 Oktober 2015, untuk melakukan kunjungan ke SKPD terkait dimana 22 Wakil KK membagi diri untuk melakukan kunjungan 15 SKPD terkait, salah satunya ke Bappeda dan Setdako (Bagian Ekonomi dan Kesra). Salah satu pertanyaan kunci yakni program apa saja yang bersentuhan langsung dengan kelompok miskin dan perempuan. Selanjutnya 22 Wakil KK, mengadakan pertemuan di Aula RSUD Andi Makassau, 13 Nopember 2015 untuk coaching persiapan hearing dengan DPRD. Adapun hasilnya yakni ada data pengaduan yang akan di-hearing-kan serta terbentuknya Tim 9 yang akan menyusun Pokok-pokok pikiran. Dua hari Tim 9 ini bekerja yang didampingi oleh staf YLP2EM untuk menyusun Pokok-pokok pikiran tersebut yang akan ditawarkan oleh KK sebelum APBD 2016 disahkan. Besoknya jam 11.00 Wita, Senin 16 Nopember 2015. Perwakilan KK, dan warga miskin diterima oleh Andi Firdaus Jollong, Wakil Ketua DPRD dan Andi Nurhanjayani. Karena waktu singkat, Juru Bicara Tim 9 ibu Madina dari KK Damai menyampaikan resume Pokok-pokok pikiran. Dan Pimpinan menerima pokok-pokok pikiran tersebut dan akan memberikan ke masing-masing anggota DPRD.

Akhirnya pada tanggal 30 Nopember 2015, APBD 2016 ditetapkan oleh DPRD dengan Walikota Parepare. Komitmen Walikota tentang Program Rastra Gratis tertuang dalam APBD 2016.

Advokasi terhadap kebijakan pemerintah dalam hal perlindungan sosial bagi warga miskin—salah satunya adalah Rastra—adalah bagian dari kegiatan Program MAMPU kerjasama YLP2EM dan Yayasan BaKTI. Disamping itu itikad baik dan *political will* dari Pemkot Parepare, dan anggota DPRD Parepare. Keberhasilan ini juga atas dukungan penuh dari Forum Media yang terus-menerus memberitakan masalah sosial dan membentuk opini publik. **(ABD SAMAD SYAM & SURYANTI AKKAS)**

Reses Partisipatif di Parepare

Reses atau masa reses adalah masa di mana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan di luar masa sidang, terutama di luar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Reses menjadi penting karena anggota DPR/DPRD mengunjungi konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk : (1) menyampaikan/melaporkan apa yang telah dikerjakannya sebagai anggota DPR/DPRD; (2) memantau/mengawasi realisasi pembangunan di dapil masing-masing; (3) melihat lebih dekat berbagai permasalahan di dapil; dan (4) menerima atau menjaring aspirasi konstituen di dapil.

Sayangnya pelaksanaan reses selama ini selalu dikritik, bahkan dianggap sebagai kegiatan tidak berguna, karena tidak lebih dari kegiatan anggota DPR/DPRD untuk menghabiskan anggaran, jalan-jalan, dan sekadar menjalankan rutinitas yang telah ditetapkan dalam aturan formal, undang-undang atau pun tata tertib DPR/DPRD.

Anggota DPR/DPRD yang bertemu dengan konstituen terlalu banyak berpidato satu arah, yang umumnya juga dihadiri oleh aparat pemerintah dan tokoh-tokoh masyarakat, yang sebagian besar adalah laki-laki. Karena itu,

usulan konstituen yang diterima oleh anggota DPR/DPRD umumnya berupa usulan pembangunan sarana fisik, yang merupakan kepentingan kelompok-kelompok elit dan laki-laki.

Karenanya reses anggota DPR/DPRD pun ikut melestarikan kemiskinan dan meneguhkan ketidakdilan. Masyarakat miskin dan kaum perempuan tidak selalu menjadi konstituen penting, karena situasi reses dibuat menjadi kegiatan formal, elitis, dan maskulin.

Berangkat dari kondisi tersebut, melalui Program Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (MAMPU) Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) dan mitra-mitranya mengembangkan Reses Partisipatif di wilayah program di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Konstituen sebagai Subyek

Di Parepare, mitra BaKTI, Yayasan Lembaga Penelitian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (YLP2EM) mulai memperkenalkan Reses Partisipatif kepada anggota DPRD Kota Parepare. Reses Partisipatif adalah pelaksanaan reses dengan menempatkan konstituen sebagai subyek. Metode reses tidak satu arah, tetapi dari banyak arah untuk menerima aspirasi dari konstituen. Peserta reses harus berimbang antara laki-laki dan perempuan, serta dari berbagai unsur dan strata masyarakat.

Salah satu anggota DPRD Parepare yang menerapkan Model Reses Partispatif adalah Andi Nurhanjayani, anggota Komisi II DPRD Kota Parepare Dapil Bacukiki dan Bacukiki Barat. Reses dilaksanakan pada Jumat 14 Agustus 2015, bertempat di Perumahan Yasmin Garden Blok H Kota Parepare. Peserta yang diundang untuk mengikuti reses sebanyak 50 orang yang mewakili setiap kelurahan yang ada di Dapil Bacukiki dan Bacukiki Barat.

Kegiatan Reses Partisipatif diawali dengan penjelasan oleh fasilitator, Ibrahim Fattah dan Muslimin A.Latief tentang maksud dan tujuan Reses Partisipatif, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Andi Nurhanjayani seputar program dan kegiatan yang telah diperjuangkan, prioritas pembangunan pada tahun berikutnya (2016) dan harapan terhadap pelaksanaan reses kali ini.

Jika pada umumnya reses dilakukan dengan metode ceramah dan tanya jawab, maka model Reses Partisipatif, peserta dibagi kedalam 6 kelompok diskusi untuk membahas 6 isu pembangunan yaitu: (1) pendidikan, (2) kesehatan, (3) infrastruktur, (4) ekonomi, (5) perempuan dan anak; serta (6) sosial-kemasyarakatan. Setiap kelompok diskusi beranggotakan 8 orang. Setelah diskusi kelompok dilanjutkan dengan presentasi masing-masing kelompok dan dilanjutkan dengan tanggapan dari kelompok lainnya. Keenam isu tersebut terungkap berbagai macam masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dibandingkan dengan reses konvensional, isu yang selalu menonjol dan umumnya dibicarakan adalah infrastruktur.

Bukan hanya Konstituen Laki-laki

Jika berkaca pada model reses yang selama ini dilakukan oleh anggota parlemen, dengan anggaran yang besar seharusnya mendapatkan usulan-usulan yang variatif dari masyarakat, tetapi yang terjadi pada setiap reses adalah, usulan yang banyak dikeluhkan atau disampaikan warga adalah melulu infrastruktur. Sehingga warga miskin yang harusnya mengusulkan kebutuhan-kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan langsung atau pokok, permodalan, dan penguatan ekonomi tidak pernah terekam, karenanya program atau proyek yang direalisasikan pun sulit menyentuh mereka.

Selama ini, reses yang sudah konvensional, peserta reses didominasi oleh laki-laki. Itu karena elit di masyarakat pun didominasi oleh laki-laki. Perempuan sekadar pelengkap dan penyedia konsumsi. Elit yang laki-laki ini pun hanyalah orang-orang yang dekat dengan anggota DPR/DPRD, seperti aparat pemerintah, tim sukses, dan tokoh-tokoh setempat.

Penentuan peserta reses konvensional biasanya dilakukan oleh elit partai dan tim sukses, sehingga peserta reses hanya dari kelurahan/desa tertentu saja, tidak mewakili unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat. Pola ini diubah dalam Reses Partisipatif, di

mana peserta reses adalah konstituen di seluruh daerah pemilihan.

Peserta Reses Partisipatif di Parepare merupakan perwakilan dari semua kelurahan yang menjadi Dapil anggota DPR/DPRD. Penentuan peserta reses dilakukan oleh Kelompok Konstituen, dan dari masing-masing kelurahan sebanyak 5 orang, yang di dalamnya terdapat wakil dari perempuan miskin. Peserta reses tidak hanya pemilih dari anggota DPRD yang melakukan reses, tetapi dari semua unsur dan strata sosial di masyarakat. Dan Reses Partisipatif tidak lagi didominasi oleh konstituen laki-laki.

Metode Reses partisipatif yang diterapkan oleh Andi Nurhanjayani ini, peserta bisa menyampaikan pendapat dalam diskusi kelompok, sehingga peserta yang tidak biasa berbicara di depan umum bisa mengeluarkan aspirasinya, semua persoalan bisa terakomodir dalam diskusi kelompok, usulan dari konstituen lebih bervariasi sesuai dengan persoalan di masyarakat, tidak hanya fokus pada satu kepentingan saja atau satu masalah saja, dan ada metode evaluasi setelah reses sehingga menggambarkan perasaan peserta selama mengikuti reses.

Berikut komentar anggota DPRD Parepare yang menerapkan Reses Partisipatif, Andi Nurhanjayani, *"Saya sudah ke 17 kalinya melakukan reses, baru kali ini saya memperoleh informasi yang lengkap, mendalam dan merata pada semua sektor, model Reses Partisipatif ini saya berharap semoga bisa diterapkan oleh anggota DPRD lainnya".*

Sementara Dina Maliah, Koordinator Kelompok Konstituen Lumpue, menyatakan "Model Reses ini lebih tersistematik karena menggali akar masalah dari masyarakat secara langsung dan harapan kami ke depan semoga bisa ditindaklanjuti"

Komentar lain datang dari Yustisiana Yahya, Koordinator Kelompok Konstituen Lompoe "Model reses ini sangat inovatif dan bagus. Peserta reses bisa mengungkapkan unek-unek yang terjadi di masyarakat tanpa merasa malu-malu karena dikemas dalam bentuk diskusi, dan harapan kami semoga masukan kami dapat diakomodir." **(M. GHUFRAN H. KORDI K. & SURYANTI AKKAS)**

Meningkatkan Kelembagaan Urusan **Perempuan dan Anak**

Sebagian besar masyarakat dan aparat pemerintah menganggap bahwa, urusan perempuan dan anak adalah urusan kecil atau urusan ecek-ecek. Anggapan ini berasal perspektif atau pandangan yang keliru yang berakar dari masyarakat patriarki yang memandang rendah terhadap perempuan dan anak. Perempuan ditempatkan sebagai manusia kelas dua setelah laki-laki, sedangkan anak semakin menjauh karena berada di kelas tiga setelah laki-laki dan perempuan dewasa.

Karena dianggap rendah dan jauh secara sosial dan budaya, maka perempuan dan anak dijauhkan dari pusaran kebijakan. Perempuan dan anak tidak selalu dihitung dalam kebijakan, kecuali untuk hal-hal yang dianggap penghias dan pelengkap. Makanya sejak dulu, sebagian besar program pemerintah maupun organisasi sosial untuk perempuan dan anak, tidak pernah jauh dari menjahit, memasak, merawat anak, mengurus rumah, dan sejenisnya.

Paradigma berubah ketika pada tahun 2000 melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, pemerintah hendak mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun jalan menuju pencapaian kesetaraan dan keadilan gender masih jauh dan tidak mulus.

Tetap Menjadi Subordinat

Setelah lahirnya Inpres tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, berbagai kebijakan

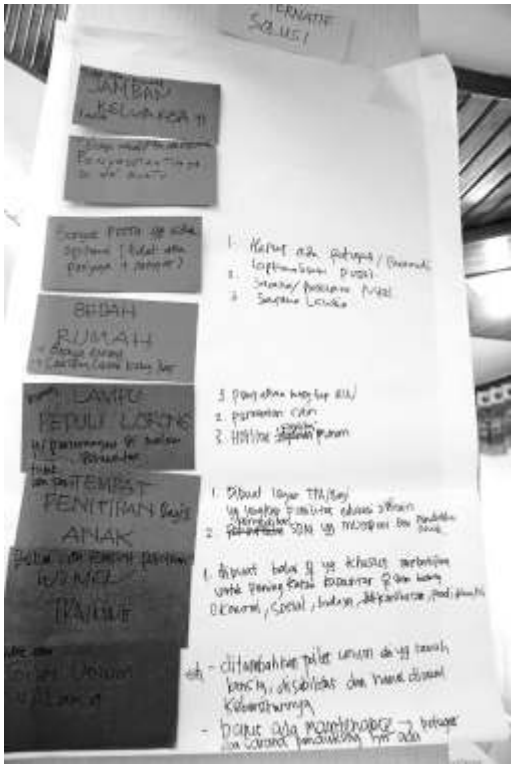

mengalami perubahan, termasuk dibentuknya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Program-program yang dibuat untuk mengubah perspektif aparat pemerintah dan stakehodelrs terus dilakukan. Harapannya para pengambil kebijakan dapat melahirkan kebijakan yang adil terhadap perempuan dan anak.

Namun, banyak sekali tantangan untuk membuat kebijakan yang merespon perempuan dan anak. Kebijakan yang dianggap baik di tingkat nasional tidak selalu mudah diimplementasikan di tingkat daerah, karena kendala di daerah tidak hanya perspektif, tetapi juga kelembagaan. Lembaga yang menjadi penanggungjawab urusan perempuan dan anak masih menjadi subordinat di berbagai dinas dan badan. Ada yang menjadi bidang di Badan Keluarga Berencana, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Sosial, dan sebagainya.

Dengan posisi subordinat, urusan perempuan dan perlindungan anak, tidak menjadi urusan utama dan penting di daerah. Perempuan dan anak bahkan disebut sambil lalu pada RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Itu berarti, perempuan dan anak tidak dianggap penting pada induk kebijakan di daerah.

Beberapa daerah mulai mengangkat status institusi yang mengurus perempuan dan anak lebih baik, misalnya Kota Makassar yang membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BPPPA) sejak 2013. Demikian juga Provinsi Sulawesi Selatan yang membentuk Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sejak 2011. Namun demikian, tidak banyak daerah mengangkat kelembagaan yang mengurus perempuan dan anak.

Hingga pada tahun 2015 ketika pemerintah pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2015 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur bahwa urusan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, yang harus diwadahi dalam bentuk dinas.

Namun, untuk mengangkat urusan perempuan dan perlindungan anak menjadi dinas tidak mudah, apalagi dinas bertipe A (dinas dengan beban kerja besar). Diperlukan advokasi untuk menyakinkan pengambil kebijakan di daerah bahwa, perempuan dan perlindungan anak membutuhkan lembaga yang besar.

Belajar dari Parepare

Di Kota Parepare, Pemerintah Kota Parepare (Pemkot) melalui Bagian Organisasi Tata Laksana di bawah koordinasi Sekretaris Daerah dalam menyusun Draft Perubahan Kelembagaan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), berencana memisahkan Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPP) dalam SKPD terpisah. Namun persoalannya karena Urusan Pemberdayaan Perempuan dalam Draft Kelembagaan baru hanya dipindahkan ke SKPD lain atau mau digabungkan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (BPMK), SKPD ini pengganti dari Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) di era Orde Baru.

Sementara berdasarkan hasil pemetaan dan verifikasi kelembagaan masing-masing SKPD yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri

pada bulan Juli, hasilnya BPMK mendapat grade C sedangkan Pemberdayaan Perempuan mendapat grade A.

Merespon situasi ini, tim YLP2EM (Yayasan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) yang dipimpin Ibrahim Fattah bersama Tim Program MAMPU dari Yayasan BaKTI, yaitu Lusy Palulugan dan Misbakhul Hasan, memanfaatkan momentum revisi RPJMD Parepare, pada tanggal 8-9 Agustus 2016 di Kantor Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) Parepare, untuk membicarakan isu kelembagaan tersebut. Saat itu Bappeda meminta pendampingan atau bantuan teknis *(technical assistance,* TA) dan mentoring dari Program MAMPU BaKTI.

Dalam presentasi Misbakhul Hasan, terungkap bahwa dalam kurun waktu tiga tahun terakhir (2014-2016), Program Pemberdayaan Perempuan belum menjadi prioritas Pemkot Parepare, dilihat dari alokasi anggaran yang masih sedikit dibandingkan dengan program pada sektor lain. Anggaran merupakan indikator untuk menilai politik anggaran suatu daerah terhadap sektor tertentu. Momentum TA dan mentoring ini sekaligus dijadikansebagai pintu masuk untuk membicarakan kelembagaan Pokja (Kelompok Kerja) PUG (Pengarusutamaan Gender) yang dalam hal ini diketuai secara *ex officio* oleh kepala Bappeda dan sekretaris berada pada SKPD yang memiliki tugas Pemberdayaan Perempuan. Selama ini program Pemberdayaan Perempuan terkesan tersubordinasi dari program Keluarga Berencana sebagai konsekuensi dari penggabungan dua urusan tersebut dalam satu SKPD, padahal keduanya memiliki tugas yang berbeda.

Dalam proses TA dan mentoring diperoleh informasi bahwa Draft Perangkat Daerah atau perubahan penamaan SKPD masih memungkinkan ada celah menjadikan Urusan Pemberdayaan Perempuan menjadi SKPD berdiri sendiri sepanjang ada pihak lain yang bisa meyakinkan Pemkot tentang urgensi dari pemisahan tersebut, tentu dibutuhkan basis argumentasi yang kuat.

Pihak YLP2EM diberi tugas menyiapkan kertas posisi yang dapat dibaca cepat dan pesannya mudah dipahami baik oleh pihak Pemkot maupun anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Parepare. YLP2EM membuat tim kecil, dimana Ibrahim Fattah membuat Kertas Posisi dan Abd. Samad Syam dan Suryanti bertugas melobi anggota DPRD, khususnya anggota DPRD perempuan.

Gayung pun bersambut, dalam Rapat Paripurna DPRD Parepare, 26 Agustus, Andi Nurhanjani, salah satu anggota DPRD perempuan merujuk basis argumentasi dalam kertas posisi yang diberi judul "Catatan Kritis YLP2EM Terhadap Perubahan Kelembagaan Pemda", dimana YLP2EM menawarkan nama Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, disingkat BPP dan PA. Akhirnya dalam rapat paripurna DPRD Kota Parepare, diputuskan nama seperti yang diusulkan oleh YLP2EM, namun statusnya bukan Badan, tetapi ditingkatkan menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses advokasi tersebut memberi pembelajaran bahwa advokasi kebijakan membutuhkan kolaborasi antara DPRD dengan masyarakat sipil yang efektif, tidak selalui harus meramaikan wacana pro-kontra di media. Dalam kondisi tertentu dibutuhkan gerakan "bawah tanah" yang penting tujuan advokasi bisa tercapai.

Semoga dengan ditetapkannya Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjadi SKPD tersendiri, semakin efektif pula dinas ini ke depan merespon masalah-masalah perempuan dan anak, yang juga semakin dinamis dan kompleks, karena Parepare adalah kota kedua setelah Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan yang merupakan kota transit dan kota pelabuhan dengan permasalahan perempuan dan perlindungan anak yang besar.

Respon tersebut baik melalui perencanaan tahunan maupun alokasi anggaran yang semakin memadai dalam APBD, sehingga Pemerintah Kota Parepare lebih efektif dalam menanangi masalah-masalah perempuan dan perlindungan anak ke depan!. **(IBRAHIM FATTAH & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Dari Korban **menjadi Pendamping**

> Perempuan diceraikan, atau ditinggalkan bukanlah akhir dari kehidupan.
>
> **(YUSTISIANA)**

Menjadi korban kekerasan, apalagi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah hal yang sangat tidak diinginkan oleh setiap perempuan. Selain pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat yang telah hidup bersama korban bertahun-tahun atau puluhan tahun, KDRT juga menghancurkan masa depan orang-orang lain di dalam rumah tangga atau orang-orang yang mempunyai hubungan dengan pelaku dan korban.

KDRT, baik fisik maupun nonfisik akan mengorbankan dan merugikan perempuan dan anak-anak. Dalam bentuk nonfisik, perempuan dan anak biasanya menjadi korban penelantaran ekonomi, trauma, dan benci kepada pelaku.

Ada korban KDRT yang tidak bisa keluar dari situasi yang merugikan. Namun, tidak sedikit yang bangkit dan keluar dari masa lalu. Bahkan di antara korban itu, kemudian menjadi orang-orang yang ikut membantu korban-korban KDRT. Tidak banyak, tapi kehadiran korban yang ikut membantu korban-korban KDRT, sangat positif untuk mendorong dan membangkitkan semangat para korban.

Di antara korban yang kini menjadi pendamping adalah Yustisiana. Perempuan yang usianya telah mencapai 50 tahun dan ibu dari 4 orang anak, 1 anak lak-laki dan 3 anak perempuan ini, adalah satu dari sekian korban KDRT yang bangkit dari keterpurukan, kemudian menjadi pendamping KDRT.

Bu Yus, panggilan akrab Yustisiana, tinggal bersama putri bungsunya di Kelurahan Lompoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, Bu Yus hanyalah seorang ibu rumah tangga biasa sebagaimana ibu-ibu rumah tangga yang lainnya. Bu Yus hanya mengurus rumah, suami, dan anak-anak.

Bu Yus adalah korban KDRT, yang ditinggal pergi oleh suaminya menikah dengan perempuan lain, tanpa proses perceraian di Pengadilan. Saat itu, hidupnya hancur, karena sebagai ibu rumah tangga yang tidak punya pekerjaan, Bu Yus dihadapkan pada kenyataan, tidak mempunyai pendapatan, tetapi anak-anaknya harus tetap sekolah.

Menurutnya, walaupun dirinya sangat hancur saat itu, namun meratapinya pun tidak ada gunanya. Karena itu, harus dihadapi. Saat

Melalui KK dan Program MAMPU, Bu Yus bersama teman-temannya mendampingi berbagai macam masalah perempuan dan anak

itu, Bu Yus mulai bangkit dan mencoba melupakan semua persoalan yang menimpa keluarganya. Bu Yus adalah contoh perempuan yang kuat dan memiliki karakter pantang menyerah. Bahkan terkesan, cuek dan kadang tidak peduli dengan warga sekitarnya.

Bu Yus bergabung dan menjadi kader Posyandu di daerah tempat tinggalnya dan menyibukkan diri dengan berbagai kegiatan, mulai dari membantu tetangganya mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), menjadi tenaga pendataan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) hingga mendampingi perempuan yang menjadi korban KDRT.

Suatu saat, Bu Yus bertemu dengan staf YLP2EM (Yayasan Lembaga Pemberdayaan dan Pengkajian Ekonomi Masyarakat) Parepare. Saat itu, YLP2EM sedang melakukan kampanye sadar AIDS di Posyandu di Kelurahan Lempoe. Bu Yus pun bergabung menjadi kader kelompok sadar AIDS (KSA) pada tahun 2011. KSA ini dibentuk oleh YLP2EM untuk membantu YLP2EM dalam Kampanye Sadar AIDS di Kota Parepare.

Menjadi kader KSA, menurut Bu Yus, dia harus bias memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya dan pencegahan virus HIV/AIDS. Karena itu, Bu Yus berlatih berulang-ulang untuk menjadi kader yang baik. Dan akhirnya, Bu Yus menjadi tenaga pendamping untuk orang yang terjangkit virus HIV/AIDS. Hal inilah yang membuat bu Yus makin percaya diri dan yakin dengan kemampuannya.

Sejak saat itu, ia mengalami beberapa perubahan yang positif dalam dirinya. Perubahan yang paling dirasakan adalah keberaniannya untuk berbicara di depan umum dan mengungkapkan pendapatnya. Bahkan kini

Bu Yus udah diikutkan dalam Musrembang (Musyawarah perencanaan pembangunan) di kelurahan tempat tinggalnya.

Ketika dibentuk Kelompok Konstituen (KK), suatu organisasi masyarakat untuk mengorganisasikan kekuatan masyarakat dalam mengakses layanan publik pemerintah, Bu Yus dipilih menjadi Ketua KK. KK dibentuk sebagai bagian dari Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan).

Melalui KK dan Program MAMPU, Bu Yus bersama teman-temannya mendampingi berbagai macam masalah perempuan dan anak, tidak hanya korban KDRT, tetapi korban-korban lain, untuk menguatkan perempuan, sekaligus pemenuhan hak dan perlindungan perempuan dan anak.

Bagi Bu Yus, siapa pun tidak ingin menjadi korban KDRT. Namun, jika menjadi korban KDRT, dunia ini pun belum kiamat. Tentu menyakitkan menjadi korban, karena pelakunya adalah orang yang bukan hanya dekat, tetapi juga adalah orang yang dicintai dan disayangi. Namun, dia tega melakukan kekerasan terhadap orang yang selama ini mencintai dan menyayanginya itu.

Karena itu, menurut Bu Yus, perempuan harus bangkit, tidak boleh meratapi kejadian yang menimpanya. Perempuan harus yakin bahwa, Tuhan bersama dirinya yang dianiaya oleh suaminya sendiri. Tidak perlu menanam dendam, karena kehidupan terus berjalan. Biarlah Tuhan yang membalasnya.

Bu Yus semakin yakin menjadi pendamping bagi perempuan-perempuan korban KDRT. Karena perempuan yang menjadi korban KDRT, tidak hanya melukai perempuan saja, tetapi juga melukai anak-anak yang merupakan generasi masa depan. Jika orangtua—ayah anak-anak—mereka menjadi pelaku KDRT, maka itu tidak boleh diturunkan kepada anak-anaknya.

Menurut Bu Yus, dengan adanya KK, maka perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk KDRT, akan lebih mudah ditangani. KK juga dapat menolong warga yang hak-hanya tidak dipenuhi, seperti beras sejahtera (Rastra), dan lain-lain. KK bisa berbuat lebih banyak untuk menghubungkan warga dengan anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) dan eksekutif.

"Perubahan diri saya dari korban menjadi pendamping KDRT membutuhkan proses yang panjang. Namun, hasil yang saya capai luar biasa. Sekarang saya dikenal warga dan mereka membutuhkan saya, dibanding dulu. Ini tentu bermanfaat bagi diri saya maupun warga."

Bu Yus berharap, anak-anaknya kelak mempunyai kehidupan yang lebih baik. Apalagi, sekarang semua anaknya sudah berkeluarga. Bu Yus berpesan kepada perempuan bahwa, perempuan diceraikan atau ditinggalkan bukanlah akhir dari kehidupan. Tapi, merupakan ujian yang mesti dihadapi. "Semua sudah diatur Yang Maha Kuasa." **(ANDI ERNIYANI & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

KOTA

KENDARI

Mitra :

Rumpun Perempuan Sultra (RPS)

Reses Kesehatan Reproduksi

Membaca judul tulisan di atas agak janggal. Namun, itulah yang terjadi antara konstituen dengan wakil mereka di parlemen. Adalah Hj. Siti Nurhan Rachman, anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Kendari, yang melakukan reses dengan pembicaraan utama mengenai kesehatan reproduksi. Ibu Nurhan, nama akrab anggota DPRD yang terpilih di Dapil (Daerah pemilihan) V Kota Kendari (Kecamatan Puuwatu dan Mandonga) ini merespon pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi, sekaligus menindaklanjuti usulan ibu-ibu yang hendak melakukan pemeriksaan *pap smear*.

Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi, apalagi terkait dengan alat kelamin dan penyakit kelamin merupakan sesuatu yang masih tabu di kalangan masyarakat. Karena itu, penyakit-penyakit yang terkait reproduksi yang teridentifikasi umumnya setelah penderita dalam kondisi yang parah.

Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi juga sangat terkait dengan budaya masyarakat patriarki, sehingga kebutuhan dan kepentingan perempuan ditentukan atau diputuskan oleh suami atau bapak. Tidak hanya penyakit yang harus diperiksakan ke dokter atau di layanan kesehatan, keputusan

melahirkan pun bergantung pada keputusan suami dan bapak. Dalam banyak kasus, perempuan meninggal karena terlambat diberi pertolongan oleh tenaga medis terlatih hanya karena menunggu kedatangan atau keputusan dari suami atau bapaknya.

Inisiatif Kelompok Konstituen

Karena itu, ketika ada inisiasi masyarakat untuk membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka, apalagi hendak memeriksakan diri mereka, merupakan kemajuan yang luar biasa. Perubahan sikap dan budaya masyarakat terkait dengan kesehatan reproduksi tentu bukanlah sesuatu yang mudah dan cepat. Karenanya, jika perubahan itu terjadi lebih luas dan cepat, mestinya harus direspon secara cepat pula oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab, dalam hal ini negara/pemerintah.

Perubahan budaya masyarakat dalam melihat kesehatan reproduksi diperlukan, karena masalah kesehatan reproduksi tidak bisa dilepaskan dari perubahan pola hidup masyarakat saat ini. Penyakit yang terkait dengan organ reproduksi, seperti kanker serviks dan kanker payudara, pun terkait dengan gaya hidup. Menurut Badan Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO), bahwa 80 % penderita kanker serviks saat ada di negara-negara berkembang. Dibanding tahun 1980-an hingga 1990-an, penderita penyakit kanker—termasuk kanker serviks dan payudara—justru berada di negara-negara maju. Situasinya berbalik, karena pola hidup di negara-negara maju kini diadopsi di negara-negara berkembang, seperti pola makan tidak sehat, kelebihan mengonsumsi makanan siap saji, kelebihan mengonsumsi daging merah (sapi, kambing, kerbau, babi), kurang bergerak (kurang olahraga), merokok, dan minum alkohol.

Sementara pemicu kanker serviks yang asli di negara-negara berkembang adalah pernikahan dini (menikah di bawah 20 tahun) dan melahirkan terlalu banyak. Sampai saat ini, pernikahan dini merupakan masalah serius di Indonesia, karena menikah dini legal secara hukum, dan perempuan yang menikah dini atau muda, selalu melahirkan anak dalam jumlah banyak. Parahnya, pernikahan dini dan melahirkan banyak anak selalu dilakoni perempuan miskin.

Pola makan di masyarakat berubah dengan cepat yang kemudian memicu meningkatnya kanker. Tetapi budaya masyarakat dalam melihat kesehatan reproduksi tidak berubah dengan cepat, sehingga mereka yang menderita penyakit yang berhubungan dengan reproduksi menjadi sulit terdeteksi dan tertangani.

Karena itu, jika pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi diinisiasi oleh masyarakat, apalagi masyarakat bawah seperti Kelompok Konstituen (KK) merupakan suatu kemajuan luar biasa yang patut diapresiasi. KK di Kelurahan Wuawua dan Watulonda Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara mendiskusukan tema kesehatan reproduksi. Dalam diskusi tersebut muncul berbagai pengalaman perempuan yang mengidentifikasi dirinya atau diidentifikasi oleh dokter menderita kanker serviks dan kanker payudara.

Diskusi tentang kesehatan reproduksi di KK tidak hanya membuka mata perempuan-perempuan itu mengenai penyakit-penyakit terkait dengan organ reproduksi, tetapi juga mendorong mereka untuk mencari jalan keluar. KK kemudian mendata perempuan-perempuan di dua kelurahan tersebut untuk memeriksakan kesehatan mereka.

Reses yang Berguna

Melalui penguatan yang dilakukan oleh Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari dalam Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), kerjasama dengan Yayasan BaKTI, KK menyiapkan diri untuk menyampaikan permasalahan yang teridentifikasi tersebut kepada wakil rakyat mereka di DPRD Kota Kendari.

KK dilatih untuk mengidentifikasi permasalahan yang dialami oleh mereka, sehingga ketika berlangsung Reses, sebagai konstituen mereka menyampaikan apa-apa yang dihadapi oleh mereka dan perlu direspon secara cepat oleh wakil rakyat yang mewakili mereka, maupun oleh instansi teknis.

Akhirnya, KK menyepakati untuk menyampaikan permasalahan kesehatan

reproduksi kepada wakil mereka saat reses. Kesepakatan di KK sangat penting agar pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi menjadi fokus dan diusulkan untuk menjadi tindakan yang berguna untuk perempuan.

Respon APP

Pada pelaksanaan Reses 2 Juli 2015 yang dihadiri oleh Hj. Siti Nurhan Rachman, anggota parlemen perempuan (APP) di DPRD Kota Kendari dari Dapil V yang meliputi Kecamatan Puuwatu dan Mandonga, salah satu materi pembicaraan adalah mengenai Kesehatan Reproduksi. Saat itu Ketua KK Kelurahan Watulondo, ibu Hasrianti menyampaikan aspirasi KK tentang masalah kesehatan reproduksi. Di depan Ibu Nurhan, ibu Hasrianti menjelaskan bahwa, di KK telah didiskusikan berbagai permasalahan yang dialami oleh warga, dan diantaranya yang perlu dituntaskan adalah masalah kesehatan reproduksi, karena beberapa perempuan telah diidentifikasi menderita kanker payudara dan kanker serviks. Dengan begitu perlu pemeriksaan terhadap ibu-ibu.

Karena usulan dari KK, maka diskusi yang berkembang pada Reses tersebut adalah mengenai Kesehatan Reproduksi. Pembicaraan mengenai kesehatan reproduksi di pertemuan terbuka seperti Reses tersebut menjadi menarik, karena menjadi pembicaraan publik, yang sebelumnya dianggap sebagai sesuatu yang tabu.

Merespon usulan KK, ibu Nurhan bersedia memfasilitasi pemeriksaan *pap smear* dan tes IVA (Inspeksi Visual dengan Asam Asetat) bagi perempuan yang bersedia. Ibu Nurhan akan menghubungkan perempuan-perempuan yang bersedia melakukan pap smear dan tes IVA dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Provinsi Sulawesi Tenggara.

Masih Takut dan Malu

Sekalipun kesehatan reproduksi sudah dibicarakan secara terbuka di dalam reses wakil rakyat, namun ketika dilakukan pendataan untuk pemeriksaan *pap smear* dan tes IVA, hanya sebagian kecil perempuan yang bersedia melakukan pemeriksaan pap smear. Sebanyak 17 perempuan, 8 dari Kelurahan Wuawua dan 9 dari Kelurahan Watulonda yang bersedia melakukan pemeriksaan *pap smear*.

Dan ketika dilaksanakan pemeriksaan *pap smear* gratis pada 23 Agustus 2015 oleh Dinas Kesehatan Kota Kendari dan BKKBN Provinsi Sulawesi Tenggara, tercatat sebanyak 8 orang hadir mengikuti tes *pap smear. Jumlah ini lebih sedikit dari data yang diberik*an dan setelah di konfirmasi kepada pengurus KK, ternyata sebagian perempuan yang telah didata menyatakan takut dan juga malu.

Ibu Sri Soesilowati salah seorang yang ditemui di sela-sela kegiatan pemeriksaan *pap smear* menyatakan "saya bersyukur bisa mengikuti tes pap smear ini karna tidak dibebankan biaya, karna kalau harus tes pap smear di dokter praktik saya harus mengeluarkan biaya sebesar Rp. 400.000,-. Sebelum ikut tes *pap smear* ini, saya juga sempat takut dan gugup tetapi karena pemeriksaan ini penting bagi perempuan dan sebagai pengurus KK saya ingin memberi contoh kepada perempuan lain, khususnya di KK di Kelurahan Wuawua agar berani untuk memeriksakan kesehatan reproduksinya. Saya akan berjanji akan menceritakan pengalaman saya pada perempuan di KK Kelurahan Wuawua.

Tidak mudah bagi perempuan memberanikan diri untuk melakukan tes *pap smear* dan IVA. Membicarakan kesehatan reproduksi, apalagi terkait dengan kanker payudara dan serviks pun merupakan hal baru. Dengan kata lain, membicarakan kesehatan reproduksi secara terbuka bagi perempuan yang sekian lama berada dalam kungkungan budaya patriarki, sudah merupakan perubahan dan kemajuan yang luar biasa. Karena itu, ketika ada beberapa orang yang memberanikan diri melakukan tes *pap smear* adalah suatu perubahan yang besar. **(SITTI ZAHARA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Srikandi di Tingkat RT

Jabatan publik identik dengan laki-laki. Tidak hanya jabatan-jabatan yang tinggi, tetapi juga jabatan yang rendah di tingkat warga, seperti RT (Rukun Tetangga) dan RW (Rukun Warga). Ketua RT atau RW yang merupakan jabatan yang secara struktural berada di ranah eksekutif, dan merupakan jabatan terendah. Dan jabatan yang sangat rendah itu pun, selalu dianggap sebagai jabatan laki-laki, bukan jabatan untuk laki-laki dan perempuan.

Ketua RT dan RW adalah jabatan pengabdian. Karena itu, jabatan tesebut dianggap sebagai jabatan yang cocok untuk orang-orang tua atau tokoh masyarakat. Karena itu, jangan heran kalau Ketua RT dan Ketua RW umumnya terdiri dari orang-orang tua, atau tokoh-tokoh masyarakat.

Untuk kondisi tertentu, seperti permasalahan rumah tangga atau permasalahan antartetangga, ketokohan menjadi penting dalam penyelesaian masalah-masalah tersebut. Namun, menganggap Ketua

Kota Kendari

RT dan Ketua RW harus dijabat oleh tokoh masyarakat, dan harus laki-laki adalah pandangan yang keliru.

Ketua RT dan Ketua RW adalah jabatan publik yang dapat dijabat oleh laki-laki dan perempuan, jika memenuhi kualifikasi dan dipilih oleh warga. Jika, sangat sedikit perempuan yang menjabat sebagai Ketua RT atau Ketua RW, Karena pandangan masyarakat yang menafikan perempuan.

Sedikit sekali perempuan yang menjabat sebagai Ketua RT dan RW. Dan jikapun mereka menduduki jabatan tersebut bukanlah perkara muda untuk memperolehnya. Pasalnya, perempuan harus bersaing dengan laki-laki di tengah masyarakat yang menganggap perempuan tidak pantas menduduki jabatan tersebut.

Di antara sedikit perempuan yang menjabat sebagai Ketua RT adalah Alfasana, Ketua RT 13 RW 05 dan Hadriani L, Ketua RT 11 RW 04 Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan kedua orang pengurus Kelompok Konstituen (KK) Mekar Sodohoa tersebut merupakan srikandi tingkat RT.

Kedua perempuan ini sama-sama berlatar belakang pendidikan yang tidak tinggi karena hanya tamatan SMP dan SMA, tetapi karena sering mengikuti pertemuan tingkat RT/RW, kelurahan hingga kecamatan, yang membuat mereka menjadi familiar dengan permasalahan-permasalahan sosial kemasyarakatan.

Ketika KK terbentuk tahun 2015 dan mereka tergabung dalam pengurus KK Mekar Sodohoa, membuat keduanya semakin bersemangat melakukan pendampingan terhadap permasalahan yang terjadi di sekitarnya. "Sebenarnya menjadi ketua RT bukan merupakan obsesi saya, tetapi karena sering lantang menyuarakan hak-hak tetangga yang kurang mampu membuat masyarakat sekitar mendaulat saya agar maju ke pemilihan Ketua RT. Selain itu saya pun mengiyakan untuk mengemban amanah menjadi ketua RT, karena melihat banyaknya program pemerintah misalnya BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, subsidi yang tidak tepat sasaran, dan sebagainya," ujar Alfasana.

Senada itu Hadriani yang juga terpilih melalui pemilihan secara langsung juga mengatakan dirinya merasa cemas dan gemas melihat banyaknya aduan masyarakat kepada RT terdahulu yang belum terselesaikan, sehingga membuat masyarakat terkadang mengeluh kepadanya. "Saya juga heran kenapa

banyak masyarakat yang memilih mengeluh kepada saya dibanding Ketua RT mereka. Mungkin karena itu pula mereka mendaulat saya untuk maju mencalonkan diri menjadi Ketua RT, dan saya pun bilang saya akan coba demi mencari keadilan atas hak-hak masyarakat yang belum diterima," kata perempuan berjilbab ini.

Lebih lanjut diungkapkannya bahwa dirinya berusaha untuk bekerja amanah dalam mengemban jabatan, yang bagi sebagian orang, Ketua RT merupakan jabatan yang banyak dipandang sebelah mata karena merupakan unsur pemerintahan paling rendah. "Saya akan berusaha bekerja amanah, apalagi dalam pemilihan lalu sampai dilakukan dua kali pemilihan yaitu melalui polling selembaran yang diisi setiap KK dan karena tidak puas dengan kemenangan saya, ada oknum yang mengusulkan pemilihan ulang dan akhirnya saya kembali menang melalui pemilihan secara langsung yang dilakukan pada salah satu sekolah TK di RT ini," ungkap ibu berusia 40 tahun ini.

Ditanya manfaat bergabung dalam KK, kedua srikandi ini sama-sama sepakat jika KK merupakan salah satu wadah terbaik dalam peningkatan kapasitas ibu-ibu rumah tangga, untuk ikut serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat kurang mampu khususnya perempuan miskin. "Di KK kami diajarkan bagaimana peduli terhadap sesama melalui penerimaan aduan, khususnya berkaitan dengan 5 tema MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan), plus diajarkan bagaimana cara-cara mengadvokasi aduan itu, utamanya melalui lembaga terkait," tutur Alfasana, yang kesehariannya berjualan sembako untuk membantu ekonomi keluarga, karena sang suami hanya berprofesi sebagai sopir.

Beberapa capaian dua srikandi tingkat RT yang secara tidak langsung membantu pemerintah dalam mengawal program-programnya, khususnya program perlindungan sosial di antaranya Alfasana berhasil mendampingi masyarakat (isteri seorang pemulung) hingga bisa tercover dalam program keluarga harapan (PKH) serta terdapat dua anak SD (Sekolah Dasar) dari keluarga kurang mampu mendapatkan bantuan siswa miskin (BSM). Sedangkan Hadriani, berhasil mengawal pembagian Rastra (beras sejahtera) sehingga semua KK kurang mampu di RT-nya mendapatkan Rastra.

Apa yang dilakukan oleh dua perempuan Ketua RT tersebut, mungkin dianggap hal-hal kecil oleh sebagian orang. Padahal pengabaian orang-orang miskin dalam layanan adalah pengabaian hak-hak asasi manusia (HAM). Di sisi lain, anak-anak yang tidak tercover oleh layanan sosial dapat menyebabkan anak-anak putus sekolah, yang berarti pengabaian hak anak.

Jika pemerintah di tingkat sangat rendah, yang dekat dan melihat langsung apa yang dialami oleh warga pun tidak berinisiatif untuk membantu melayani warganya, maka mereka akan menjadi warga yang diabaikan.

Berdasarkan data aduan kelompok konstituen (KK) Mekar Kelurahan Sodohoa, diantara 5 tema program MAMPU, tema meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial, tepatnya bantuan siswa miskin (BSM) dan Rastra yang paling banyak dikeluhkan warga. Adapun jenis keluhannya yaitu adanya pemotongan BSM sebesar Rp 100 ribu pada beberapa SD di Kelurahan Sodohoa. Saat ini kedua orang srikandi tingkat RT tersebut bersama-sama pengurus KK lainnya sedang mendata warga yang dirugikan, untuk selanjutnya dilaporkan ke Diknas (Dinas Pendidikan Nasional) Kota Kendari. Sedangkan Rastra banyak diadukan warga karena masih terdapat warga kurang mampu yang belum mendapatkan Raskin, padahal dibanding warga penerima Raskin lainnya, merekalah yang paling membutuhkan.

Upaya kedua perempuan untuk membantu warga tidak mampu dalam mengakses layanan sosial atau layanan publik, patut diapresiasi. Sebagai Ketua RT, kedua perempuan adalah contoh mengenai tanggungjawab perempuan ketika diberi amanah pada jabatan publik.

(ULFAH SARI SAKTI, HELNI SETYAWAN, & M. GHUFRAN H. KORDI K.)

Kemitraan
yang Berbuah Manis

Kekuatan masyarakat terletak pada kebersamaan dan kepedulian. Masyarakat dapat saling menolong untuk menyelesaikan masalahnya. Namun, terkadang masyarakat tidak mengetahui prosedur atau tidak mempunyai akses terhadap sumber-sumber yang memungkinkan meringankan atau mengatasi masalah masyarakat.

Di sisi lain, layanan publik yang disediakan negara atau pemerintah tidak selalu dapat diakses oleh masyarakat. Selain keterbatasan jangkauan layanan yang tersedia karena berbagai faktor, seperti minimnya sosialisasi hingga tingkat masyarakat bawah maupun keterbatasan sumber daya manusia pada institusi layananan publik, menjadi penghambat jangkauan layanan di masyarakat.

Penyadaran dan pengorganisasian masyarakat diharapkan membantu masyarakat untuk secara bersama dan saling membantu mengakses layanan publik, yang merupakan layanan yang disediakan negara untuk warga negara. Tidak semua masyarakat dapat berinisiatif, mencari tahu layanan negara, sehingga dibutuhkan ada bantuan dan dukungan dari masyarakat yang lain.

Karena itu, pembentukan Kelompok Konstituen (KK), suatu organisasi masyarakat

yang diharapkan dapat membangun hubungan dengan wakil di parlemen, sehingga aspirasi masyarakat dapat dimasukkan di dalam kebijakan pemerintah, di samping itu masyarakat juga dapat mengetahui dan mengakses layanan publik yang tersedia.

Kelompok Konstituen (KK) adalah organisasi yang didukung pembentukannya oleh Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan). Pembentukan KK berdasarkan kenyataan bahwa, masyarakat tidak tahu siapa yang mewakili mereka di parlemen. Karena itu, masyarakat selalu pasif ketika menghadapi berbagai permasalahan.

Pembentukan KK telah membawa dampak positif bagi masyarakat. Sebagai contoh KK Mekar di Kelurahan Sodohoa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Perlahan tapi pasti KK Mekar menunjukan progres yang meningkat dalam advokasi penanganan pengaduan. Walaupun dengan pengetahuan dan pengalaman yang minim, pengurus dan anggota KK Mekar mulai bergerak untuk menangani pengaduan.

Misalnya Februari dan Maret 2016 ini, berkat respon cepat dan kemitraan yang baik antara pengurus KK dengan pihak Puskesmas Benu-benua dan Pemerintah Kelurahan Sodohoa, permasalahan-permasalahan yang berkaitan perlindungan sosial seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) dan Beras sejahtera (Rastra) dapat terselesaikan.

Cerita berawal dari pengaduan anggota KK bahwa terdapat tetangga, seorang perempuan miskin bernama Darna, sedang mengalami sakit diabetes, yaitu kakinya terluka terkena puntung rokok dan tidak kunjung sembuh, malah tampak seperti membusuk.

Mendapat aduan tersebut, pengurus KK, dalam hal ibu Hadriani L langsung menjenguk Darna dan ternyata Darna tidak memiliki kartu jaminan sosial apa pun. Mengetahui hal tersebut Hadriani kemudian menghubungi Kantor Kelurahan dan bertemu dengan Sekretaris Kelurahan, Asman. Asman mengusulkan untuk membawa Darna ke RS Santa Anna. Tetapi setelah berkonsultasi dengan pendamping dari RPS (Rumpun Perempuan Sultra), yaki Helni Setyawan, sebaiknya dibawa saja ke Puskesmas atau ke RS pemerintah dengan alasan memiliki layanan kesehatan gratis. Akhirnya Hadriani menyewa becak untuk mengantar Darna ke Puskesmas Benu-benua.

Sesampai di Puskesmas dirinya kemudian menemui Kepala Puskesmas, Dr Rahmi dan menceritakan tentang kondisi kesehatan serta kondisi ekonomi Darna. Berkat kemitraan yang baik dengan Puskesmas dan pertimbangan kemanusiaan, Puskesmas Benu-benua menggratiskan perawatan luka dan pembelian obat-obatan Darna. Dr Rahmi juga memberi rujukan Darna untuk diperiksa lebih lanjut di RS Bahteramas. Karena Darna tidak memiliki kartu perlindungan sosial apa pun, maka Hadriani langsung berkomunikasi dengan pengurus KK lainnya, agar Darna dapat diuruskan kartu BPJS Kesehatan Subsidi (Jamkesda).

Untuk aduan perlindungan sosial lain terkait dengan Beras sejahtera (Rastra). Sekretaris KK Mekar Sodohoa, Muawiyah mengadvokasinya dengan langsung melaporkannya ke Lurah Sodohoa, Asmada. Mendapat laporan dari pengurus KK yang juga adalah Ketua RT 03 RW 02, Lurah Sodohoa mengatakan akan direalisasikan bulan berikutnya yaitu bulan Maret. Hal tersebut dilakukan mengingat pendataan dan pembagian Rastra untuk bulan Februari telah selesai. Perkataan Pak Lurah menjadi kenyataan, karena perempuan miskin, Riski Indira Triana akhirnya mendapat jatah Raskin 15 kg pada bulan Maret.

Sejak terbentuk pada bulan Maret 2015, KK Mekar Sodohoa telah dua kali mendampingi warga miskin dalam mengakses layanan kesehatan gratis. Aduan pertama pada Desember 2015, yaitu kasus operasi *caesar* di mana, keluarga tidak sanggup melunasi biaya operasi caesar, bayi perempuan miskin yang tidak memiliki kartu perlindungan sosial apa pun di tahan pihak RS Santa Anna.

Upaya yang dilakukan pengurus KK yaitu menguruskan kartu perlindungan sosial, tetapi karena tidak memiliki akta nikah, kartu tersebut tidak dapat diperoleh. Akhirnya

pengurus KK menghadap pihak RS dan memberikan pernyataan jika bayi tersebut berasal dari keluarga tidak mampu serta mereka membuatkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Pengurus KK juga menghadirkan saksi pernikahan, sehingga orang tua bayi mendapat kartu perlindungan sosial.

Apa yang dilakukan oleh Pengurus KK Mekar terlihat sederhana dan mudah. Namun, upaya mereka untuk memenuhi hak-hak warga negara, dengan menempuh prosedur yang disediakan oleh negara sangat berarti. Advokasi yang dilakukan oleh KK Mekar untuk membantu warga miskin mendapat Kartu BPJS, Surat Keterangan Miskin, dan Rastra sangat membantu warga yang kesulitan mengakses layanan sosial.

Upaya KK membantu warga adalah sesuatu yang mesti diperkuat. KK diharapkan mampu mengorganisasikan kekuatan warga, tidak hanya untuk mengakses layanan publik yang disediakan negara, tetapi juga dapat menyampaikan aspirasi dan permasalahan warga, baik kepada lembaga layanan pemerintah atau anggota parlemen yang mewakili mereka.

Pada tahap awal setelah pembentukan, KK Mekar telah menunjukkan kemajuan yang cukup berarti. Dalam waktu yang singkat, beberapa masalah warga dapat diselesaikan. Ini menunjukkan bahwa kebersamaan di masyarakat masih sangat tinggi. Warga yang mampu atau memiliki akses mau melakukan upaya-upaya untuk warga yang tidak mampu dan tidak mempunyai akses. Namun itu, harus diperkuat dan diorgansisasikan.

Satu lagi yang harus diapresiasi adalah, upaya KK Mekar membantu warga dilakukan melalui prosedur yang ada, yaitu menghubungi Pemerintah Kelurahan, pihak Puskesmas, dan Rumah Sakit. Cara-cara yang ditempuh juga sesuai dengan prosedur dan beretika, misalnya datang bertanya ke lurah atau berkonsultasi dengan kepala Puskesmas. Dengan begitu, walaupun yang dilakukan adalah hal-hal yang cukup sensitif, namun orang-orang yang didatangi pun menyambut dan membantu dengan baik. **(ULFAH SARI SAKTI, HELNI SETYAWAN, & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Masyarakat Sadar Kesehatan Reproduksi

Pada September 2015 Rumpun Perempuan Sultra (RPS) melalui Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) melaksanakan kegiatan technical asistensi dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. FGD diikuti seluruh Kelompok Konstituen (KK) se-Kecamatan Wua-Wua.

Dalam FGD tersebut salah satu persoalan yang mencuat adalah banyaknya gejala penyakit kesehatan reproduksi yang dialami oleh perempuan di KK. Namun mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang dialami dan apa akibatnya jika tidak ditangani. Kesehatan reproduksi memang menjadi salah satu tema yang dibahas dalam kegiatan tersebut.

Beberapa informasi yang diberikan oleh pengurus KK dari kelurahan lain tentang masalah kesehatan reproduksi yang terjadi dan cenderung tidak memiliki informasi yang

memadai tentang pencegahan maupun penanganan masalah kesehatan reproduksi. Dalam kegiatan tersebut KK Meohai Kelurahan Anawai membuat rencana tindak lanjut (RTL) berupa pencegahan kasus kesehatan reproduksi perempuan.

Sebagai Ketua KK Meohai, Arlina menindaklanjuti rencana tersebut dengan mengadakan pertemuan Pengurus KK Meohai. Pertemuan pengurus KK Meohai bersepakat untuk membuat kegiatan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dengan mengundang pihak Puskesmas Kecamatan Wua-Wua sebagai narasumber dalam penyuluhan tersebut.

Selain menyepakai narasumber, KK Meohai juga menyepakati waktu pelaksanaan kegiatan pada Selasa, 3 November 2015 dan tempat kegiatan di Aula Kantor Kelurahan Wua-Wua. KK Meohai juga menyepakati tema kegiatan yakni "Penyuluhan Pencegahan Dini Kanker Serviks dan Kanker Payudara".

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi

Setelah pertemuan pengurus KK Meohai, Sekretaris KK Meohai langsung membuat surat undangan yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Kecamatan Wua–Wua, Kepala Kecamatan Wua–Wua dan Kepala Kelurahan Anawai untuk meminta izin penggunaan tempat pelaksanaan kegiatan.

Namun sebelum diantar surat tersebut, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Ketua RT/RW agar mereka dapat memberikan dukungannya untuk terlaksananya kegiatan tersebut. Dan akhirnya semua Ketua RT/RW di kelurahan ini mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut, setelah mereka memahami fungsi dan tujuan kegiatan sesuai dengan tema Mampu.

Arlina kemudian ke kantor Kelurahan untuk mengantar surat izin sekaligus bertemu langsung dengan Lurah. Arlina menyampaikan tentang kegiatan kelompok serta persiapan pelaksanaan kegiata. Lurah mendukung dengan siap membantu fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. "perempuan perempuan seperti ini yang diharapkan mampu berinisiatif dalam melihat kondisi di lingkungan sekitar" ucap Labania, S.Si selaku Lurah Anawai. Selanjutnya Lurah menyampaikan bahwa "saya melihat kegiatan ini sangat penting karena banyak perempuan – perempuan yang belum tahu tentang kesehatan reproduksi khususnya masalah kanker serviks dan kanker payudara serta bagaimana cara pencegahan dan penanganannya".

Arlina juga menuju ke Kantor Puskesmas Kecamatan Wua–Wua untuk mengantar undangan tetapi Kepala Puskesmas tidak berada di tempat, karena sedang menghadiri kegiatan di tempat lain. Arlina diterima oleh Kepala Tata Usaha (KTU), dan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu meminta kesediaan dari pihak Puskesmas untuk membawakan Materi Penyuluhan. KTU menyampaikan bahwa pihak Puskesmas siap membantu.

Arlina kembali lagi ke Kantor Puskesmas untuk memastikan kesiapan dari pihak Puskesmas. Arlina bertemu langsung dengan Kepala Puskesmas dan beliau sudah menunjuk salah satu Dokter yang akan membawakan materi dalam hal ini Dr. Lanora Samosir.

Kemudian Arlina kembali berkoordinasi dengan ibu-ibu anggota KK untuk memastikan

kesiapan pelaksanaan kegiatan. Setelah semuanya siap lalu Arlina menghubungi Bapak Helni Setiawan, pendamping dari RPS untuk menginformasikan kesiapan kegiatan KK Meohai. Arlina juga langsung menginformasikan seluruh ketua RT se-Kelurahan Anawai untuk menyampaikan kewarganya agar dapat hadir dalam kegiatan penyuluhan. Arlina juga melakukan komunikasi melalui telepon kepada pengurus dan anggota KK Meohai agar menyampaikan ke tetangga terdekat yang belum mendapat informasi penyuluhan.

Keesokan harinya tepatnya hari selasa pagi, Pengurus KK Meohai bekerjasama dengan pihak Kelurahan mempersiapkan tempat dilaksanakannya kegiatan yaitu mengatur meja, kursi, sound system, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan kegiatan.

Perlu Pemeriksaan Kesehatan Reproduksi

Pada pukul 14.00 WITA Pengurus KK Meohai sudah siap di tempat kegiatan untuk menyambut dan meregistrasi peserta kegiatan, tepat pukul 15.00 WITA kegiatan penyuluhan terkait pencegahan secara dini kanker serviks dan kanker payudara langsung dibuka oleh program asistan RPS Kendari sekaligus memberikan pengantar maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan ini, selanjutnya dipersilahkan kepada pemateri yaituI bu Dr. Labora Samosir untuk menjelaskan tentang kesehatan reproduksi khususnya masalah kanker serviks dan kanker payudara.

Ibu ibu peserta sangat antusias menyimak materi yang disampaikan kemudian dilanjutkan sesi tanya jawab ibu-ibu kepada pemateri. Di akhir kegiatan disepakati untuk diadakan pemeriksaan IVA (inspeksi visual asam asetat) karena telah ada pemeriksaan IVA secara gratis di Puskesmas Kecamatan Wua-Wua. Jika diperlukan, bukan hanya tes IVA tetapi akan dilanjutkan dengan tes *pap smear*.

Sadar Kesehatan Reproduksi

Dari paparan dan penjelasan Dr. Labora Samosir mengenai kanker serviks dan kanker payudara, dapat diperoleh informasi bahwa, setiap perempuan mesti memeriksakan diri dalam bentuk tes IVA atau pap smear. Itu bukan sesuatu yang tabu, tetapi penting karena terkait dengan kesehatan perempuan.

Namun, selama ini perempuan seperti takut dengan tes tersebut. Yang kemudian terjadi adalah beberapa kasus perempuan yang menderita kanker serviks dan kanker payudara, ketika dibawah ke dokter atau rumah sakit sudah dalam kondisi yang sangat parah. Di pihak, memang masyarakat kurang sekali mendapatkan informasi melalui penyuluhan atau sosialisasi mengenai kanker serviks dan kanker payudara, sehingga upaya-upaya pencegahan juga tidak dilakukan.

Dari pertemuan tersebut dapat diketahui bahwa, masyarakat perlu didorong untuk sadar kesehatan reproduksi. Selama ini, masyarakat tidak mendapatkan informasi yang benar mengenai kanker serviks dan kanker payudara, sehingga masyarakat tidak melakukan pencegahan atau pemeriksaan dini. **(ARLINA & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

Peduli Kekerasan terhadap Anak

Salah satu dari 5 tema Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) yakni memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dengan begitu, Program MAMPU juga mengusung langkah-langkah untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak. Memang sejatinya, siapa pun tidak diperbolehkan melakukan kerasan, baik secara fisik maupun non fisik, kepada perempuan dan anak, karena itu adalah tindak pidana.

Pada tanggal 22 Maret 2016 ketika Hasriyanti menjemput anak di SD (Sekolah Dasar) Negeri 05 Mandonga, Kota Kendari, salah satu orang tua murid, yakni Ibu Yuli menyampaikan bahwa anaknya yang bernama Aksel kelas II A mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan dari guru kelasnya.

Cerita berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Maret 2016. Salah seorang guru kelas, Ibu Nur Alam, S.Pd memberikan hukuman kepada

Aksel dengan mencubit lengan hingga meninggalkan bekas. Orang tua murid, Ibu Yuli langsung melakukan komunikasi melalui via telepon dengan guru kelas tersebut dan mempertanyakan kenapa sampai terjadi hal tersebut. Mendengar pertanyaan orang tua murid tersebut, guru yang melakukan tindakan kekerasan enggan membenarkan laporan murid yang mengalami kekerasan, dalam hal ini Aksel kepada orang tuanya. Bahkan guru tersebut menyampaikan bahwa tidak pernah melakukan tindakan kekerasan fisik (mencubit) terhadap Aksel dan murid—murid lainnya.

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Maret 2016 sepulang dari sekolah, Aksel memberitahukan ibunya agar jangan lagi menelepon, karena gurunya sangat marah dan jika Aksel melapor lagi kepada orang tuanya, maka bukan hanya cubitan saja yang akan di dapatkan tetapi Ibu guru Nur Alam akan mematahkan tangannya, sekaligus melarang teman sebangku Aksel untuk tidak bermain lagi dengan Aksel, begitu pun yang sekelas dengan Aksel dilarang berteman dengan Aksel.

Dari pengaduan itu, Hasriyanti langsung berkoordinasi dengan teman-teman pengurus Kelompok Konstituen (KK) "Abadi" Kelurahan Watulondo, Kecamamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Hasriyanti, sekretaris dan bidang pengaduan KK mendiskusikan persoalan tersebut. Selanjutnya dari hasil diskusi dengan KK menyepakati bahwa permasalahan tersebut perlu didiskusikan dengan pihak Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari.

Pada hari yang sama, Hasriyanti pun melakukan pertemuan dengan pihak RPS yakni Helni Setyawan, Alexander, dan Husnawati untuk menceritakan kronologis tindakan kekerasan fisik yang di lakukan oleh salah satu oknum guru SDN 05 Mandonga Kendari. Kemudian dari hasil diskusi yang dilakukan oleh perwakilan KK dengan pihak RPS menyepakati bahwa perlu di lakukan kunjungan ke tempat korban kekerasan. Selanjutnya Hasriyanti bersama pendamping KK, Helni Setyawan melakukan kunjungan ke tempat korban sekaligus mendiskusikan persoalan tersebut dengan orang tua korban.

Langkah Cepat Sekolah

Pada tanggal 23 Maret 2016, KK bersama orang tua korban melakukan pertemuan dengan pihak kepala SDN 05 Mandonga Kendari untuk mendiskusikan terkait permasalahan tindakan kekerasan yang dialami oleh salah satu murid kelas IIA. Dari pertemuan tersebut Kepala Sekolah, Sutarjo, S.Pd., MM sangat respon dan menyambut itikad baik dari pihak orag tua korban dan KK untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan cara berdiskusi apa yang menjadi permasalahannya.

Mendengar aduan orang tua korban yang didampingi KK, pihak sekolah langsung mengadakan rapat dewan guru terkait tindak kekerasan fisik tersebut. Dari hasil rapat dewan guru, disepakati bahwa oknum guru yang melakukan tindakan kekerasan dalam hal ini

> Kekerasan terhadap perempuan dan anak baru dilaporkan jika pelakunya adalah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga atau kekerabatan dengan korban.

Ibu Nur Alam, S.Pd untuk sementara dibebastugaskan mengajar di kelas.

Pelajaran yang dipetik dari kejadian ini, kepala sekolah sangat cepat dalam merespon aduan orang tua murid, karena hanya dalam waktu sehari saja persoalan tersebut dapat di selesaikan dengan baik, dan tidak lupa juga kepala sekolah, Sutarjo, S.Pd. MM

menyampaikan bahwa ia selalu terbuka kepada orang tua murid jika dalam proses belajar mengajar di sekolah ada yang tidak sesuai atau murid dirugikan.

Kepala sekolah Sutarjo, S.Pd. MM, adalah guru dan kepala sekolah yang paham bahwa penggunaan kekerasan di sekolah tidak efektif untuk membuat anak menjadi baik, bahkan kekerasan hanya membuat anak-anak trauma dan semakin menjadi tidak terkendali. Dengan demikian, guru-guru harus terus belajar untuk menemukan metode yang lebih baik dalam mengajar.

Tidak lupa juga kepala sekolah menyampaikan sangat berterimah kasih dengan Kelompok Konstituen "Abadi" Kelurahan Watulondo yang telah memediasi proses pertemuan dengan SDN 05 Mandonga Kendari, sekaligus mengapresiasi KK agar tetap bersemangat dalam membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan yang ada di kelurahan Watulondo pada khususnya.

Selain itu orang tua korban kekerasan juga menyampaikan rasa terima kasih kepada kelompok konstituen "Abadi" Kelurahan Watulondo yang telah mendampingi sampai pada proses penyelesaian masalah. Dirinya juga berharap kejadian tindak kekerasan yang dialami anaknya tidak terjadi lagi kepada murid-murid yang lain.

Kekerasan Harus Dihentikan

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terjadi di berbagai tempat. Namun, umumnya masyarakat cenderung menutupinya. Selain masyarakat tidak tahu dan tidak mempunyai akses terkait lembaga layanan yang dapat membantu, kekerasan terhadap perempuan dan anak juga dianggap sebagai masalah rumah tangga atau masalah keluarga, jika pelakunya adalah orang di dalam rumah atau orang-orang terdekat.

Kekerasan terhadap perempuan dan anak baru dilaporkan jika pelakunya adalah orang-orang yang tidak mempunyai keluarga atau kekerabatan dengan korban. Laporan kekerasan juga sering diabaikan oleh petugas kepolisian, jika kasusnya dianggap tidak mempunyai dampak apa-apa terhadap korban.

Di pihak lain, kekerasan fisik masih dianggap sebagai salah satu cara mendidik oleh sebagian guru di sekolah. Kekerasan dianggap salah satu cara terbaik mendisiplinkan siswa yang "susah diatur" atau siswa yang "kurang ajar". Padahal siswa yang demikian, ternyata telah mempunyai sejumlah beban dan masalah yang berasal dari keluarga.

Pendekatan kekerasan tidak menyelesaikan masalah, apalagi dalam mendidik anak. Karena itu, kekerasan harus dihentikan. KK "Abadi" Kelurahan Watulondo bertekad untuk mendampingi korban-korban kekerasan. Namun KK juga akan melaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai dampak negatif kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengurus dan anggota KK "Abadi" ingin menjadi bagian dari komunitas yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindak pidana. Kekerasan juga merendahkan martabat manusia. Karena itu, "kekerasan harus dihentikan". **(HASRIYANTI & M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

MEDIA MASSA

Media, Jurnalis, dan Perempuan

Pengalaman Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) dalam pertukaran pengetahuan di kawasan timur Indonesia memberi pelajaran bahwa, kerjasama dengan media massa dan jurnalis sangat strategis, tidak hanya untuk kepentingan penyebaran pengetahuan dan informasi, serta praktek cerdas, tetapi juga untuk kepentingan advokasi untuk perubahan kebijakan yang memihak pada kepentingan publik.

Media mempunyai posisi yang sangat kuat dalam memengaruhi persepsi publik, karenanya juga dapat memengaruhi perubahan kebijakan di berbagai tingkat pemerintahan. Demikian pula pengambil kebijakan, tentu mempunyai kepentingan terhadap media, baik untuk menjelaskan kebijakan yang dibuat, maupun untuk mengukur sikap publik terhadap kebijakan tersebut.

Wacana mengenai Perempuan dan Kemiskinan

Posisi media yang sangat urgen oleh beberapa pemikir pembangunan menempatkan media sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan. Pembangunan

tidak hanya soal meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, tetapi juga soal kebebasan pers (media massa) dan kesetaraan perempuan dan laki-laki, atau kesetaraan gender (Sen, 1999; Nugroho, 2008). Pengalaman mengajarkan, media dapat mencegah dan memutus praktek pembangunan yang diskriminatif, tetapi di sisi lain media juga dapat berlaku diskriminatif terhadap etnis, jenis kelamin, agama, dan kelompok tertentu.

Studi yang dilakukan oleh Yayasan BaKTI untuk Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) menemukan berbagai pemberitaan yang tidak menguntungkan, bahkan mendiskriminasi perempuan. Berita-berita mengenai perempuan umumnya berupa berita seksis, seperti pemerkosaan, pelecehan, dan pencabulan yang menjadikan aparat hukum (terutama polisi dan jaksa) sebagai sumber berita, sehingga perspektif pemberitaan tidak melindungi korban, bahkan menghakimi korban.

Umumnya jurnalis dan media tidak melihat perempuan dan kemiskinan sebagai berita yang menarik dan bernilai jual. Jika perempuan dan kemiskinan menjadi berita, perspektif jurnalis dan media tidak mampu meneropong dari sisi ketidakadilan dan diskriminasi. Berita-berita terkait perempuan bahkan bias dan—entah disadari atau tidak—ikut meneguhkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan.

Sementara berita mengenai anggota parlemen perempuan (APP) umumnya berupa berita serimoni parlemen (DPR/DPRD), seperti berita mengenai kunjungan kerja parlemen, yang menyelipkan nama APP di dalam berita atau tulisan. Sementara berita-berita parlemen yang prestisius seperti pansus (panitia khusus), panja (panitia kerja), dan rapat badan anggaran sulit sekali menjadi berita dan arena bagi APP.

APP yang menjadi narasumber berita sangat terbatas, bukan hanya karena jumlah APP yang terbatas atau karena tidak berani menjadi narasumber berita, tetapi juga stereotip terhadap APP, yang dianggap sebagai tidak layak atau tidak mampu menjadi narasumber berita. Padahal anggota parlemen laki-laki (APL) yang mayoritas pun, hanya sedikit sekali berani menjadi narasumber berita, dan itu-itu saja.

Media juga menjadi media pressure dalam mendorong pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak dan perempuan dan masyarakat miskin.

Di sisi lain, APP mempunyai keterbatasan dalam mengindentifikasi dan mengemas isu agar menarik bagi jurnalis dan media. Karena itu, ketidakberanian APP menjadi narasumber berita bukan hanya soal tidak berani tampil dan berbicara di depan jurnalis, tetapi juga soal yang sangat mendasar, terkait dengan kemampuan mengidentifikasi dan mengemas isu. Faktor ini juga merupakan kelemahan umum yang dialami oleh APL.

Dan jangan lupa! Media massa bukan hanya soal berita, tulisan, dan gambar; tetapi juga soal paradigma dan perspektif jurnalis. Demikian pula informasi dan pengetahuan, keduanya bukanlah sesuatu yang berada di ruang hampa, melainkan berada di arena pertarungan wacana. Banyak sekali pihak mempunyai kepentingan dalam pertarungan wacana, karenanya wacana mengenai perempuan dan kemiskinan selalu tersisih oleh kekuasaan patriarkis, dalam politik, ekonomi, dan sosial-budaya.

BaKTI sebagai Penghubung

Sejak akhir 2012 Yayasan BaKTI sebagai mitra untuk program MAMPU fokus pada penguatan kapasitas APP untuk menghasilkan

kebijakan yang memihak kemiskinan *(pro poor)* dan tanggap *(responsive)* gender. BaKTI berprogram di Kota Ambon (Maluku), Kabupaten Bone, Tana Toraja, Maros, dan Kota Pare-Pare (Sulawesi Selatan), Kota Kendari (Sulawesi Tenggara), Kota Mataram dan Lombok Timur (Nusa Tenggara Barat), dan Kabupaten Belu (Nusa Tenggara Timur).

Salah satu *outcome* yang diharapkan dicapai oleh program tersebut adalah meningkatnya wacana publik mengenai 5 (lima) isu MAMPU, yaitu : (1) meningkatkan akses perempuan terhadap program-program perlindungan sosial; (2) meningkatkan akses perempuan pada pekerjaan serta menghilangkan diskriminasi di tempat kerja; (3) memperbaiki kondisi untuk migrasi tenaga kerja perempuan ke luar negeri; (4) memperkuat kepemimpinan perempuan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi; dan (5) memperkuat kepemimpinan perempuan dalam mengatasi kekerasan terhadap perempuan.

Karena itu, BaKTI menjadi penghubung *(intermediary)*, terutama antara media dan APP. Ini terkait dengan mandat BaKTI sebagai lembaga yang menjembantani terjadinya pertukaran pengetahuan. Untuk sampai pada tujuan tersebut, BaKTI memfasilitasi terciptanya lingkungan yang memungkinan *(enabling environment)* bagi setiap pihak untuk dapat bertukar pengetahuan. Ini termasuk melakukan berbagai pelatihan dan diskusi yang dibutuhkan masing-masing pihak.

BaKTI memfasilitasi pertukaran pengetahuan dengan : (a) mengelola jaringan forum media, kelompok konstituen, dan anggota parlemen perempuan; (b) mengelola media komunikasi : Pintar MAMPU, BaKTINews, batukarinfo; dan (c) mengelola event pertukaran pengetahuan seperti diskusi praktik cerdas, diskusi media, dan inspirasi BaKTI.

Forum media menjadi penting karena dapat memerankan setidaknya dua fungsi, yaitu : pertama, fungsi kontrol kepada pemerintah dan parlemen (DPRD) untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing dalam menjalankan kebijakan yang *pro poor* dan pro gender, kedua, fungsi membangun wacana mengenai persoalan sosial kemasyarakatan khususnya terkait tema MAMPU dan kemiskinan untuk menyuarakannya kepada pengambil kebijakan.

Sementara strategi yang digunakan dalam pembentukan forum media adalah pendekatan secara personal kepada jurnalis yang visioner, independen, dan berkomitmen, serta pendekatan melalui kelembagaan media masing-masing jurnalis.

Dalam kurun waktu lebih dari dua tahun, beberapa capaian cukup menggembirakan, sekalipun untuk mengukur capaian tersebut diperlukan pengukuran indikator yang lebih mendalam. Sebagai contoh, pemberitaan terkait tema-tema yang berhubungan dengan tema MAMPU, isu gender, masalah perempuan dan kemiskinan menjadi wacana publik di tingkat kabupaten/kota. Demikian pula publikasi kegiatan mitra melalui berbagai media mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

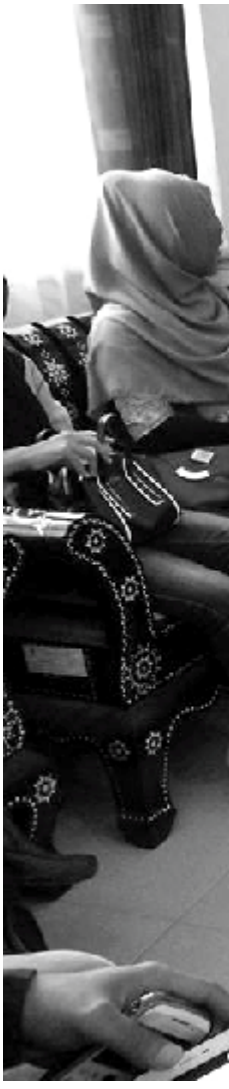

Media juga menjadi media *pressure* dalam mendorong pengambil kebijakan untuk membuat kebijakan yang berpihak dan perempuan dan masyarakat miskin. Hal ini ditunjukkan dengan adanya tindak lanjut dari Pemerintah Kabupaten Bone terkait dengan penyusunan database kemiskinan. Sehingga pemda kemudian membentuk sebuah Pusat Data Kabupaten Bone dimana database kemiskinan yang telah divalidasi akan dimasukkan dalam PPLS (Program Penyelenggaraan Perlindungan Sosial) 2015. Data ini pun akan mendukung revisi Peraturan

Daerah (Perda) Sistem Kesehatan Daerah, Perda Pendidikan Gratis dan penyempurnaan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Ke depan diharapkan publikasi media memuat pemberitaan mengenai pendapat anggota parlemen dan pemerintah terkait dengan tema MAMPU yang mengikat komitmen untuk segera menindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata untuk mengatasi permasalahan yang diwacanakan media. Sehingga pemberitaan tersebut mendorong pemerintah dan legislatif untuk segera menindaklanjutinya.

Pemberitaan media mengenai perempuan dan kemiskinan juga diharapkan menggunakan perspektif gender, keadilan, dan HAM (hak asasi manusia). Perlu digarisbawahi bahwa, berita mengenai perempuan bukan soal siapa dan di mana perempuan itu berada, tetapi soal siapa yang menulis dan media yang memuatnya.**(CAROLINE TUPAMAHU)**

Media dan Kebijakan Publik

Pengalaman Forum Media

> "Hanya ada dua hal yang mampu menyinari bumi ini, yakni matahari di langit dan pers di bumi"
>
> (MARK TWAIN)

Media massa atau pers sering disebut sebagai pilar keempat bagi demokrasi *(the fourth estate of democracy)*, jika merujuk pada demokrasi berdasarkan trias politika klasik. Pilar demokrasi dalam pemahaman trias politika klasik adalah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Media ditempatkan sebagai pilar keempat, karena perannya yang penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan publik, sekaligus alat kontrol terhadap kekuasaan.

Karena kekuatan tersebut, maka penguasa otoriter memusuhi dan menekan media. Di Negara-negara otoriter, media dikontrol sedemikian rupa, sehingga pemberitaan hanya benar dari versi penguasa. Kontrol yang ketat dan pembredelan media tidak hanya menutup munculnya informasi yang benar untuk publik, tetapi juga mencegah dan memutus akses publik terhadap layanan negara.

Sejarah mencatat banyak sekali peristiwa di mana media mampu "menyelamatkan" nyawa manusia melalui pemberitaan. Amartya Sen—peraih Nobel Ekonomi 1998—mencatat, China (Tiongkok) pernah mengalami bencana kelaparan yang mungkin terbesar sepanjang sejarah. Sekitar 30 juta penduduk China meninggal akibat kegagalan program Lompatan Jauh ke Depan *(Great Leap Forward)* selama tahun 1958-1961. Sebaliknya, India tidak pernah mengalami bencana kelaparan sedahsyat itu sejak kemerdekaannya tahun 1947. Ini terjadi karena keterbukaan sistem politik India memberikannya potensi early warning dari pemberitaan pers. Oleh karena itu, demokrasi dan kebebasan—termasuk kebebasan pers—menjadi satu dimensi penting dalam rumusan pembangunan Amartya Sen.

Karenanya, salah satu ukuran kualitas demokrasi adalah kebebasan pers. Pers yang bebas dan berkualitas tidak sekadar memberitakan apa saja yang terjadi di

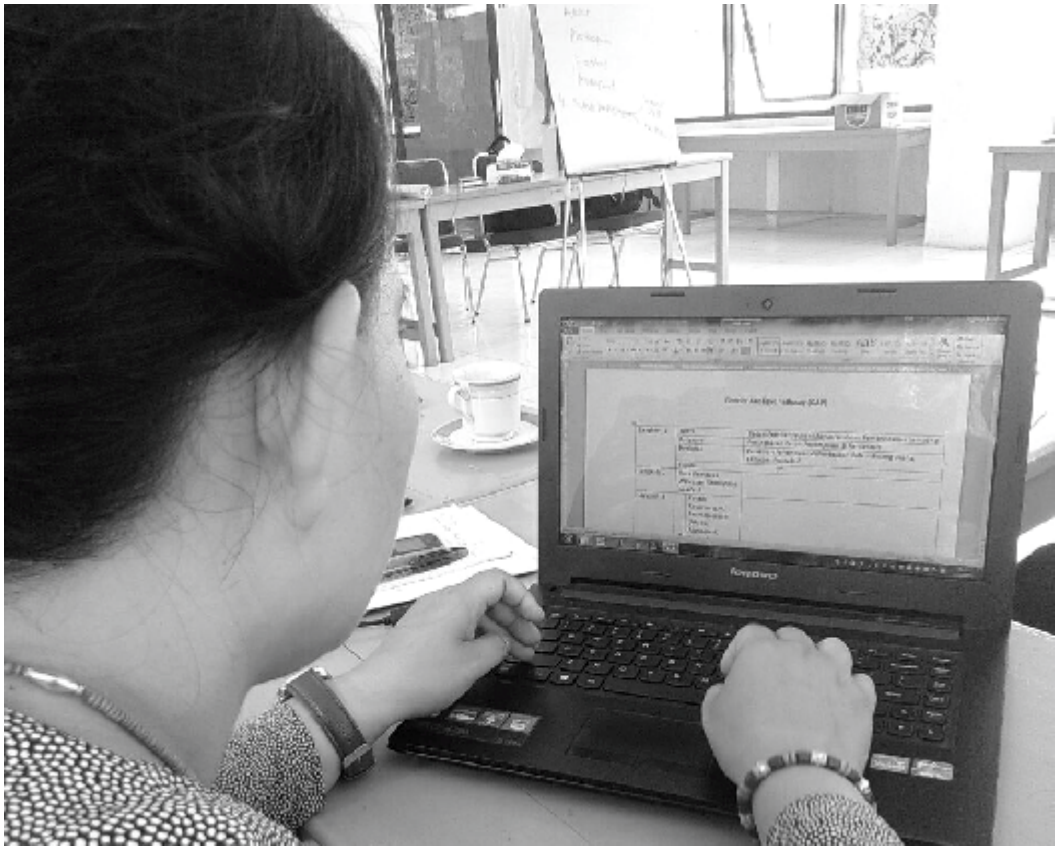

masyarakat, tetapi juga ikut membentuk dan menjaga kualitas pemberitaan untuk menumbuhkan kultur dan mengkonsolidasikan demokrasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik.

Media di Daerah

Di era desentralisasi (otonomi daerah), kekuasaan tidak lagi berpusat di Jakarta, tetapi menyebar di berbagai daerah provinsi dan kabupaten/kota. Urusan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara dan pelayanan publik tidak lagi bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat membuat kebijakan sendiri sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing. Desentralisasi yang diharapkan memperkuat pemerintahan di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tidak semulus konsepsi dan tujuan awal. Desentralisasi juga melahirkan raja-raja di provinsi dan kabupaten/kota dan semakin memperburuk kesejahteraan rakyat. Berbagai kebijakan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota tidak selalu mendukung dan mendorong perbaikan kesejahteraan rakyat.

Pada kondisi tersebut, media di daerah mempunyai peran penting dalam mengkritisi dan mengontrol penguasa di daerah. Media berfungsi menginformasikan kondisi masyarakat yang jauh dari jangkauan "tangan-tangan" pemerintah. Media juga menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung kondisi mereka, sekaligus mengkritisi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Media Daerah dan Kebijakan Publik

Karena posisi dan kemampuan media, maka setiap *stakeholders* pembangunan membutuhkan media. Apalagi jika *stakeholders* pembangunan tersebut bergerak pada upaya perubahan kebijakan. Karena itu, Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan

Perempuan) yang dikelola oleh Yayasan BaKTI menempatkan media sebagai mitra strategis.

Di tahun kedua perjalanan Program MAMPU-BaKTI beberapa pembelajaran baik terkait kerjasama dengan media disajikan berikut. Pada tahun pertama program (2013-2014) terbentuk Forum Media di Kota Ambon, Mataram, dan Kabupaten Bone. Forum media menjadi tempat bertukar informasi dan gagasan untuk penguatan pemberitaan tema MAMPU.

Terbentuknya Forum Media tidak saja meningkatkan jumlah dan kualitas berita terkait tema MAMPU, tetapi sekaligus menjadi semacam "lembaga advokasi" terhadap kebijakan. Media memberitakan pembagian beras raskin yang salah sasaran atau dengan beras yang berkualitas rendah, siswa yang putus sekolah karena tidak mempunyai biaya, kelompok perempuan yang membutuhkan bantuan modal usaha, kekerasan terhadap perempuan yang didiamkan, dan sebagainya. Data dan informasi untuk pemberitaan tersebut berasal dari masyarakat yang bergabung dalam kelompok konstituen.

Berita-berita media yang menempatkan isu-isu sosial sebagai permasalahan penting tidak hanya menyampaikan permasalahan kepada pemerintah, tetapi juga membantu kelompok konstituen dalam melakukan advokasi terhadap pengambil kebijakan. Upaya masyarakat mendapatkan pelayanan sosial atau pelayanan publik menjadi lebih mudah, jika media memberitakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Di Kabupaten Bone, sepanjang tahun 2014, media memberitakan secara intens Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu (ASI) dan Reperda Pelayanan Publik, termasuk masukan dari berbagai pihak. Kedua Raperda tersebut disahkan menjadi Perda pada 24 Desember 2014, dan tugas media selanjutnya mengawasi pelaksanaan kedua Perda tersebut.

Berita Perempuan dan Kemiskinan

Di sisi lain, pemberitaan mengenai perempuan dan kemiskinan atau terkait tema MAMPU mengalami peningkatan yang cukup signifikan di koran, radio, TV lokal, dan media online. Di Kota Ambon, hasil pantauan lembaga mitra—Yayasan Arika Mahina—menyebutkan, pemberitaan terkait perempuan dan kemiskinan setelah terbentuknya Forum Media terjadi peningkatan pemberitan dari 7 menjadi 28 berita setiap bulan.

Sedangkan di Bone, forum media yang diberi nama Forum Pabbicara rutin melakukan update informasi terhadap seluruh anggotanya melalui diskusi BBM *(Black Berry Masseger)*. Dari 24 media cetak dan elektronik yang bergabung dalam Forum Pabbicara, sepanjang September-Oktober 2014 menghasilkan 110 berita terkait tema MAMPU. Atau sebanyak 55 berita setiap bulan terkait tema MAMPU yang muncul di 24 media—cetak, elektronik, termasuk *online*—di Kabupaten Bone.

Sedangkan melalui forum media di Mataram, pemberitaan tema MAMPU di Kota Mataram dan Kabupaten Lombok mencapai 5 berita per bulan di tiga media cetak.

Isi berita juga semakin positif, tidak selalu menghukum perempuan, anak, masyarakat miskin, dan kelompok marjinal lainnya. Berita-berita tentang perempuan dan kemiskinan juga semakin banyak menjadikan narsumber perempuan dan masyarakat miskin. Menjadikan perempuan dan masyarakat miskin sebagai narasumber berita berarti mengakomodasi suara-suara marjinal yang selama ini selalu diabaikan.

Keberadaan forum media juga diapresiasi pemerintah daerah. Bupati Bone, H.A. Fahsar M. Padjalangi ketika menerima audiens dengan Forum Pabbicara pada 24 Desember 2014, menyatakan mengapresiasi forum tersebut dan akan memantapkan kemitraan antara pemerintah dan jurnalis agar komunikasi dan publikasi berjalan lancar. Bupati menggagas pertemuan pemerintah dan jurnalis dalam acara *coffee morning* setiap bulan untuk membahas berbagai permasalahan dan pembangunan (Radar Bone, 26/12/2014).

(M. GHUFRAN H. KORDI K.)

Anggota Parlemen Perempuan dan **Media**

Pada 22-24 Oktober 2015 Program Mentorship MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) Yayasan BaKTI (Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia) melakukan coaching anggota parlemen perempuan (APP) Bone tentang Komunikasi Media. Peserta coaching sebanyak empat orang, yaitu Hj. A. Samsidar Ishak, A. Andriana, Jusmiah Sudirman, dan Hj. Mintayu Samsuddin. Keempat peserta adalah anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Bone.

Kegiatan yang berlangsung di dua tempat ini dibuka oleh Hj. A. Samsidar Ishak, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bone, mewakili Ketua DPRD Kabupaten Bone. Kegiatan hari pertama dilaksanakan di Ruang Rapat Ketua DPRD Kabupaten Bone, Kantor DPRD Kabupaten Bone. Dalam sambutannya, Hj. A. Samsidar Ishak menyatakan bahwa, jumlah APP di DPRD Bone yang hanya enam orang tidak menghalangi mereka untuk berbuat lebih banyak dan lebih baik untuk masyarakat, terutama untuk perempuan. Namun untuk melakukan dan berbuat yang terbaik, APP harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan, termasuk pengetahuan dan keterampilan berkomunikasi dengan media.

Media merupakan lembaga yang sangat kuat dalam memengaruhi opini publik. Sementara di pihak lain, APP belum sepenuhnya memanfaatkan media dalam melakukan tugas-tugas sebagai anggota DPRD. Karena itu, menurut Hj. A. Samsidar Ishak, APP harus memanfaatkan kegiatan ini untuk meningkatkan kemampuan dalam bermitra dengan media.

Sementara Program Officer Program Mentorship MAMPU-BaKTI, Ruslan Rahman menjelaskan bahwa, kegiatan coaching APP tentang komunikasi media ini dilakukan di dua tempat, yaitu di Bone dan Ambon. Kegiatan ini diharapkan meningkatkan kemampuan APP dalam berkomunikasi dengan media massa, sehingga dapat mendukung tugas APP sebagai anggota DPRD dan memperjuangkan isu-isu MAMPU dalam kebijakan di DPRD dan pemerintah.

Diskusi Tema MAMPU dan Kekerasan terhadap Perempuan

Kegiatan ini difasilitasi oleh Luna Vidya. Pada hari pertama (22 Oktober 2012) peserta *coaching* difasilitasi Luna Vidya untuk mendiskusikan tema-tema MAMPU, dengan mendalami kekerasan terhadap perempuan. Diskusi ini mengambil kasus pembunuhan terhadap Amel, anak perempuan berumur 4 bulan yang dibunuh dengan cara dikubur hidup-hidup.

Diskusi ini menarik karena dari pengamatan terhadap media, baik media nasional maupun

media lokal, fokus pemberitaan hanya melihat dari sisi salah satu pelaku (Arman alias Lesong Bin Ruddin) sebagai pelaku utama yang belajar ilmu hitam. Sehingga pemberitaan tidak menyorot pada perspektif lain.

Peserta diminta untuk membedah kasus pembunuhan tersebut dari perspektif yang lebih luas, seperti kemiskinan, hak asasi manusia (HAM), perempuan, dan hak-hak anak. Dari hasil bedah kasus tersebut, peserta coaching tersadar bahwa media menggiring pemahaman publik hanya dari satu sisi sehingga banyak informasi penting yang tidak tersampaikan.

Salah satu peserta, Jusmiah Sudirman mengemukakan bahwa, ternyata pemberitaan media mengenai Kasus Ameli lebih menyorot pada masalah ilmu hitam, tidak menyorot hal-hal lain yang lebih penting dan berguna untuk masyarakat, dan seharusnya diperhatikan oleh pemerintah dan DPRD. "Diskusi seperti ini sangat berguna bagi kami anggota DPRD, sehingga suatu saat dapat menganalisis kasus dan permasalahan dari sudut lain yang lebih luas" Demikian Jusmiah Sudirman menambahkan.

Pada hari pertama, peserta diminta untuk membuat *press release* mengenai Kasus Amel dengan pendekatan kemiskinan, HAM, perempuan, dan hak-hak anak sebagai praktik. Materi tersebut juga akan digukan sebagai latihan konferensi pers dengan jurnalis pada hari ketiga.

Diskusi dengan Jurnalis

Pada hari kedua dan ketiga, kegiatan coaching dilaksanakan di Rumah Makan Cobek Sari Watampone. Di hari kedua, peserta coaching berdiskusi dengan Bahtiar, Ketua Forum Media Pabbicara Kabupaten Bone, yang

juga koresponden Metro TV. Bahtiar mengemukakan kerja-kerja jurnalis dan teknik bagaimana narasumber menghadapi jurnalis.

Menurut Bahtiar, wartawan adalah profesi yang dibatasi oleh waktu (deadline) dan tempat, sehingga wartawan harus mendapat berita yang menarik dan harus disajikan dalam waktu cepat dan ruang yang terbatas. Jadi wartawan harus menulis hal-hal penting yang dianggap bernilai berita dan menarik publik. Karena itu, narasumber harus memberikan informasi yang padat dan tepat, sehingga si wartawan tidak menginterpretasi lain.

Bagi Bahtiar, APP dan anggota DPRD tidak harus menghindar dari wartawan, tetapi harus dekat dengan wartawan. Jika anggota DPRD mampu memberikan informasi yang padat dan bernilai berita, maka anggota DPRD tersebut akan selalu dicari oleh wartawan.

Membuat Press Release

Di hari ketiga, peserta *coaching* mendiskusikan hasil kerja menjadi tugas yang diberikan pada hari pertama, *press release*. Untuk diskusi dan perbaikan materi *press release* difasilitasi oleh M. Ghufran H. Kordi K., Database & Publikasi Officer MAMPU-BaKTI. Peserta *coaching* diberikan kiat-kiat untuk bisa membuat *press release* sederhana dan singkat, namun memberikan informasi dan pespektif yang lebih mencerahkan.

Perspektif media mengenai kasus-kasus perempuan dan anak, seperti Kasus Amel, menurut M. Ghufran H. Kordi K., masih menempatkan perempuan sebagai pihak yang selalu dirugikan. Media umumnya tidak menyorot kasus-kasus perempuan dan anak dari sudut hak-hak perempuan, gender, dan hak-hak anak, sehingga tampilan berita tidak menggugah pemirsa dan pembaca untuk berempati, di samping tidak merugikan perempuan dan anak. Di sisi lain, pemerintah tidak mempunyai tambahan informasi untuk membuat kebijakan dan program yang lebih baik untuk mencegah peristiwa-peristiwa lanjutan yang merugikan dan mengorbankan perempuan dan anak.

Pada hari ketiga atau hari terakhir ini, peserta *coaching* mempraktikkan konferensi pers dengan jurnalis dari media cetak dan elektronik Bone. Dari evaluasi dari praktik konferensi pers, Luna Vidya menyampaikan kepada APP untuk : (1) menyampaikan point-point penting yang bisa langsung ditangkap jurnalis; (2) tidak memposisikan diri bertahan, baik dengan bahasa tubuh maupun pernyataan di depan jurnalis; (2) usahakan mempelajari dan menguasai materi konferensi pers, wawancara, atau *release*.

Kegiatan ini diapresiasi oleh peserta *coaching*. Berikut pernyataan Hj. Mintayu Samsuddin, "pelatihan seperti baik sekali bagi saya yang merupakan anggota DPRD baru, saya berterima kasih kepada Program MAMPU dan BaKTI yang telah melatih kami untuk bisa dan berani berinteraksi dengan media dan jurnalis. Sebagai anggota DPRD yang setiap saat bertemu dengan wartawan, maka *coaching* ini membuat saya lebih siap dan berani ketika diwawancarai wartawan."

Sementara Luna Vidya, fasilitator *coaching* menyatakan, sangat mengapresiasi keempat peserta tersebut. Semangat belajar yang ditujukan oleh keempat peserta memberi harapan bahwa, APP bisa setara dengan anggota DPRD laki-laki dan dapat berbuat lebih baik untuk rakyat dan perempuan. **(M. GHUFRAN H. KORDI K.)**

MITRA YAYASAN BaKTI PADA PROGRAM MAMPU

Yayasan Arika Mahina
Jl. Rijali Belakang Soya, RT 003 RW 004,
Kelurahan Karang Panjang
Ambon – 97121
Telp/Fax: 0911 – 349483
Email : ferina2001@gmail.com

Lembaga Pemberdayaan Perempuan (LPP) Bone
Jl. Andi Malla No. 4
Kelurahan Biru, Kec. Tanette Riattang
Kabupaten Bone
Telp/Fax: 0481 - 22583
Email: ratnawati_bone@yahoo.co.id

Yayasan Kombongan Situru (YKS)
Starda Baru No. 77
Kelurahan Pantan Kec. Makale
Tana Toraja
Telp/Fax: 0423 - 22621
Email : mayjanuar@yahoo.com

Yayasan Lembaga Pengkajian, Pengembangan Ekonomi, dan Masyarakat (YLP2EM) Parepare
Jl. Jend. Ahmad Yani No. 30
Parepare
Telp/Fax: 0421 - 24167
Email: lp2em_pare@yahoo.co.id

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat untuk Perempuan (MAUPE) Maros
Jl. Damai Ongkoe No. 1
Dusun Bulu-Bulu, Desa Marumpa
Kec. Marusu, Kab. Maros
Telp. 0411 - 555322
Email : agusnawati.maupe@gmail.com

Rumpun Perempuan Sultra (RPS) Kendari
Jl. Bunga Matahari II No. 7
Kelurahan Lahundape, Kendari
Sulawesi Tenggara
Telp: 0813-4151-7413
Email: husna.kendari127@gmail.com

Panitia Pengembangan Sosial Ekonomi Keuskupan Atambua (PPSE-KA) Atambua, Belu.
Jl. Maromak Oan
Atambua, Belu, Timor
Nusa Tenggara Timur
Telp. 0389 - 21517
Email : ppse_ka@yahoo.com

Sub Office MAMPU NTB
Jl. Batu Bolong No. 22
BTN Pagutan Permai
Kel. Pagutan Barat
Mataram
Telp. 0370 - 622958
Email: titis@bakti.or.id

backcover
dalam

Yayasan BaKTI
Jl. H.A. Mappanyukki No. 32 Makassar 90125, Sulawesi Selatan - Indonesia
+62 411 832228, 833383 +62 411 852146
bakti.or.id info@bakti.or.id
yayasanbakti @InfoBaKTI @InfoBaKTI

ISBN 978-602-5089-61-9
9 786025 089619